

**Usman Pelly & Ratih Baiduri**



# Antropologi Pariwisata



**Perdana**  
Publishing



**ANTROPOLOGI PARIWISATA**

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



# ANTROPOLOGI PARIWISATA

Prof. Usman Pelly, Ph.D  
Dr. Ratih Baiduri, M.Si

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

**PERDANA PUBLISHING**  
**Bekerjasama dengan CASA MESRA Publisher**  
**Medan, 2020**

## **ANTROPOLOGI PARIWISATA**

Penulis: Prof. Usman Pelly, Ph.D

Dr. Ratih Baiduri, M.Si

Copyright © 2020, pada penulis  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution  
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

### **PERDANA PUBLISHING**

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana  
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: [perdanapublishing@gmail.com](mailto:perdanapublishing@gmail.com)

Contact person: 08126516306

Bekerja sama dengan:

### **CASA MESRA Publisher**

Griya Unimed No. 18

Jl. Pelajar Timur Teladan, Medan

Contact person: 081 612 685

Cetakan pertama: Oktober 2020

**ISBN 978-623-7160-54-5**

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian  
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau  
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis



## KATA PENGANTAR

**B**erkat Rahmat Allah SWT., akhirnya telah dapat diselesaikan Buku Bahan Kuliah (Ajar) Mata Kuliah Antropologi Pariwisata. Buku ini terdiri dari 15 pokok bahasan, berisi tentang: (1) Kelahiran Antropologi Pariwisata; (2) Dasar-Dasar Antropologi Pariwisata; (3) Peranan Budaya dalam Pengembangan Destinasi Wisata; (4) Otonomi Daerah Dan Peranan Masyarakat; (5) Wisata Desa, Desa Wisata; (6) Desa Wisata sebagai Alternatif; (7) Pembangunan dari Akar Rumpun : Pariwisata dan Masyarakat; (8) Pariwisata dan Proses Globalisasi Budaya; (9) Bali, Masyarakat di Distinasi Wisata; (10) Wisata: Mampukah Kita Bermimpi Seperti di Bali; (11) Pariwisata: Pisau Bermata Dua; (12) Danau Toba: “Bali Baru” Kedua dan Problematika yang Dihadapinya; (13) Sabang Km. Nol; (14) Turis Sumut Membelah Bukit Barisan; dan (15) Wisata Kesehatan (*Health Tourism*). Sedang sebagian wisata lainnya yang kelak dapat dimasukkan ialah “Sport Wisata” (*Sport Tourism*). Banyak bagian dalam buku ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang kemudian disatukan dalam ceramah Bapak Dirjen Pariwisata dimana skema-skemanya kemudian kami pergunakan dan untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Isi buku ini terutama disadur secara bebas, direview dan mengalami pengeditan dari buku-buku asli dan makalah yang berkenaan dengan Antropologi Pariwisata. Sangat disadari bahwa apa yang disajikan dalam buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan buku ini. Pengguna buku yang berkeinginan mengetahui lebih mendalam tentang Antropologi

Pariwisata dianjurkan untuk membaca buku atau makalah aslinya serta buku-buku lain yang terkait dengannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan agar buku ini terbatas digunakan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Pascasarjana Universitas Negeri Medan (UNIMED).

Medan, Oktober 2020

Penulis



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



## DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar Penulis .....	v
Daftar Isi .....	viii
<b>KELAHIRAN ANTROPOLOGI PARIWISATA .....</b>	<b>1</b>
1. Lahirnya Antropologi Pariwisata .....	3
2. Perkembangan Antropologi Pariwisata .....	4
3. Munculnya Antropologi Pariwisata sebagai Disiplin Ilmu ....	6
<b>DASAR-DASAR ANTROPOLOGI PARIWISATA .....</b>	<b>8</b>
1. Apa itu Antropologi Pariwisata? .....	8
2. Ruang Lingkup Antropologi Pariwisata .....	9
3. Peranan Budaya dan Ahli Antropologi Pariwisata dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata .....	12
4. Pendekatan dan Konsep Penting dalam Antropologi Pariwisata	14
<b>PERANAN BUDAYA DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA .....</b>	<b>17</b>
1. Warisan Budaya .....	19
2. Upacara Selamat Datang .....	21
3. Pariwisata Bukan Tujuan .....	23
4. Perubahan Paradigma Pelestarian Kawasan Budaya .....	26
5. Strategi Pengembangan Cagar Budaya .....	28



6. Nilai Penting Kawasan .....	28
7. <i>Sustainable Tourism Development</i> .....	32
8. Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Kawasan Cagar Budaya .....	35
9. Penentuan Batas Kawasan Cagar Budaya .....	44
10. Pengembangan Kawasan Cagar Budaya .....	47
<b>OTONOMI DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT .</b>	<b>50</b>
1. Partisipasi Masyarakat .....	52
2. Melestarikan Warisan Budaya Maritim .....	54
3. Tenggelamnya Kapal Bajak Laut .....	58
4. Cetak Biru Negeri Maritim .....	61
5. Turis Membelah Bukit Barisan .....	65
6. Universitas Maritim .....	68
7. Barus Sepanjang Bukit Barisan .....	72
8. Barus Negeri Misterius .....	76
9. Tak Hilang Melayu di Bumi .....	81
<b>WISATA DESA, DESA WISATA.....</b>	<b>89</b>
1. Desa Wisata Menghindari Spekulasi Tanah .....	90
2. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah .....	90
3. Wisata Desa Bali di Resort Ubud .....	91
4. Wisata Desa dan Desa Wtsata .....	93
<b>DESA WISATA SEBAGAI ALTERNATIF .....</b>	<b>95</b>
1. Desa-desa Wisata yang Berdikari .....	96
2. Membangun Wisata Desa Batu Megalitik .....	97
3. Danau Toba sebagai Mega Proyek Wisata .....	99
<b>PEMBANGUNAN DARI AKAR RUMPUT :</b>	
<b>PARIWISATA DAN MASYARAKAT .....</b>	<b>101</b>
1. Peran Pemerintah .....	102

2. Pembangunan sebagai “ <i>Sosial Learning</i> ” .....	103
3. Pariwisata Berdimensi Kerakyatan .....	104
4. Pariwisata dan Proses Globalisasi Budaya .....	105

### **BALI, MASYARAKAT DI DESTINASI WISATA ..... 109**

1. Peranan Pura .....	110
2. Struktur Sosial Budaya Masyarakat Bali .....	111
3. Kedatangan wisatawan .....	113
4. Kontrovesi Mengenai Kelangsungan Bali .....	114
5. Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata .....	115
6. Sendra Tari dan Berbagai Atraksi Pariwisata .....	117
7. Dampak Perubahan di Destinasi Wisata .....	118
8. Konflik Pengusaha dan Masyarakat Bali .....	122
9. Masa Depan Orang Bali .....	123

### **WISATA : MAMPUKAH KITA BERMIMPI SEPERTI DI BALI ..... 125**

1. Budaya wisata masyarakat Danau Toba .....	126
2. “ <i>Encounter</i> ” Wisatawan dengan Masyarakat .....	127
3. Kesimpulan .....	130

### **PARIWISATA : PISAU BERMATA DUA ..... 131**

1. Warisan Budaya dan Modal Wisata .....	132
2. Wisata Budaya .....	135

### **DANAU TOBA : “BALI BARU” KEDUA, DAN PROBLEMATIKA YANG DIHADAPINYA..... 136**

1. Apa yang Salah pada Danau Toba? .....	137
2. Budaya Masyarakat Destinasi Wisata .....	137
3. Masalah Lama Tinggal ( <i>Length of Staying</i> ) Wisatawan .....	139
4. Mampukah Danau Toba Menyelenggarakan Pariwisata Bermartabat? .....	139

5. Kecelakaan di Danau Toba .....	140
6. Pekerjaan Besar Sedang Menanti Kita .....	141
7. Apa yang Harus Dilakukan Eramas? .....	144
8. Danau Toba Dalam Lirik lagu .....	145
9. Sepuluh Bali Baru .....	146
10. Pelet Kerambah Jaring Apung Cemari Danau Toba .....	147
11. Budaya Wisata Danau Toba .....	149
<b>SABANG KM. NOL NUSANTARA .....</b>	<b>151</b>
1. Km 0 Nusantara .....	153
2. Sabang di Masa yang Akan Datang .....	155
<b>TURIS SUMUT MEMBELAH BUKIT BARISAN .....</b>	<b>157</b>
1. Lama Turis Disatu Tujuan Wisata .....	158
2. Airport Silangit Mengembangkan Wisata Sumut .....	159
3. Kuala Namu International Airport Menopang Turism .....	160
<b>WISATA KESEHATAN (HEALTH TURISM) .....</b>	<b>162</b>
1. Landasan Teoritis .....	165
2. Turisme dan Kesehatan .....	166
3. Wisata Perobatan ke Penang Maju Pesat .....	169
Daftar Pustaka .....	176





## KELAHIRAN ANTROPOLOGI PARIWISATA

Karya-karya klasik Franz Boas (1911-1940), Evan Pricard dan Norman Whitten Jr (1962-1969) dan kawan-kawan-nya mengenai Afrika, serta beberapa tokoh lainnya, sebahagian dari mereka sebenarnya berprofesi sebagai pastor atau penginjil, tidak hanya memaparkan kehidupan barbagai suku dan kelompok etnis didaerah itu, tetapi juga menceritakan bagaimana hubungan dan persentuhan mereka sehari-hari dalam kehidupan bersama. Dalam kontak sosial inilah terjadi proses difusi, akulturasi dan adaptasi kelompok-kelompok suku dan etnik Afrika dengan orang asing. Sungguhpun tulisan-tulisan para antropolog seperti karya Boas, Pricard dan Whitten dilihat sebagai karya antropologi, tetapi dari segi lain isi buku itu juga banyak mengungkapkan segi-segi perubahan yang telah terjadi baik sebagai difusi atau akulturasi dalam pergaulan dan kontak sosial antar mereka, yaitu antara peneliti dan orang yang diteliti.

Hasil karya terkenal Malinowski (1966) umpamanya, mengenai orang-orang Trobriand di Lautan Pasifik, sebenarnya juga secara tidak langsung, telah menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi dikalangan masyarakat Trobriand selama antropolog itu bermukim dan meneliti di daerah itu. Walaupun sebenarnya, perubaan-perubahan itu bukan menjadi fokus para antropolog tadi.

Penjelajahan yang dilakukan oleh para antropolog dan berbagai ahli kepurbakalaan, *social science* atau penjelajah lainnya seperti yang dapat dibaca dalam buku "*The Pacific Islands*" karangan Douglas L. Oliver (1962),

tentang kelompok-kelompok masyarakat di Melanesia, Polynesia, Micronesia, serta orang-orang di kepulauan Eden dan suku-suku Aborigin Australia, juga tidak menjadi fokus penulis. Sementara itu, pertemuan dan hidup penulis bersama dengan penduduk asli tadi, memang tidak bermaksud untuk mempengaruhi budaya mereka. Namun demikian, kontak sosial penduduk asli dengan para pendatang itu, sungguhpun tidak intensif dan terencana, telah terjadi dan mempunyai dampak terhadap kedua belah pihak. Apalagi, penduduk asli tadi telah menganggap para pendatang itu lebih “superior” dari mereka.



*The Golden Mermaid Songkhla*

Apalagi seperti yang dialami oleh kelompok-kelompok etnis Batak Toba di pedalaman Tapanuli Utara, ketika menerima misi Kristen dari

Jerman dibawah pimpinan Nomensen. Para penginjil ini tidak hanya melakukan kunjungan sekedar bertamu, tetapi menetap di pedalaman perkampungan Toba tersebut bertahun tahun. Para penginjil ini mendirikan gereja bersama penduduk setempat, dan mempelajari bahasa dan adat istiadat penduduk setempat itu. Bahkan beberapa nyanyian rakyat di daerah itu banyak yang mirip dengan nyanyian yang ada di Jerman (Pelly, 2020).

Para missionaris ini telah dianggap kemudian sebagai “warga” kampung Batak Toba tersebut. Yang menarik, keakraban dan penghargaan mereka terhadap misi Nomensen ini dapat dilihat dari peristiwa Perang Dunia Kedua. Sebagai orang Jerman para misionaris ini, diinternir oleh pemerintah Belanda keluar dari Tapanuli Utara. Pemerintah Belanda ketika itu ingin menggantikan para missionaris ini dengan missionaris orang Belanda sendiri. Akan tetapi, dengan serta merta ditolak oleh masyarakat Batak Toba. Mereka dengan sigap mengambil alih semua kepemimpinan gereja yang ada, dan menyatakan bahwa mereka tidak memerlukan lagi misionaris dari Belanda.

Keakraban dan keintiman hubungan sosial yang terjadi, dapat dilihat dari penghormatan mereka kepada Nomensen dengan menabalkan nama Universitas pertama sesudah kemerdekaan yang didirikan kelompok Batak Toba dengan nama Universitas HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Nomensen. Bahkan Nomensen lebih mereka hormati dari pada seorang Residen Belanda. Contoh-contoh keakraban hubungan sosial seperti ini dapat dilihat juga di beberapa daerah lain seperti Jawa Tengah atau di Nusatenggara.

## 1. Lahirnya Antropologi Pariwisata

Dalam Antropologi Pariwisata, para pendatang asing ini bukan penginjil, teknisi, pedagang, ahli pertanian atau penjajah, tetapi adalah pelancong atau wisatawan, yang tidak mempunyai niat atau maksud seperti missionaris, pedagang atau penguasa tersebut, tetapi adalah orang-orang “pengagum” atau yang berkeinginan untuk menikmati keindahan alam dan budaya penduduk setempat. Mungkin juga, monumen bersejarah seperti candi-candi, bangunan atau kraton tua, seperti Taj Mahal atau Puing-Puing bangunan di Yunani, dan hal-hal lain yang menakjubkan serta bertemu ramah dengan

penduduk masyarakat setempat dan menikmati budaya mereka yang berada dikawasan wisata itu.

Mereka mendengar kawasan atau destinasi wisata itu, mungkin dari teman yang telah berkunjung kesana, tetangga atau juga membaca advertensi dari agensi wisata yang sengaja menyebarkannya secara luas via media. Banyak diantara calon wisatawan ini harus mempersiapkan diri untuk mengunjungi suatu objek kawasan wisata tertentu, terutama mereka dari kalangan menengah kebawah. Ada yang menabung dua atau tiga tahun dan selalu mengimpikan akan segera berada di daerah destinasi wisata yang telah mereka impikan itu. Destinasi wisata itu, alam dan masyarakat serta budaya mereka itu merupakan mimpi yang diharapkan menjadi kenyataan bagi mereka (Pelly, 2018).

Turisme atau pariwisata ini dalam antropologi merupakan media tempat dimana penduduk asli dan pendatang bertemu dan merupakan arena persentuhan budaya. Persentuhan budaya itu paling tidak akan menyebabkan perubahan budaya (*the changing ones of culture elements happened*). Perhatian utama antropologi terhadap pariwisata tertuju pada persentuhan budaya itu sebagai topik utama dalam kaitan kontak budaya yang mengakibatkan perubahan sosial budaya. Pariwisata dilihat sebagai agen atau media kontak budaya, baik secara langsung atau tidak, namun pariwisata itu akan dilihat sebagai peyebab perubahan itu, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia.

## 2. Perkembangan Antropologi Pariwisata

Perkembangan penelitian antropologi terhadap pariwisata telah berlangsung, sejalan dengan berkembangnya problem-problem sosial budaya dan ekonomi dalam industri pariwisata. Untuk mengembangkan penelitian pariwisata dalam antropologi, terdapat beberapa kelompok antropolog yang menekuni pariwisata. Setiap kelompok memiliki kekhususan (spesialisasi) pendekatan seperti "*advocacy*" (pembelaan dan promosi), "*cautionary*" (kewaspadaan dan kehati-hatian) dan "*adaptacy*" (penyesuaian terhadap berbagai perubahan) (Armayanti, 2004). Penekanan dan kecendrungan mereka untuk memberikan tekanan perhatian, banyak didorong karena

situasi destinasi wisata yang sangat beragam dan membutuhkan penekanan dalam bidang-bidang tersebut.

Keempat pendekatan tersebut telah dikemukakan oleh James Spillane (1994), masing-masing pendekatan telah menunjukkan suatu pendekatan yang khas tentang pariwisata. Pertama, pendekatan **Advokasi**, yang mendukung pariwisata dan menekankan keuntungan ekonomis dari pariwisata. Pariwisata dapat digunakan untuk memajukan pertumbuhan kegiatan ekonomis seperti, menciptakan lapangan kerja, memperoleh devisa asing yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kedua pendekatan **Cautionary**, pendekatan ini sama sekali menolak pendekatan advokasi, karena pendekatan ini dapat mengakibatkan berbagai kerugian baik dalam bidang ekonomi sendiri dan sosial budaya. Seperti munculnya ekonomi musiman (kerja musiman), pada musim pariwisata pekerjaan banyak sedang pada musim lengang, terjadi pengangguran, kerana banyak hotel-hotel pada kosong. Pemandu wisata (*travel guide*) kehilangan pekerjaan, begitu juga pekerja-pekerja kasar, seperti buruh harian bermalas-malasan dan tidur seharian. Dalam situasi seperti ini, banyak terjadi kebocoran devisa asing dan berbagai macam konflik

Pendekatan ketiga, disebut **Adaptancy**. Pendekatan ini menyebutkan bahwa pengaruh negatif pariwisata dapat dikontrol dengan mencari bentuk lain perkembangan pariwisata atau wisata disesuaikan dengan daerah tujuan wisata atau negara. Pendekatan ini memandang bahwa alam dan budaya dapat disinergikan dalam satu konteks. Pendekatan ini bertahan lama, walaupun dibangun dalam skala kecil yang menyatukan kegiatan wisata dengan ekosistem setempat (*eco-tourism*). Banyak variasi pendekatan pariwisata *eco-tourism* ini yang dapat dikembangkan seperti: Pariwisata perkebunan (*agro tourism*), pariwisata yang disesuaikan dengan situasi (*appropriate tourism*), pariwisata seimbang (*balanced tourism*), pariwisata yang melibatkan masyarakat (*community tourism*), pariwisata yang mudah menyesuaikan diri (*compatible tourism*), pariwisata skala kecil (*cottage-tourism*), pariwisata etnik (*ethnic tourism*), pariwisata pertanian (*farm tourism*), pariwisata olah raga (*sport tourism*), pariwisata saling mengunjungi (*people to people tourism*), dan pariwisata yang belakangan ini jadi populer ialah pariwisata lingkungan (*eco-tourism*).



Karena kekhawatiran dampak negatif pariwisata, sekarang orang mengembangkan pariwisata pembangunan (*developmental tourism*), Pendekatan ini diajukan agar wisatawan dapat menyesuaikan diri dengan situasi sosial budaya masyarakat setempat, Dengan pendekatan ini dilakukan pembatasan wisatawan terhadap budaya masyarakat tuan rumah (*host*). Diharapkan bentuk alternatif pariwisata ini dapat menimbun jurang pemisah tanggung jawab antara wisatawan dan tuan rumah.

Pendekatan keempat, adalah pendekatan **Knowledge Based**, atau pendekatan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Pendekatan ini menggunakan pandangan sistimatis terhadap pariwisata. Disamping itu pendekatan ini juga melihat pariwisata adalah bidang penelitian yang multi-disipliner dan cenderung menerapkan teori dan metode dari berbagai bidang keilmuan yang berkaitan dengan pariwisata.

Salah satu sumbangsih Antropologi dalam mempelajari pariwisata adalah dengan menggunakan pendekatan *knowledge based* dan menggabungkan ketiga pendekatan lainnya diatas. Walaupun antropologi menerapkan metode kualitatif dengan teori-teori antropologi yang relevan serta terjun ke lapangan, tetapi antropologi cenderung menggunakan keempat pendekatan diatas dalam penelitiannya dan juga pendekatan teori-teori ilmu sosial lainnya yang relevan.

### 3. Munculnya Antropologi Pariwisata sebagai Disiplin Ilmu

Sebenarnya menurut berbagai ahli antropologi, pariwisata telah berkembang beriringan dengan perkembangan ilmu antropologi itu sendiri. Sejak abad 15-16 bumi Asia, Afrika dan Amerika didatangi oleh orang-orang Eropa, telah banyak catatan dan manuskrip yang dibuat oleh penjelajah-penjelajah yang mencatat dan mengulas temuan-temuan atau data-data etnografi mengenai penduduk asli di ketiga benua itu. Memang perjalanan para penjelajah ini dilakukan dengan berbagai modus transportasi yang sederhana bahkan berjalan kaki. Apalagi waktu mereka harus menjelajahi kelompok-kelompok etnik yang berada di pedalaman, dan perjalanan itu harus mereka lakukan agar bertemu muka dengan masyarakat yang mereka teliti.

Walaupun para antropolog telah menemukan banyak hal mengenai pariwisata, terutama mengenai dampak hubungan wisatawan dengan

penduduk setempat yang mereka kunjungi, tetapi baru pada tahun 1963, muncul sebuah artikel kepariwisataan yang dipublikasikan. Sementara itu, James Silverberg telah mengorganisasikan bidang regional kepariwisataan dalam rubrik “*Host and Guests*” (1974) dalam pertemuan *Central State Antropological Society*, untuk membicarakan Antropologi Pariwisata, pertama kalinya dilakukan di kota Meksiko. Selanjutnya dalam pertemuan Kongres Asosiasi Antropologi Amerika (Triple A’s), studi kepariwisataan secara resmi dijadikan sebagai satu disiplin akademik.

Dari pertemuan Triple A’s tersebut (1974) bergulirlah simposium dan seminar yang berkaitan dengan Antropologi Pariwisata. Fokus studi dibidang Antropologi Pariwisata, seperti telah diulas di atas, melihat kontak kebudayaan dalam arena pertemuan “*host and guests*” baik secara langsung atau tidak, yang menyebabkan terjadinya perubahan berbagai traits budaya. Perubahan-perubahan sosio budaya ini banyak terjadi dalam negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pariwisata dilihat sebagai media, dimana terjadi “tubrukan” antar budaya “*host and guests*” (Smith, Valene, 1989) yang sangat berpengaruh terhadap perubahan, baik negatif atau positif di kedua belah pihak, terutama dipihak “*hosts*” (tuan rumah).



# DASAR-DASAR ANTROPOLOGI PARIWISATA

## 1. Apa itu Antropologi Pariwisata?

**A**ntropologi pariwisata merupakan bidang kajian ilmu Antropologi yang berkaitan dengan kepariwisataan. Antropologi pariwisata terdiri dari dua kata yaitu Antropologi, Pariwisata. Dua kata Antropologi, kemudian pariwisata tidak dipisahkan oleh kata “dan”. Oleh karena itu bidang kajian Antropologi pariwisata walaupun terkait erat dengan isu-isu pariwisata namun Antropologi pariwisata tetaplah merupakan bidang kajian ilmu Antropologi yang tentu saja menggunakan perpektif Antropologi. Jadi bukan perpektif ilmu pariwisata.

Sebagai sebuah ilmu fokus utama ilmu Antropologi mengkaji manusia yang berkaitan dengan aspek-aspek budaya dalam kehidupan manusia. Sebagai sebuah ilmu antropologi mengembangkan ilmunya dalam berbagai bidang salah satunya adalah bidang kajian pariwisata. Antropologi pariwisata merupakan bidang kajian dari ilmu antropologi yang berkaitan erat dengan bidang pariwisata. Kata wisata merupakan perjalanan seseorang atau kelompok ke destinasi wisata atau travel. Pariwisata diartikan sebagai usaha jasa perjalanan yang melayani keperluan perjalanan seseorang atau kelompok ke destinasi wisata (*tourism*) atau industri travel (*travel industry*). Sedangkan istilah “Kepariwisataan” sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata pada tataran makro antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam (POLEKSOSBUDHANKAM) atau dengan istilah *tourism*.

Kajian pariwisata dalam perspektif Antropologi, memandang pariwisata sebagai bagian dari segala aktifitas budaya manusia yang berkaitan dengan suatu destinasi budaya.

## 2. Ruang Lingkup Antropologi Pariwisata

Antropologi merupakan ilmu yang mengkaji manusia dan kebudayaan. Sebagai sebuah ilmu Antropologi memiliki sejumlah bidang kajian diantaranya yaitu bidang kajian Antropologi Pariwisata. Hubungan antropologi dan pariwisata adalah membahas dua hal utama yang menggunakan perspektif antropologi. Pertama, antropologi pariwisata dapat melihat berbagai persoalan yang terjadi dalam pariwisata. Kedua, antropologi pariwisata dapat melihat dan memberikan solusi terhadap berbagai dampak social budaya dengan munculnya pariwisata di suatu daerah/lingkungan. Pokok pembahasan dalam Antropologi mencakup masalah-masalah yang terkait dalam pembentukan tradisi, identitas dan hubungan antar suku bangsa, politik, stereotipe dan pengalaman, serta masalah penulisan etnografi yang penting dalam kajian pariwisata. Sementara perspektif Antropologi diperlukan untuk memahami dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di kalangan wisatawan, dalam industri pariwisata, maupun di masyarakat daerah tujuan wisata itu sendiri.

Hubungan antropologi dan dunia pariwisata adalah untuk membahas aspek- aspek budaya dalam masyarakat yang mempunyai potensi sebagai aset dalam dunia pariwisata. Pariwisata yang dikelola dengan berbasis budaya masyarakat merupakan upaya pelestarian budaya sekaligus dapat menjadi aset pariwisata yang berguna dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah devisa Negara. Tentunya diharapkan dengan munculnya destinasi pariwisata tidak sampai menghilangkan makna dan nilai dari satu budaya yang dianggap adiluhung. Namun demikian dalam realitasnya hal ini tidak dapat dihindari terjadinya perubahan sosial budaya saat terjadinya pengembangan ini.

Sebagai sebuah ilmu yang mengkaji tentang berbagai kebudayaan, Antropologi berusaha untuk membandingkan cara-cara hidup manusia, budaya dari suatu kelompok manusia dengan manusia lainnya dan yang

menyangkut segala sesuatu tentang manusia dalam kaitannya dengan kebudayaan. Penelitian dasar antropologi pada pariwisata adalah bertujuan untuk lebih memahami berbagai macam tindakan-tindakan wisatawan berhadapan dengan destinasi wisata dalam konteks budaya yang berbeda. Antropologi pariwisata juga berkaitan dengan cara-cara kelompok mengemas pariwisata berbasis budaya dalam suatu kawasan budaya. Selain itu kajian antropologi pariwisata adalah untuk menyingkap cara yang digunakan wisatawan untuk memberi keuntungan kepada daerah tujuan wisata dalam upaya mengembangkan dunia wisata. Para antropolog juga ingin mengetahui pengaruh dari tindakan orang-orang yang ada di daerah tuan rumah terhadap wisatawan-wisatawan itu sendiri.

Pariwisata itu tidak hanya sebatas pada jalan-jalan, pergi melihat sesuatu yang indah. Namun, pariwisata menyangkut kehidupan social budaya masyarakat secara umum, terutama untuk kajian antropologi. Setiap manusia butuh untuk mengekspresikan diri dengan caranya sendiri. Posisi disiplin ilmu antropologi dalam pariwisata adalah untuk memahami fenomena-fenomena sosial-budaya yang berkaitan dengan bidang pariwisata.

Antropologi pariwisata sebagai sebuah cabang ilmu yang mengkaji persoalan yang terkait dengan masalah-masalah sosial – budaya pariwisata. Sebagai sebuah ilmu selain bertujuan akademis Antropologi juga mempunyai tujuan praktis yaitu hasil dari kajian antropologi pariwisata berperan penting dalam memberikan solusi (*problem solving*) terhadap persoalan pariwisata. Selain itu bidang kajian ini dapat mengembangkan masalah-masalah kepariwisataan berbasis budaya dalam suatu masyarakat.

Dalam rangka itu lahirlah Antropologi Pariwisata yang didefinisikan sebagai ilmu bagian atau spesialisasi dari ilmu antropologi yang secara khusus memfokuskan perhatiannya pada masalah-masalah sosial-budaya yang terkait dengan kepariwisataan. Simposium Antropologi Pariwisata untuk pertama kalinya diadakan di kota Meksiko tahun 1974 yang diorganisir oleh James Silverberg khususnya bidang regional kepariwisataan bersama dengan pertemuan Central State Anthropological Society, sebagaimana yang dikutip dari Smith dalam Host Guests 1974 (Ermayanti, 2004).

Sejak tahun 1974 inilah mulai banyak dilakukan simposium dan seminar Antropologi Pariwisata untuk memperkaya literatur Antropologi Pariwisata.

Perkembangan Antropologi Pariwisata dirintis oleh N.H. Graburn, melalui karyanya: *The Anthropology of Tourism* (1975) (Pujaastawa. 2017:1). Sejak itu, Antropologi merupakan spesialisasi ilmu Antropologi yang memfokuskan perhatian pada masalah-masalah sosial-budaya yang terkait dengan bidang kepariwisataan. Peran Ilmu Antropologi menjadi semakin penting mengingat perkembangan pariwisata sebagai industri perjalanan telah menimbulkan implikasi sosial-budaya yang kompleks (Bagus & Pujaastawa, 2017; Graburn, 1983).

Realitasnya pariwisata ternyata tidak hanya berdampak positif. Antara lain, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatnya pendapatan perkapita yang akan menambah pendapatan negara akibat kunjungan wisatawan di suatu daerah. Pariwisata juga memiliki dampak negatif yang sangat serius, harga mahal yang harus dibayar oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun demikian dampak negatif yang paling tidak diinginkan adalah kerusakan lingkungan, perubahan politik, serta perubahan sikap sosial – budaya masyarakat. Dalam hal inilah Antropologi Pariwisata berperan dalam rangka mengatasi perubahan-perubahan sosial – budaya pada masyarakat. Pujaastawa (2017:1) lebih lanjut menyebutkan bahwa perubahan sosial–budaya yang dimaksud adalah tindakan atau berpola berkaitan dengan kedudukan dan peranan individu-individu dalam konteks pariwisata. Sedangkan sistem budaya merupakan seperangkat ide yang terdiri dari unsur-unsur nilai, norma, hukum, dan aturan yang menjadi pedoman bagi setiap tindakan dalam rangka pariwisata.

Selain itu Antropologi Pariwisata berbasis pada kajian terhadap kebudayaan dalam kaitannya dengan kearifan lokal suatu daerah yang dapat dijadikan sebagai media pengembangan pariwisata. Pariwisata dipandang tidak hanya berbasis pada kekayaan alam saja seperti yang terdapat di daerah-daerah objek wisata. Pariwisata berbasis budaya ini menggambarkan bahwa meskipun kekayaan sumber daya alam berpotensi besar dan sangat memiliki nilai jual pariwisata yang tinggi, tentunya tidak akan membuahkan hasil yang baik jika tidak disertakan dengan perubahan perilaku manusia yang hidup didalam ruang lingkup potensi pariwisata tersebut.

Sebagai contoh jika kita membandingkan pariwisata Danau Toba dapat berkembang pesat seperti di Bali jika saja ada pendekatan sumber daya manusia dengan alam yang saling memiliki harmoni. Pendekatan

terhadap kepedulian masyarakat akan budaya lokal sebagai salah satu aset dan nilai jual pariwisata. Jika dikaji lebih mendalam lagi, tentunya kita akan mendapatkan banyak jawaban untuk mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya yang terkait juga dengan kearifan lokal di seputar kawasan danau toba tersebut.

Dengan demikian ruang lingkup bidang kajian antropologi pariwisata dapat dijelaskan di sini mencakup tingkah laku manusia terkait dengan up aya yang dilakukan, dampak serta manfaat yang diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari masyarakat berbudaya sehubungan dengan industri pariwisata yang sedang berjalan.

Donald, Macleod dan Tom Selwyn (2002) seorang antropolog yang mempunyai keahlian dalam antropologi pariwisata menguraikan tiga hal yang saling berhubungan dengan pariwisata dalam subdisiplin: (1) Bidang ilmu semiologi; (2) masalah ekonomi politik; (3) pariwisata dan ilmu pengembangannya.

Selanjutnya Selwyn secara provokatif menyarankan masa depan arah dari ketiga subdisiplin itu bisa menjadi terintegrasi dengan mempelajarinya secara seksama. Sebaiknya praktisi dan mahasiswa antropologi perlu untuk menyadari bahwa bidang kajian antropologi pariwisata ini semakin ekspansif dan penting bagi dunia industri yang memiliki nilai ekonomis begitu juga yang berkaitan dengan dampak social budaya dalam lingkungan pariwisata tersebut.

### **3. Peranan Budaya dan Ahli Antropologi Pariwisata dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Budaya merupakan kekuatan utama dalam pengembangan destinasi pariwisata. Berbagai negara maju sudah mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Oleh karena tanpa menyertakan budaya pengembangan pariwisata yang hanya mengembangkan fasilitas fisik tidaklah menjadi menarik dan unik untuk didatangi turis. Sebagaimana kita ketahui berbagai daerah memiliki latar budaya daerahnya masing-masing yang beragam. Keberagaman budaya inilah membuat para wisatawan (turis) menarik

untuk dikunjungi. Masing-masing budaya memiliki kekuatan dan keunikan tersendiri yang sebenarnya potensial diakomodir dalam industri pariwisata. Semakin maju suatu negara pasti akan berusaha mengembangkan pariwisata dengan basis utama budayanya. Dengan kata lain budaya merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan dalam pengembangan pariwisata.

Beberapa istilah penting dalam kajian antropologi pariwisata yaitu destinasi Wisata, event dan warisan budaya. Destinasi wisata diartikan sebagai budaya yang berwujud benda. “Destinasi” dapat diartikan sebagai Bangunan Situs atau kawasan budaya atau Warisan Budaya tak benda. Event diartikan sebagai sebuah kegiatan pertunjukkan yang dapat berupa upacara adat, pertunjukan religi, pertunjukkan musik tari dan pertunjukkan Ilmu Pengetahuan. Sedangkan warisan budaya merupakaninggalan manusia yang bersifat “benda” dan “tak benda” yang dinilai penting artinya bagi pengembangan ilmu Pengetahuan, sejarah dan kebudayaan, sehingga perlu dilestarikan demi memupuk jatidiri bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Budaya sangat berperan penting dalam pariwisata. Peran penting budaya dalam pariwisata antara lain sebagai media Pendidikan “*See The Light and take the wisdom*”. Seorang wisatawan yang pergi ke suatu destinasi pariwisata dengan melihat berbagai budaya suatu daerah dan kemudian dapat mendapatkan kebijaksanaan atau kearifan local dari budaya tersebut. Pariwisata berbasis budaya merupakan sebuah pelestarian budaya dalam bentuk yang dinamis. Seorang wisatawan yang disuguhi dengan pertunjukkan budaya akan mendapatkan kesenangan (*ameity*) tersendiri dalam bentuk sajian dan informasi. Selain itu peran budaya dalam pariwisata dapat membentuk nilai, sikap masyarakat setempat terhadap warisan budaya yang positif.

Pariwisata berbasis budaya dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat yang peduli budaya dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pariwisata tersebut. Dengan adanya pariwisata berbasis budaya menjadi portal bagi terciptanya hubungan antar bangsa dan diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran jati diri bangsa.

Dengan demikian tidak dapat disangkal lagi pariwisata yang mengandalkan budaya merupakan hal yang sangat ideal dan menguntungkan masyarakat, negara dan bangsa. Namun demikian begitu banyak persoalan yang terkait



dengan pariwisata yang memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu ahli Antropologi pariwisata mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan potensi pariwisata berbasis budaya dalam suatu daerah/kawasan. Berbekal pengetahuan akademis yang baik terhadap berbagai budaya yang memiliki potensi kepariwisataan, dengan demikian aspek terapan antropologi pariwisata dalam berperan penting dalam mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan pariwisata berbasis budaya.

#### **4. Pendekatan dan Konsep Penting dalam Antropologi Pariwisata**

Seiring munculnya masalah-masalah social budaya dalam kegiatan pariwisata mengakibatkan semakin meningkatnya kajian Antropologi yang terkait dengan isu-isu tentang pariwisata. Pada awalnya memang bidang pariwisata hanya berfokus pada potensi ekonomis pariwisata. Potensi ekonomis pariwisata antara lain dari pihak penyelenggara pariwisata seperti nilai-nilai ekonomi seperti apa yang mendorong orang untuk berwisata, apa yang menentukan pilihan orang berwisata, kegiatan dan makanan apa yang disuguhkan selama berwisata, bagaimana pola perbelanjaan wisata dan sebagainya. Sebaliknya pariwisata akan berdampak ekonomis bagi tuan rumah atau masyarakat dimana pariwisata itu berada seperti apakah pariwisata berdampak ekonomi bagi masyarakat tuan rumah, bagaimana pemerintah setempat mengembangkan sumber social budaya dan sumber alam untuk dikembangkan menjadi daya tarik pariwisata di daerah pariwisata tersebut.

Dalam perkembangan berikutnya lambat laun ilmu Antropologi mengembangkan perhatiannya pada hubungan antara tuan rumah dan tamu dalam kegiatan pariwisata serta permasalahan yang terjadi akibat berkembangnya pariwisata. Hubungan tuan rumah dan tamu menurut Emiyanti (2004) sebaiknya tidak hanya dilihat dalam kaca mata ekonomis belaka melainkan perlu dipikirkan persoalan kebudayaan dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat tuan rumah dimana pariwisata itu berada.

Secara umum ada dua pendekatan penting dalam Antropologi Pariwisata. Pertama, Antropologi ingin melihat kajian pariwisata dalam kaitan “tuan

rumah dan tamu” secara mendalam dan kompleks, tidak hanya terbatas pada masalah sosial-ekonomi dan industri, tetapi dalam kaitan tuntutan dan tekanan-tekanan yang akan muncul dalam menggalkan pariwisata. Seperti dalam memamerkan budaya kepada wisatawan dimana ada keinginan untuk menyenangkan mereka, padahal akan membahayakan keaslian budaya sendiri.

Kedua, Spillane, James (1994) mengemukakan empat pendekatan dalam Antropologi Pariwisata. Pertama, *Advokasi* (mendukung kegiatan ekonomi). Pendekatan ini menekankan keuntungan ekonomis yang diharapkan dari munculnya kegiatan kepariwisataan. Kedua, *Cautionary* (waspada), ekonomi pariwisata musiman, ada musim lengang dan sunyi menyebabkan pengangguran. Pendekatan ini menekankan bahwa pariwisata dapat mengakibatkan kerugian dari beberapa aspek sosial ekonomi. Pariwisata dianggap bersifat musiman setelah turis kembali ke tempat asalnya hotel-hotel sepi, berbagai kegiatan ekonomi terhenti dan dapat menimbulkan pengangguran. Ketiga, *Adaptancy*, mencari pola yang terkontrol. Pendekatan ini menyatakan bahwa pengaruh negative dari pariwisata dapat dikontrol dengan mencari bentuk lain dari perkembangan pariwisata yang disesuaikan dengan daerah tujuan wisata.

Dasar dari pendekatan ini menyatakan bahwa alam dan budaya dapat dipadukan dalam satu konteks. Pendekatan ini mengusulkan strategi pembangunan skala kecil, pariwisata yang dapat bertahan lama, pariwisata dengan cara menikmati kehidupan masyarakat setempat, dan pariwisata yang berkaitan dengan ekologi. Keempat, *Knowledge base*, merangkum dan menggunakan secara selektif ketiga pendekatan diatas. Pendekatan ini menganggap pariwisata perlu didekati dengan ilmu pengetahuan yang multidisiplin yang memiliki kaedah teori dan metode dari berbagai bidang ilmu yang berkaitan dengan pariwisata.

Pendekatan ini memanfaatkan beberapa hal yang positif dan negative dari ketiga pandangan sebelumnya dan menggunakan pandangan sistematis terhadap pariwisata. Dalam kaitan terhadap pendekatan *knowledge based* inilah ilmu Antropologi berperan penting terhadap kajian pariwisata. Antropologi dikenal dengan penelitian kualitatif yang bersifat etnografis melakukan penelitian terjun langsung ke lapangan dan mampu menggambarkan secara mendalam dan detail masyarakat dan kebudayaan yang menjadi

perhatiannya. Dengan demikian mengandalkan teori dan konsep yang dikembangkannya, Antropologi berperan penting dalam mengidentifikasi potensi pariwisata berbasis budaya dan dapat menemukan dan memberi solusi terhadap permasalahan sosial budaya yang terjadi dalam pariwisata.

Menurut Pujaastawa (2017) dalam konteks pariwisata interaksi antara kebudayaan wisatawan dengan kebudayaan tuan rumah cenderung menimbulkan perubahan-perubahan pada kebudayaan tuan rumah. Konsekuensi yang mungkin terjadi antara lain:

- (a) Substitusi: Fungsi unsur-unsur kebudayaan lokal diambil alih oleh unsur-unsur kebudayaan asing dengan perubahan struktural yang minimum.
- (b) Sinkretisme: terbentuknya sistem baru dari percampuran unsur-unsur kebudayaan lokal dengan unsur-unsur kebudayaan asing dengan kemungkinan terjadinya perubahan kebudayaan yang cukup berarti.
- (c) Adisi: penambahan unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan lokal.
- (d) Dekulturasi: Hilangnya bagian-bagian substansial dari kebudayaan lokal.
- (e) Oriijinalisasi: Munculnya unsur-unsur kebudayaan yang baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru sebagai akibat dari kondisi yang berubah.
- (f) Revitalisasi: Bangkitnya atau menguatnya daya tahan kebudayaan lokal dari pengaruh-pengaruh budaya asing.
- (g) Penolakan: Perubahan kebudayaan yang terjadi akibat pengaruh asing tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat sehingga dapat menyebabkan pemberontakan atau gerakan kebangkitan.

Konsep-konsep penting lain yang relevan dengan antropologi pariwisata yaitu akulturasi dan difusi. Akulturasi adalah penerimaan *traits* (unsur) budaya asing ke dalam budaya sendiri secara berangsur tanpa menghilangkan budaya sendiri. Sebenarnya dalam proses akulturasi terjadi juga proses “*take and give*” antar budaya. Sedangkan difusi adalah penyebaran unsur-unsur budaya, melalui kontak sosial (pertemuan dan kehadiran dalam berbagai acara kesenian).



## PERANAN BUDAYA DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA

**D**estinasi budaya, adalah tempat tujuan wisata yang merupakan “kawasan budaya” yang berwujud berbagai situs atau bangunan bersejarah dan benda-benda budaya. Seperti di pulau Nias rumah-rumah adat batu megalitik (*omo hada* Nias) dimana terdapat situs lompat batu atau dipantai Lagundri (Nias Selatan) yang selalu ramai untuk berselancar dan terkenal didunia. Puluhan rumah-rumah batu megalitik itu seakan tersusun berjajar di desa-desa Bawomataluo dan Hilisimaetane (Nias Selatan). Pada jajaran itu, terdapat beberapa rumah besar yang bertingkat seakan mencuat dan “mendaki langit.” Rumah yang mencuat ini adalah rumah bangsawan Nias. Ada kumpulan batu-batu besar datar seperti meja, dan dikelilingi batu-batu tempat duduk, lokasi ini merupakan tempat persidangan (*ora hua*) dan berada ditengah perumahan megalitik (*omo hada*) tadi.

Mereka memiliki sanggar tari (*Sanano Fakhe*), kalau ada tetamu yang datang, para penari tadi memberikan sirih kepada tetamu itu. Ada tari perang yang digelar dalam spesial *event* semua itu tersuguh bagi tamu (wisatawan) yang datang berkunjung. Tradisi megalitik di daerah Nias ini, merupakan satu-satunya tradisi megalitik yang tampak masih kuat didunia, karena itu pula perlu dilestarikan.



*Gambar rumah Nias*

Seperti juga di desa Bayer Munchen Jerman Selatan, terdapat rumah-rumah tua perkampungan abad ke-19 yang secara utuh ditinggalkan penghuninya (mereka pindah ke desa lain dengan ganti rugi pemerintah). Di rumah-rumah sederhana yang beratap metal dan sekarang ditepinya dihimpit beberapa batu besar, agar tidak terbongkar kalau angin kencang melanda. Rumah-rumah sederhana ini berdinding kayu, dan masih asli (orsinil) letaknya bertabur di desa itu. Kalau kita menyaksikan situs museum perumahan ini dari ketinggian, kita seakan berada di salah satu desa di Jawa Timur. Inilah “Museum Desa” abad 19 yang telah dihuni sebelum Perang Dunia Pertama di Jerman Selatan. Didalam rumah segi empat 5x10 m persegi itu dapat kita saksikan kembali isi rumah yang lengkap, kamar tamu, kamar tidur, di dalamnya ada tilam, bantal dan kelambu. Begitu juga di kamar makan, ada meja makan, piring, pisau, sendok dan garpu. Ketika sampai ke kamar mandi kita dapati bak kamar mandi dengan WC yang cukup sederhana, begitu juga dapunya. Dibelakang rumah-rumah itu kita temui kincir air atau dua ekor kuda yang menghela dua buah gardu beton bulat besar (sebesar cincin sumur) yang didudukkan berdempet, yang dihela berkeliling oleh seekor kuda. Dahulu alat ini digunakan untuk menggiling gandum atau jagung untuk konsumsi sehari-hari. Disekeliling desa perumahan yang ditinggalkan itu, dijumpai juga kebun sayur mayur, bunga dan buah-buahan yang dihasilkan desa itu. Kebun ini masih dikelola para penjaga museum tersebut. Ada pameran hasil kerajinan berupa rumah-rumah miniatur desa Bayer yang ditinggalkan oleh yang punya

itu. Wisatawan dapat membelinya sebagai oleh-oleh, atau membeli sayur mayur (yang ditanam tanpa insektisida), bunga dan buah-buahan.



*Gambar Museumsdorf Bayerischer Wald*

## 1. Warisan Budaya

Di sebahagian besar dari destinasi budaya itu di dapati “warisan budaya benda dan tak benda,” yang berupa “event” atau “peristiwa-peristiwa budaya” yang ditampilkan dihadapan wisatawan yang berkunjung. Seperti di Pulau Nias, ada upacara adat, religi, musik, tarian dan berbagai ragam ilmu pengetahuan dan keterampilan tradisional. Demikianlah, alam yang indah dan warisan budaya yang menarik dan spektakular itu, adalah dua sisi yang saling melengkapi dalam satu destinasi budaya yang menarik wisatawan untuk berkunjung.

Apa yang disebut sebagai “warisan budaya” adalah sesuatu yang merupakan peninggalan manusia yang bersifat “benda” dan “tak benda” yang dinilai penting artinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan. Sejatinya, warisan budaya itu perlu dilestarikan, demi memupuk jati diri (identitas) bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara yang bersangkutan. Lebih dari itu warisan budaya ini (*cultural heritages*)

merupakan kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Warisan budaya sangat penting untuk dilestarikan, bukan untuk diperjualbelikan. Warisan budaya itu akan terus memberikan inspirasi dan bisikan batin atau memanusiaakan manusia agar manusia selalu ada dalam koridor kemanusiaannya.

Dalam dunia pendidikan, seni budaya selalu diajarkan dan diperkenalkan untuk “kehalusan budi daya dan pekerti,” seperti istilah “*see the light and take the wisdom*.” Justru itu sekali lagi warisan budaya itu perlu dilestarikan, walaupun dalam penyajiannya selalu perlu diperhatikan unsur dinamikanya, karena proses perubahan zaman dan teknologi yang selalu diperlukan demi inovasi dan pembaharuan. Tetapi pembaharuan atau inovasi ini tidak melunturkan orsinalitas (keaslian) situs budaya itu.

Namun dalam penampilan seni-budaya, baik dalam pergaulan dengan wisatawan dan acara pertunjukan, agar seni budaya itu dihidangkan dalam bentuk yang “*amenity*” (ramah), sehingga dalam peformansi seni budaya itu tidak terkesan semacam perintah, ancaman atau kecongkakan. Hal itu merupakan nilai-nilai dan sikap yang diperlukan oleh masyarakat setempat yang menjadi “*host*” dalam mengungkapkan, mempersembahkan atau memperkenalkan nilai-nilai warisan budaya mereka. Ini adalah faktor yang penting diperhatikan oleh kelompok-kelompok pemegang dan pemilik budaya yang diwarisinya, dalam penampilan dan pertunjukan budaya pariwisata.

Sikap yang ramah dan menyenangkan (*amenity*) dalam menghidangkan berbagai acara pertunjukan, apakah itu tarian, nyanyian, teatral, atau pameran budaya, sering dilupakan oleh tuan rumah (*host*) di lokasi destinasi budaya. Bahkan sering juga suatu pertunjukan budaya terkesan “kasar,” keterlaluhan atau “*over optimistic*.” Kehalusan budi atau keramahan dalam penampilan atau penyampaian nilai-nilai budaya disuatu kawasan budaya dapat menyejukkan suasana hati dan fikiran wisatawan yang berkunjung dan menimbulkan rasa penghargaan.

Oleh karena kesan yang menyejukkan itu pula, banyak diantara mereka berjanji dalam hati atau menyampaikannya kepada orang lain, atau untuk kembali lagi ke destinasi wisata itu. Seyogianya nilai-nilai budaya yang anggun dan universal ini menjamah batin para wisatawan, akan mengikat mereka untuk asyik menikmati performansi acara budaya yang di pergelarkan. Keadaan ini pada gilirannya akan mengisi kekayaan batin mereka. Disinilah

kepedulian yang sering dilupakan “*host*” tuan rumah yang menghadirkan sesuatu pertunjukan atau menghadirkan pameran atau warisan budaya disuatu situs wisata. Terjalannya hubungan batin antara wisatawan dan tuan rumah (*host*) wisata.

## 2. Upacara Selamat Datang

Banyak cara-cara yang praktis tetapi sangat menyentuh, untuk menyambut tamu (wisatawan), sehingga mereka merasa cepat “*at home*” dan menghilangkan rasa canggung dinegeri orang. Jepang umpamanya menggelar “jamuan teh” (*tea party*) untuk menyambut tamu mereka, Saya dan istri umpamanya sebelum memasuki ruangan pertunjukan seni pertunjukan, diminta memakai baju kimono (pakaian tradisional Jepang). Kemudian kami duduk berdampingan disuatu perhelatan diruang sederhana yang telah disediakan. Beberapa orang geisha (penerima tamu) yang berpakaian kimono cantik, menghadirkan semangkok kecil teh panas, untuk disedu, sementara musik tradisional Jepang yang melancolis menghibur kami. Event selamat datang ini berlangsung sekitar 20-30 menit, dan kemudian kami dibimbing kekamar lain untuk melepaskan kimono.



*Upacara Selamat Datang*

Di Puked Thailand, “welcoming party” ini berlangsung agak unik, Begitu kami sampai dimuka hotel tempat penginapan, kami diminta berjalan berbaris



berjajar seorang demi seorang kesebuah alun-alun. Dimuka hotel telah menanti sebuah alun-alun tempat upacara yang sederhana, sebuah kolam mini (4x4 meter), yang berisi air dengan bunga mawar yang bertaburan. Dua ekor gajah besar yang telah dihiasi, dan berdiri masing-masing disisi kolam dan diapit masing-masing oleh seorang putri Thai yang berpakaian tradisional. Kedua putri dan gajah tadi berdiri dipinggir kolam menanti rombongan turis yang datang satu persatu kekolam, dengan kaki telanjang (lelaki telah menyingsingkan pantelannya ke atas lutut dan sepatu telah pula ditanggalkan). Sang putri membimbing satu persatu turis mendekati kolam dan gajah tadi menghirup air kolam yang berisi bunga-bunga mawar yang bertabur di atas dalam kolam. Air yang dihirup gajah tadi, disemprotkannya kekaki turis yang berjalan antri dimuka kolam. Suasana hening, sungguhpun terasa meriah penuh dengan kejutan (*exited*) telah terjadi. Sesudah itu kami digiring ketenda-tenda berikutnya, dimana sudah menunggu putri-putri yang akan mengurut kaki kami. Kami merebahkan badan, seakan terlena sejenak. Sehingga waktu kami memasuki hotel, lelah dalam perjalanan dari airport rasanya telah hilang. Kami berpandangan satu sama lain termasuk dengan istri-istri kami yang senyum-senyum sumriah. Saya teringat, mengapa seorang teman saya berlari lari mengelilingi kembali situs selamat datang itu, waktu saya tanya, dia berbisik “saya lupa untuk difoto, ... waah!”



*Foto di Puket Thailand*

### 3. Pariwisata Bukan Tujuan

Pariwisata adalah alat untuk mencapai tujuan, terwujudnya masyarakat yang peduli budaya manusia sejangat dan kegiatan pariwisata itu pada gilirannya akan dapat memberikan kesejahteraan. Sebagai portal bagi hubungan antar budaya dan antar etnik-ras serta diharapkan kegiatan pariwisata itu mampu mendorong tumbuhnya kesadaran jati diri bangsa yang bersangkutan dan saling pengertian serta persahabatan.

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini terasa kian kompleks, baik karena letak geografisnya, keindahan alam dan keunikan ragam budaya yang dimilikinya, karena itu pula limpahan wisatawan asing dan domestik setiap tahunnya melonjak. Seperti diketahui, setelah kemerdekaan (1945) sampai sekarang, kita hanya mengandalkan Bali sebagai pusat pariwisata, baik nasional maupun internasional. Namun sejak tahun 2020 yang lalu, pemerintah Indonesia secara resmi telah menetapkan lima destinasi wisata baru (yang semula dinyatakan 10), yang dijuluki “Bali Baru.” termasuk Danau Toba.

Setelah abad dua puluh, terjadi revolusi industri dan teknologi komunikasi antar negara, maka lonjakan keinginan manusia untuk mengenal budaya antar negara, bahkan antar daerah dalam lingkup masing-masing negara. Memang perjalanan wisata domestik masih lebih banyak dan ramai dari pada antar negara tetapi perjalanan wisata dewasa ini telah mendapat dukungan transportasi darat, laut dan udara yang cukup baik, seperti bebas visa. Karena itu, sekarang dikenal wisatawan antar negara dan wisatawan lokal atau domestik yang meramaikan industri pariwisata.

Kebutuhan untuk melihat dan mengenal budaya asing atau nasional ini, juga memiliki kegunaan tidak hanya untuk kesenangan biasa, tetapi sekarang terkait dengan kesegaran, kesehatan mental atau jiwa dan hasrat untuk menambah ilmu pengetahuan. Karena itu dewasa ini telah berkembang wisata kesehatan atau wisata sport dan berbagai cabang wisata lainnya. Sehingga di Jepang umpamanya, sebagai negara industri maju, mereka mendorong buruh atau karyawannya melakukan wisata keluar negeri, minimal empat tahun sekali. Program ini sangat terkait, tidak hanya dengan memperluas wawasan berfikir, tetapi juga kebugaran dan kesehatan para karyawan mereka.

Oleh karena itu setidaknya, ada empat permasalahan pariwisata yang telah dirumuskan oleh Direktorat Pariwisata Republik Indonesia (Drajat, 2006) dewasa ini, yaitu sebagai berikut :

- (1) Konsep pengembangan kawasan cagar budaya belum komprehensif dan integral (*tangible* dan *intangable*),
- (2) Orientasi peningkatan pelestarian perlu diarahkan pada prinsip perlindungan dan pemanfaatan,
- (3) Pandangan yang berorientasi pada ekonomi perlu diarahkan pada sosial budaya, khususnya budaya setempat,
- (4) Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.

Pengembangan kawasan cagar budaya, seyogianya telah dibicarakan oleh pemerintah setempat dengan para budayawan dan pemuka masyarakat di kawasan wisata yang bersangkutan. Sejauh mana situs-situs budaya tertentu di wilayah mereka, dapat secara komprehensif direnovasi atau dikembangkan, bagaimana penampilan pagelarannya. Apakah situs tertentu memerlukan perhatian atau pemikiran tertentu, seperti perluasan atau renovasi penampilan, bagaimana dengan, kerapian dan tata busana. Semua itu diperhatikan, agar wisata yang berkunjung dapat terakomodasi, harapan dan angan-angan yang dibawanya, sejak dia melangkah kakinya menuju destinasi wisata. Siapa yang bertugas sebagai pengasuh atau pengawas setempat, apakah mereka memiliki kelompok-kelompok yang secara rutin dapat mengembangkan berbagai faset budaya yang akan dipamerkan dalam rangka menyambut wisatawan yang datang, atau bagaimana pelatihan yang perlu dipersiapkan. Bagaimana semua program itu, secara teknis dapat diprogramkan, ditampilkan atau dikembangkan berkesinambungan.

Dalam orientasi peningkatan pelestarian, perlu difikirkan hal-hal yang bertalian dengan segi-segi filosofis, etik dan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah situs budaya. Baik dalam usaha filosofis dan nilai-nilai budayanya, maupun dalam pengembangan dan pemamfaatannya. Dalam kaitan ini perlu selalu di fikirkan, agar tidak terjadi pelonggaran, kedodoran yang menyebabkan situs budaya itu kehilangan makna. Apakah dalam kaitan tarian, nyanyian, musik, teater, baik dari peralatan, kelengkapan busana atau

penampilannya. Disini perlindungan, pengembangan dan pemamfaatan secara komprehensif harus dinilai ulang secara menyeluruh dievaluasi.

Pandangan yang berorientasi ekonomi, memang memerlukan berbagai pertimbangan dan perhitungan yang lebih akurat dan tertata rapi, sehingga tidak menimbulkan berbagai kecurigaan dan buruk sangka anatar petugas dan pimpinan. Seperti mendapatkan keuntungan selain untuk kebutuhan pribadi (pelaku-pelaku budaya), digunakan untuk memperkuat dan memperbaharui segala sesuatu yang dibutuhkan bagi penampilan budaya yang lebih baik dari masa kemasa. Bagaimana aspek finansial ini dimanage secara lebih transparan dan adil, bagaimana kedudukan pemerintah setempat, koordinasi dan saling percaya sangat diperlukan, agar tidak menimbulkan efek sampingan yang merugikan pengembangan situs budaya kepariwisataan secara menyeluruh.

Apakah koordinasi dari pemerintah setempat dapat diharapkan agar pemberdayaan masyarakat setempat, dari hasil masukan finansial pariwisata setempat itu dapat membantu pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

#### 4. Perubahan Paradigma Pelestarian Kawasan Budaya

Kawasan budaya memang perlu dilestarikan, agar kesinambungan terjaga, tetapi bukan dalam pengertian yang sempit, sehingga dia tertutup dari dinamika perubahan zaman. Seperti kawasan candi Brobudur, jika dibandingkan pada waktu situs itu dibuka (1960) dengan sekarang dapat dilihat berbagai perubahan. Sekarang turis telah dapat menaiki tangga-tangga candi yang megah itu dengan memakai kursi roda, ini salah satu keinginan atau antisipasi pengunjung, terutama wisatawan lansia untuk dapat menikmati kebesaran candi brobudur itu.

Dikawasan lokasi candi telah muncul berbagai "*home-stay*," seperti didesa Nagaran II. Didesa ini, terdapat 32 rumah yang dijadikan penginapan dengan jumlah kamar 129 unit. Warga yang tidak membuka penginapan didorong membuka katering, penyewaan sepeda, dan sepeda motor atau guide lokal. Mereka membangun paguyuban "*home stays*," sehingga permasalahan bersama dapat dirembuk dan didiskusikan untuk mendapatkan penyelesaian. Warga setempat, disekeliling candi Brobudur punya kearifan lokal yang kuat. Dalam menerima tamu, mereka memperhatikan *suguh*, *lungguh* dan

*gupuh* (ada hidangan yang disajikan, kamar untuk tamu, keramahan (hospitality) dan antusiasme dalam penerimaan tamu (seperti menerima saudara sendiri).



*Home Stay*

Sekarang, wisatawan dapat bermalam disitus candi Brobudur, tidak perlu seluruhnya harus mencari hotel pulang kembali ke Yogya atau kota terdekat lainnya. Dengan adanya “*home stay*” disekeliling brobudur ini, wisatawan pagi hari sesudah subuh dapat keluar rumah, kembali dapat menikmati keagungan dan keindahan brobudur yang masih diselimuti embun pagi. Bukankah mereka sedang berada ditengah desa dimana wisatawan ini tinggal (*home stay*), yang sekarang secara integral telah merupakan kawasan situs brobudur. Mereka dapat dengan santai berjalan kaki mengitari situs candi Brobudur itu. Memang, melihat brobudur ditengah embun pagi itu merupakan sebuah kenikmatan tersendiri bagi para wisatawan. Desa-desa yang menyediakan “*home stays*” disekeliling brobudur tadi, kini secara integral telah merupakan kawasan budaya brobudur.

Kendati pemerintah telah berusaha untuk membangun *home stays* senyaman mungkin bersama masyarakat, tetapi dua hal yang sukar dibangun segera yaitu Rumah Sakit dan pertunjukan seni. Kedua fasilitas ini menyebabkan Brobudur sukar menyaingi Angkor Wat (candi terbesar di Kamboja) dimana setiap hari digelar pertunjukan seni tari, drama atau musik lokal. Ini sangat terkait dengan “*length of staying*” (lama tinggal) wisatawan. Karena itu situs budaya Angkor Wat di Kamboja, dapat menyedot 2,6 juta wisatawan

mancanegara setiap tahunnya, sedangkan Brobudur masih tertinggal jauh 308.784 orang (Taman Wisata Candiff WC, 2019).

Memang pemerintah berusaha keras untuk memperbaiki lingkungan Brobudur, terutama *home stays* yang disatukan dalam kompleks Balai Ekonomi Desa (Balkondes) yang mampu menyedot lebih banyak wisata. Tetapi minimnya acara budaya dilingkungan pedesaan Brobudur, membuat rata-rata lama wisatawan tinggal dilingkungan Brobudur sangat minim (1,2 hari). Sejatinya, pemerintah telah menggelontorkan pada tahun 2020 dana sebesar Rp.2,3 triliun untuk pembangunan infra struktur, yaitu pengembangan jalan jalur wisata dari Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) menuju Brobudur melalui bedah Menoreh (Kompas, Senin 11 November 2019). Anggaran ini mencakup pembangunan sumber daya air, permukiman dan perumahan.

Akan tetapi, selama pergelaran seni-budaya tidak dapat dihadirkan di lingkungan Brobudur sukar dapat diharapkan, situs candi Brobudur mampu menyaingi situs wisata Angkor Wat di Kamboja. Infra struktur menuju situs budaya itu penting, tetapi apa yang ada disitus budaya itu bagi wisatawan lebih penting lagi. Situs budaya Brobudur tanpa pagelaran seni budaya terasa gersang dan kurang menarik untuk tinggal berlama-lama.

### **Paradigma Pelestarian Budaya**

Perubahan paradigma pelestarian kawasan budaya yang kemudian berkembang itu, oleh Direktorat Pariwisata (Drajad, 2006) disusun sebagai berikut:

- (1) Pelestarian berdasarkan atas prinsip perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
- (2) Perubahan cara pandang *object oriented* menjadi *site oriented* mengarah pada *Culture Heritage Area*.
- (3) *Government Base* menjadi *Community Base*
- (4) Kawasan Budaya tempat pelestarian nilai yang mengarah pada identitas jati diri bangsa).
- (5) Memberikan hak dan kesempatan bagi masyarakat berperan serta

- (6) Menjembatani “*culture bridge*” konteks masa lalu dengan kini serta memberi harapan kemasa depan.

## 5. Strategi Pengembangan Cagar Budaya

Suatu strategi harus disusun dalam sebuah program yang rapi dan dapat dilaksanakan bertahap. Dengan demikian ada penjadwalan atau susunan urutan agenda yang harus diindahkan, agar tidak tumpang tindih atau terlangkahi. Bukankah satu program dengan proram lainnya harus dilaksanakan menurut sikuen yang terkait dan telah tersusun rapi. Program pengembangan cagar budaya itu harus memiliki minimal tiga misi :

- (1) Pembangunan apapun hendaknya mengarah pada kesejahteraan manusia,
- (2) Pembangunan dimanapun hendaknya berwawasan budaya.
- (3) Menjamin kesinambungan pariwisata (*sustainable development*)

Potensi kawasan cagar budaya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk (a) *Scientific research*, penelitian untuk berbagai ilmu pengetahuan dan sumber inspirasi seniman dan wahana pendidikan, (b) *Recreation of Tourism*, yaitu objek turisme budaya, (c) *Symbolic Representation*: gambaran simbolis kehidupan manusia, (d) *Legimitation of Action*: dapat meligitimasi suatu tujuan, (e) *Solidarity and integration*: dapat mewujudkan solidaritas sosial dan integrasi masyarakat, serta (f) mendatangkan keuntungan bagi masyarakat setempat.

## 6. Nilai Penting Kawasan

Kawasan cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pembangunan, dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan. Hal tersebut perlu ditekankan, demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, agama dan pariwisata. Ungkapan di atas dikutip dari UU RI No. 5 tentang Cagar Budaya.

Dengan jelas bagaimana pemerintah menganggap sangat penting arti dan fungsi sebuah kawasan cagar budaya. Dengan kata lain kalau cagar budaya tidak dilestarikan, maka artinya kita tidak mengindahkan usaha pemupukan kesadaran akan kepentingan dan masa depan bangsa Indoensia, Mengapa Spanyol sangat terkenal dalam dunia Islam dan Internasional?

Bukan karena masyarakat Spanyol mayoritas beragama Islam seperti di Indonesia, tetapi karena cagar budaya Spanyol “Andalusia,” adalah cagar budaya Islam yang terbesar di Eropah dan sangat menarik dunia Islam dan Internasional. Cagar budaya ini dirawat dan dilestarikan pemerintah Spanyol dan ditabalkan sebagai warisan budaya dunia oleh PBB. Kalau kita dengan kapal laut menyeberangi selat Gibrartar dari Maroko ke Spanyol, kita akan mendarat di pantai Spanyol yang sangat curam dikaki gunung Calpe dan cukup berbahaya.



*Penulis dan Istri sedang membawa Prof. Dr. Sartono Kartodirjo setelah menerima Dr. Hc. dari Universitas Berlin ke Yogyakarta (1996)*

Dipantai itu ada kisah historis, bagaimana sebuah pasukan tentera Islam dibawah pimpinan Jabal Tariq (Agustus 710) mendaratkan pasukannya



lebih kurang sebanyak 400 orang, dan sesampai ditepi pantai itu, sang komandan tadi memerintahkan agar semua kapal perahu yang dipergunakan dalam pendaratan itu dibakar habis dihadapan mereka. Jabal Tariq sebagai komandan pasukan pendaratan itu mengatakan, “.....kita telah sampai dipantai Spanyol, jalan kita masih jauh. Tetapi, jangan ada yang berfikir untuk pulang, karena semua kapal perahu telah dibakar, Kita hanya punya satu alternatif, maju dan merebut negeri ini.” Inilah kisah berdirinya kerajaan besar Islam Andalusia yang berdiri selama lima abad di Spanyol (Lewis. 2012).

Sekarang bekas kerajaan Islam Andalusia itu menjadi kawasan cagar alam dan budaya Spanyol yang sangat berharga bagi negara dan bangsa Spanyol. Sebahagian besar devisa negara yang dihasilkan, berasal dari projek pariwisata Andalusia. Memang dari sisi jumlah kunjungan, Prancis menjadi negara yang paling banyak menyedot wisatawan asing dengan jumlah 89 juta orang pada 2018, angkanya naik 3,0 persen dari 2017. Tetapi posisi kedua diduduki oleh Spanyol yang mampu menarik 83 juta kunjungan wisatawan asing (naik 1,0 persen dari tahun 2017). Sedangkan Amerika Serikat menduduki posisi ketiga (80 juta). Jelas bagaimana Spanyol diuntungkan dengan melestarikan situs cagar budaya Andalusia (Republika Senin, 9 September 2019).



*Penulis dan Istri berfoto dengan orang Maroko yang menurut mereka, mereka adalah orang Arab*

Istana kerajaan Islam Andalusia Alhambra di Cordova, merupakan pusat kawasan Budaya Islam Spanyol, yang tertata rapi dan dilestarikan pemerintah Spanyol. Turis manca negara setiap tahunnya datang berlimpah. Banyak segi-segi sosial budaya, agama dan ilmu pengetahuan yang dapat digali dari situs kawasan wisata ini. Dewasa ini ada tim geologi dan “water resources’ yang sedang meneliti aliran air bersih dari pegunungan Siera Morena yang dialirkan ke istana Alhambra. Istana dan gedung-gedung arsitektur Islam abad pertengahan, serta mesjid-mesjid agung yang sebahagian telah dijadikan gereja bertebaran sampai ke Madrid Thu Kota Spanyol. Salah seorang guide-turis kami waktu berkunjung kesana, adalah sejarawan, dia banyak mencertakan, berbagai hal mengenai istana Alhambra itu, sambil menjawab berbagai pertanyaan yang kami ajukan, dia menceritakan kisah kejatuhan kerajaan Islam di Cordova (1511).



*Cordova Spanyol*

Akan tetapi waktu menjawab peristiwa kejatuhan kerajaan Cordova itu, dia menyatakan ada hal-hal yang tidak dapat kami sampaikan kepada wisatawan, kecuali wisatawan itu mendesak. Seperti perang saudara dalam tubuh kerajaan Islam Spanyol. Sungguhpun, seperti diketahui raja-raja Islam

di Andalusia, sebahagian besar adalah keturunan Arab-Spanyol dan perang saudara serta pembunuhan itu terjadi di-istana Alhamra, sampai-sampai kolam dimuka istana itu, setelah perang saudara itu, penuh dengan darah dan mayat. Namun. bahagian- bahagian sejarah itu, disebut mereka sebagai “untold history” (sejarah yang tidak perlu diungkap), kecuali disampaikan dengan permintaan khusus wisatawan.

Waktu kami mengunjungi gereja yang terbesar di kota Madrid kami bertemu dengan pastor Katholik gereja itu. Dia menceritakan banyak mengenai gereja yang sebenarnya menurut beliau dahulu adalah sebuah mesjid. Salah satu cerita lain yang menarik, bahwa nama ibu kota Spanyol Madrid itu katanya, berasal dari kata “magrib” (bahasa Arab yang artinya tempat matahari terbenam), Sekarang kata magrib itu “dipindahkan” ke Maroko Afrika (“magribi”).

## **7. Sustainable Tourism Development (STD)**

Sustainable Tourism Development (Pembangunan Wisata Berkelanjutan), tetap menarik perhatian PBB, sehingga badan PBB untuk itu (*United World Tourism Organization - UNWTO*) yang berpusat di Madrid Spanyol, selalu mengagendakan untuk masuk dalam pembahasan pada setiap pertemuan pariwisata internasional. Demikianlah setelah Menteri Pariwisata Arief Yahya selesai menghadiri pertemuan UNWTO di Spanyol 24 Januari 2019 yang lalu, mengenai *Sustainable Tourism Development (STD)* ini, beliau langsung menjawab dengan mengacu pada rumus utama STD tersebut, yaitu: *Ecology, Community dan Economy*, atau sering juga disebut dengan *3P (Planet, People and Property)*. Keberadaan nilai-nilai utama dalam STD ini harus diterapkan dalam pengembangan Bali dan 5 Destinasi Bali Baru itu.

SDT merupakan konsep pariwisata berkelanjutan, yaitu membangun destinasi dengan memperhitungkan semua aspek, seperti menjaga lingkungan, mempertahankan budaya lokal, dan kelestarian alamnya sehingga terbangun ekosistem yang tetap autentik, berkarakter dan menjadi kekuatan atraksi budaya. “Inilah semakin dilestarikan semakin mensejahterakan!” kata Menpar Arief Yahya (Kompas Rabu, 30 Januari 2019).

Secara praktis dijelaskan oleh Menpar tersebut bagaimana menjalankan SDT tersebut. Misalnya disebuah Desa Wisata, dipikirkan bagaimana menjaga

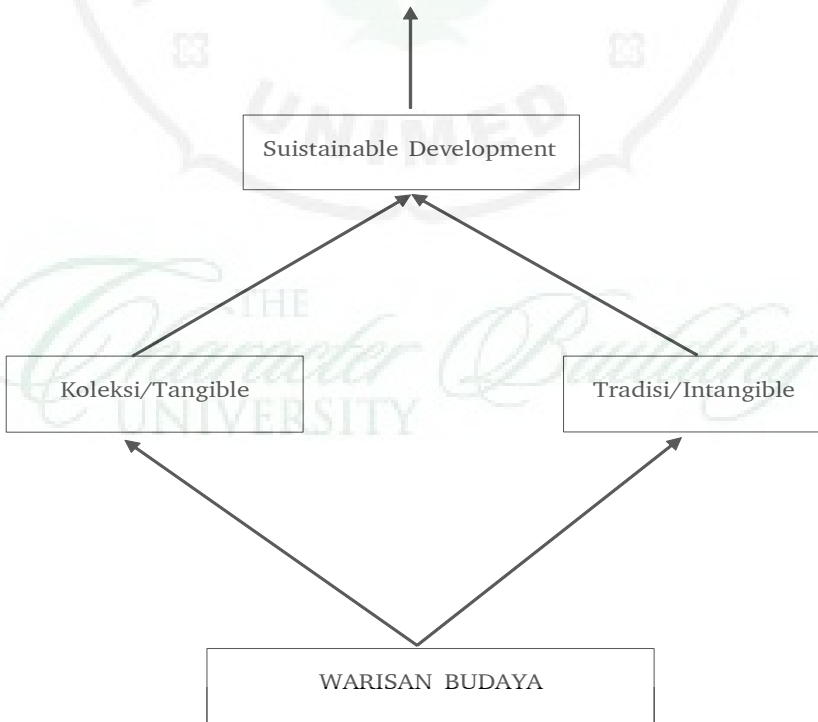
dan merawat hutan, sumber air bersih, manajemen sampah, aktivitas harian warganya, budaya lokal, yang ujungnya menarik sebagai kekuatan atraksi.

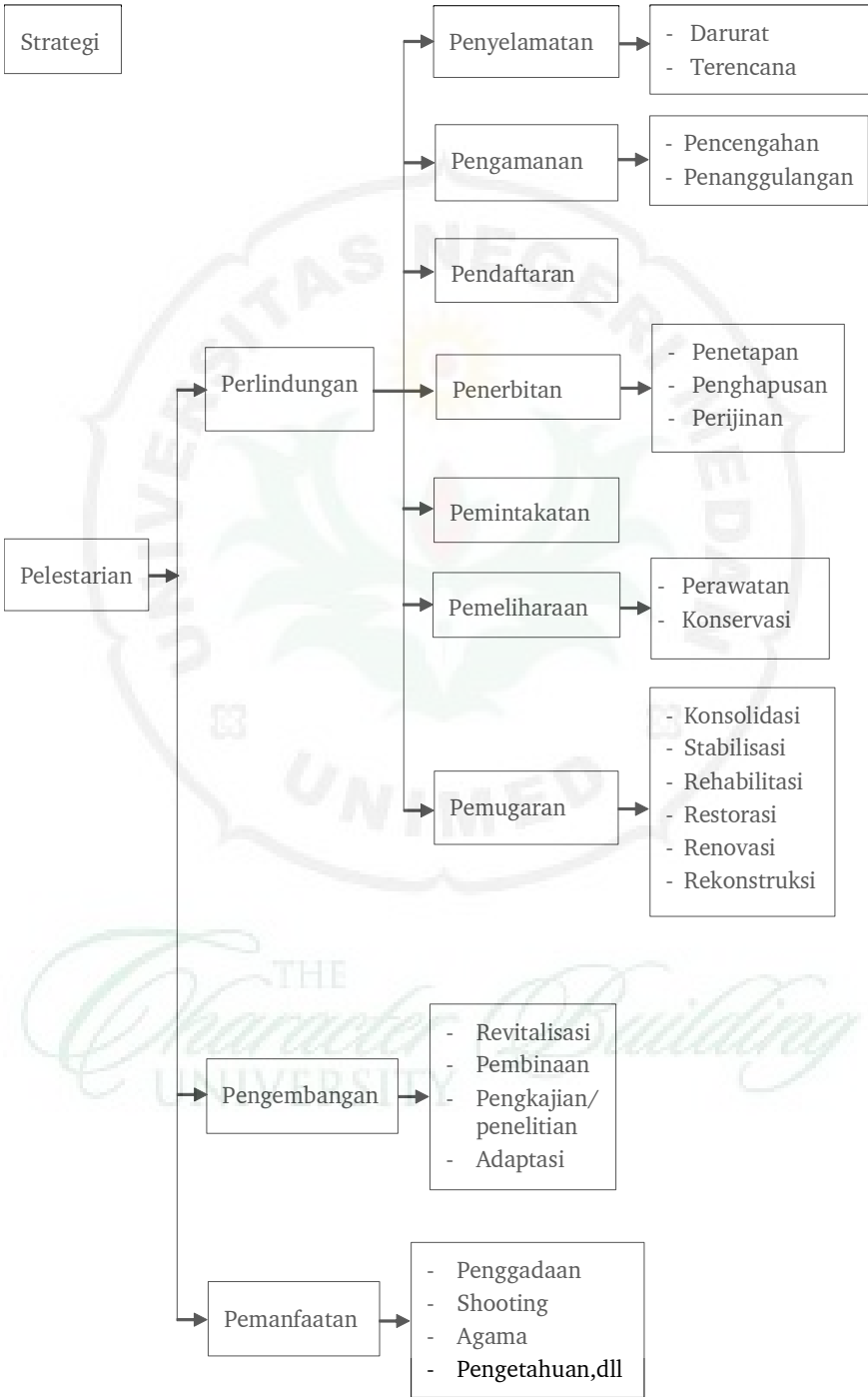
Kerjasama dengan universitas telah dirintis dan dilakukan agreement of understanding, seperti Samosir Danau Toba dengan USU. Kemenpar saat ini sedang mempercepat pemanfaatan teknologi, seperti microsite sustainable sebagai sarana penyebaran informasi bagi wisatawan dan pengelola destinasi pariwisata berkelanjutan.

Di bawah ini dapat dilihat *organogram sustainable development* dari warisan budaya sebagai berikut :

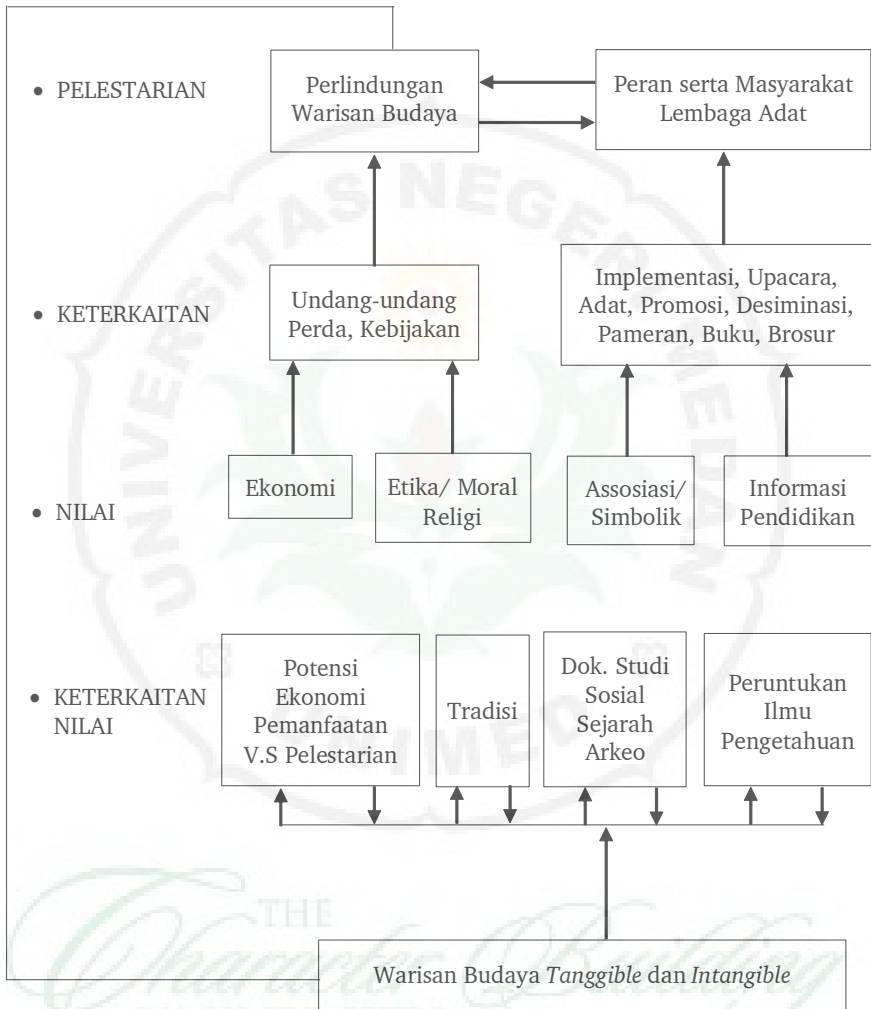
**SUUSTAINABLE DEVELOPMENT**

- 5. Mempertahankan fungsi dan makna
- 4. Meminimalisasi penurunan kualitas
- 3. Merawat, menyimpan, dan menyajikan
- 2. Mengembangkan kualitas masyarakat
- 1. Memberdayakan masyarakat
- 6. SDM-merubah sikap & perilaku
- 7. Memungkinkan bagi masyarakat serta memanfaatkan
- 8. Mengintegrasikan berbagai sumber
- 9. Menciptakan kerjasama dan hubungan "global"





## Pelestarian Budaya dan Pemanfaatan Wisata



## 8. Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Kawasan Cagar Budaya

### a. Pengembangan Pulau Bintan sebagai Cagar Budaya

Pulau Bintan sebagai pulau yang terbesar di kawasan kepulauan Riau, terletak di Selatan Singapura dan disebelah Baratnya adalah pulau Batam.

Jarak antara Singapura dan pulau Bintan dapat ditempuh sekitar dua jam naik *speed boat*. Singapura sendiri adalah destinasi wisata, dikunjungi lebih dari empat juta wisatawan setiap tahunnya. Pada tahun 1986 (zaman Orde Baru) timbul ide dari pihak Singapura untuk menjadikan Bintan Utara sebagai daerah transit (persinggahan) wisatawan Singapura.

Mereka diangkut dengan kapal pesiar dari Singapura (Sentosa, kawasan cagar budaya Singapura) untuk “rehat-tidur” ke daerah Utara Bintan, semalam atau dua malam, untuk kemudian kembali ke Singapura menghabiskan masa wisata atau libur para wisatawan itu. Ide ini disetujui oleh pemerintah Indonesia (Jakarta), sehingga permulaan tahun 1985, pulau Bintan Utara “dipakai sewa” oleh Singapura. Demikianlah selama satu tahun Singapura sibuk membangun beberapa hotel lux bertingkat diutara Bintan itu, menyiapkan lapangan tennis, golf, tempat pemandian dsb. di daerah Bintan menghadap ke utara (Singapura).

Penduduk Bintan Utara, sebahagian besar adalah kelompok etnis Melayu Riau, yang terdiri dari petani, nelayan dan pengrajin kayu, serta pelaku bisnis kecil, seluruh mereka ini tanahnya dibebaskan (dibeli) dengan kekerasan. Semua penduduk diungsikan ke daerah Bintan Selatan. Tanah-tanah pertanian dan kediaman mereka dikampung dan kota-kota kecil diratakan. Agar penduduk Bintan Utara mendapat tempat di Bintan Selatan maka tanah-tanah di Bintan Selatan sebahagian besar juga dibebaskan untuk penampungan penduduk Bintan Utara yang diungsikan ke Selatan.

Sebahagian penduduk seperti nelayan diselipkan ke daerah-daerah yang longgar penduduknya di pantai Selatan. Usaha ini dimungkinkan karena tingkat kepadatan penduduk di pulau itu tidak seberapa. Tetapi banyak keluhan yang diutarakan, karena tidak semua penduduk yang dipindahkan ke Bintan Selatan kebahagian lahan pantai yang cocok atau sesuai dengan profesi mereka sebagai nelayan, begitu juga yang lain.

Satu tim professional dibentuk oleh perusahaan Singapura, semula akan bertugas hanya sebagai team AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), termasuk Prof. Dr. Usman Pelly, MA; Prof. Dr. Ir. Sukaria Sinulingga dan Prof. Dr. Asmah Affan, MPA; dan tiga orang lagi dari Jakarta. Tim enam ini kemudian berunding dan bertemu seminggu sekali dengan manager perusahaan Singapura di Bintan Utara itu. Kami pada minggu-minggu

pertama menjelajahi keseluruhan pulau Bintan, dan mewawancarai penduduk setempat. Pada pertemuan ketiga, kami mulai mempertanyakan apakah Bintan Utara ini akan dijadikan hanya sebagai tempat singgah (tempat tidur) saja, atau dapat diperluas dan dijadikan destinasi wisata.

Sekiranya hanya untuk tempat singgah tidur dan rehat saja, bagi wisatawan ini akan menjadi terlalu mahal, dan mungkin mereka tidak akan kembali lagi nantinya. Tetapi, kalau akan dijadikan destinasi wisata, maka wisatawan itu harus dapat melakukan “*incounter*” (perjumpaan) dengan masyarakat setempat, tidak hanya sesama turis. Artinya turis yang datang dari Singapura dan menginap di Bintan Utara, harus dapat secara bebas bertemu dengan masyarakat Bintan secara keseluruhan terutama didaerah Selatan.

Baru kemudian pada minggu keempat kami mendapat persetujuan dan ketegasan bahwa Bintan akan dijadikan destinasi wisata. Kami terpaksa kerja keras membuat dan menyelesaikan program Amdal secepatnya dan kemudian merampungkan program Bintan Selatan sebagai destinasi wisata. “*Crashed Program*” tersebut dalam seminggu selesai dan kami serahkan dan setelah disetujui, kami berusaha untuk dapat diimplementasikan.

## **b. Menjadikan Bintan Utara sebagai Destinasi Wisata**

Pertama, kehidupan masyarakat Bintan Selatan harus diberdayakan, karena mereka akan menjadi “*host*” (tuan rumah) destinasi wisata Bintan. Sebuah keluarga Melayu secara tradisional harus memiliki rumah, sawah atau ladang, tebat (kolam) untuk pemeliharaan ikan. Kebutuhan pokok ini harus diusahakan mereka miliki. Disamping itu harus dicarikan kegiatan proyek “kerajinan” dengan bahan baku dari Bintan. Penduduk Bintan harus diajar oleh tenaga-tenaga ahli yang didatangkan dari Jepara (sekitar 21 orang), untuk mengajarkan bentuk-bentuk kerajinan, seperti pembuatan sampan atau kapal, rumah-rumah panggung Melayu atau keranjang dan bahan-bahan dari laut (kerang atau berbagai hasil laut). Diperhitungkan dalam jangka satu tahun proyek kerajinan ini dapat dirampungkan. Semua bahan baku kerajinan itu harus yang tersedia di Bintan. Hasil kerajinan ini dapat ditawarkan kepada wisatawan sebagai oleh-oleh (buah tangan).





### *Re-Settlement Bintan*

Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota Kabupaten di perbaharui sebagai kota transit wisata. Toko-toko souvenir dibangun dan disiapkan, begitu juga kegiatan kegiatan yang bertalian dengan kuliner (makanan dan kue-kue panganan) Melayu. Beberapa pusat kuliner dipersiapkan untuk dikembangkan. Sanggar tari dan nyanyian (seni suara) diserahkan kepada pejabat kabupaten untuk dibentuk dan dibudayakan. Tenunan Melayu dijadikan untuk pakaian. Semuanya dikemas sehingga menarik wisatawan, sampai kepada penyediaan buah-buahan.

Ada situs yang menarik yang dapat dijadikan objek yang cukup unik dan spektakular, dipantai Timur pulau Bintan yang disebut “pantai Ampera,” berdiam suku laut Bajoe. Mereka berdiam diratusan sampan-sampan yang terhampar ditepi laut. Kelompok Bajoe ini banyak ditemui di beberapa daerah pantai lain seperti di Teluk Bone (Sulawesi) dan di Phuket (Thailand).

Semua penguasa ingin mengusir mereka (dipindahkan), kami mengusulkan dan kemudian disetujui agar dilakukan negosiasi dan persahabatan dengan mereka. Mereka dapat menjual hasil laut seperti kerang dan berbagai kerajinan laut lainnya. Mereka mampu menyelam selama dua jam di kedalaman laut. Ditepi pantai itu didirikan tenda-tenda tempat pertemuan wisatawan dan orang Bajoe tadi, banyak orang Bajoe memasarkan kerang-kerang laut dan berbagai ragam benda laut. Demikianlah kerja kami sebagai team Amdal

dan penyiapan destinasi wisata berakhir pada bulan kedelapan dan kami tinggalkan Bintang Utara itu sudah mulai berjalan dengan baik.

### c. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Wisata

Direktorat Jendral Pariwisata merumuskan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pengembangan Kawasan Cagar Budaya sebagai berikut :

1. Membuka peluang/kesempatan kerja yang berdampak pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat setempat
2. Meningkatkan status sosial masyarakat
3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pelestarian nilai luhur warisan budaya
4. Pengembangan dengan memanfaatkan potensi budaya dan masyarakat setempat
5. Implikasi diatas saling terkait dan menimbulkan *multiplayer* efek pada Kesejahteraan masyarakat.

### d. Strategi Perlindungan Kawasan Cagar Budaya

Penetapan Batas Situs :

1. Untuk kepentingan perlindungan kawasan cagar budaya perlu ditetapkan batas-batas situs dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan
2. Batas-batas kawasan ditetapkan berdasarkan atas batas asli kalau masih ada, atau bila tidak ada lagi ditinjau dari geografis setempat seperti lereng, sungai, lembah dan sebagainya, atau kelayakan pandang untuk mengapresiasi bentuk atau nilai benda cagar budaya
3. Batas situs ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengamanan ataupun pengembangan pemanfaatan batas cagar budaya sebagai wisata budaya (Drajad 2006).

### e. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Cagar Budaya

1. Membuka peluang/kesempatan kerja yang berdampak pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat setempat.
2. Meningkatkan status sosial masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pelestarian nilai luhur warisan budaya.
4. Pengembangan dengan memanfaatkan potensi budaya dan masyarakat setempat.
5. Implikasi diatas saling terikat dan menimbulkan *multiflier effect* kepada Kesejahteraan masyarakat.

### f. Strategi Revitalisasi Kawasan

Dalam naskah Lontara I Lagaligo yang ditulis abad 14, dinyatakan bahwa Pinisi untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Sawerigading Putra Mahkota Kerajaan Luwu (Bugis-Makassar) untuk berlayar ke Tiongkok, guna meminang putri raja disana, bernama We Cun Dai. Setelah menikah dan memiliki anak, dia kembali pulang, tetapi diselat Selayar, perahu itu pecah tiga diterjang ombak. Orang dari desa Ara yang terletak di utara pulau Selayar itu, mengumpulkan pecahan-pecahan kapal Pinisi itu dan merangkaikannya kembali. Dari sanalah menurut hikayat I Lagaligo kemahiran orang Ara membuat perahu Bugis.

Banyak istilah yang mirip Pinisi dipergunakan, seperti Venesia (kota wisata akhir abad 14), orang mengira banyak hubungannya dengan perahu Bugis Pinisi. Namun ahli perkapalan Piter Kamp (1976) menyatakan, kapal-kapal layar dilaut Mediteranian abad ke 14-15 itu masih bertiang satu, seperti *Venecian Corrack* atau *Venecian Cok*, sementara Pinisi Bugis jauh sebelumnya telah bertiang dua, seperti perahu yang diukir dalam parasasti Borobudur.

Pembuktian yang mutakhir dari keunggulan Pinisi ialah keberhasilan kapal layar ini mengharungi lautan Pasifik dari Jakarta ke Vancouver (Canada)

yang berjarak 11.000 miles-laut untuk menghadiri “Pameran International Expo 86.” Dalam jangka 69 hari, tepat hari Jumat pukul 12.00 waktu setempat Pinisi Nusantara telah memasuki Victoria Bay, pintu gerbang pelabuhan Victoria. Sebelum kapal Pinisi ini memasuki pintu gerbang ini, sebuah kapal induk AS telah menyambut Pinisi ini. Sebagai penghormatan, mereka menaikan aneka ragam bendera-bendera dengan 21 kali dentuman meriam. Selama seminggu, sebelum kembali ke Indonesia, Pinisi Nusantara ini bersandar dipelabuhan Vancouver, menerima ribuan pengunjung peserta pameran Intemasional Vancouver Expo 86. Banyak pengunjung yang merasa heran dan takjub, bagaimana perahu layar sekecil Pinisi itu dapat mengharungi lautan pasifik. Ide untuk mengharungi lautan pasifik ini syah dan berasal dari temuan bangkai kapal layar didasar laut Mexico (1962). Kapal layar itu ternyata terbuat dari kayu jati (*tectonia grandis*) dari Indonesia.

Pinisi merupakan tulang punggung perhubungan laut di Indonesia Timur sebelum abad ke dua puluh, hubungan ini melintasi khalutulistiwa ke arah Barat sampai ke Madagaskar. Sebahagian besar penduduk Madagaskar (Malawi) adalah orang-orang keturunan Bugis-Makassar. Begitu juga di Afrika Selatan, Sjech Sulaiman, adalah salah seorang pemuka masyarakat Melayu Makassar. Beliau mengembangkan permukiman masyarakat Melayu disana dan membantu gerakan anti aparteit Afrika Selatan.



*Perahu Pinisi*

Usaha-usaha ini mendapat pujian dan apresiasi dari Mandela, yang kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan. Menurut sejarawan Belanda Hereen Kerajaan Goa Tallo, menguasai Australia Utara (daerah tripang), Daerah ini kemudian dipinjamkan kepada Australia sebagai tempat pembuangan kriminal (abad ke 15). Pada tahun 1975 Sultan Goa Tallo secara resmi menggugat kembali (via Kedutaan Besar Australia Jakarta), agar daerah itu dikembalikan ke kerajaan Bugis Makassar. Pada acara ulang tahun Sultan Goa Tallo itu, kebetulan penulis dan Dr. Umar Kayam hadir (kami mewakili Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial Ujung Pandang), 1975.

Pemerintahan Jepang menawarkan agar Pinisi di “sulap” menjadi kapal-kapal kargo yang terbuat dari besi, sehingga dapat menjelajahi nusantara. Pemerintah Indonesia menolak tawaran itu. Pada tahun 1975, kapal-kapal layar Pinisi mulai dimotorisasi sehingga kalau ditengah laut tidak ada angin, maka mesin motor dapat menggerakkan kapal layar tersebut, dan kalau gelombang laut tinggi dan kebetulan angin tidak ada, maka dengan memakai mesin motor dapat pula menyelamatkannya dari hempasan ke batu karang. Pusat bongkar muat kapal-kapal Pinisi dewasa ini berpusat dipelabuhan khusus Sunda Kelapa, Tanjung Priok Jakarta. Disana dapat dilihat kesibukan kapal-kapal Pinisi yang jumlahnya sampai ratusan, dalam berbagai tonase.

### **g. Kapal Pesiar Pinisi**

Sekarang Pinisi mulai dilirik oleh wisatawan. terutama dari Australia dan Eropah, mereka memesan Pinisi yang berukuran 500-1.000 ton yang diperlenkapi dengan mesin motor. Kapal-kapal Pinisi turis ini, telah disesuaikan pembangunan bahagian dalamnya (dari buritan ke haluan) dengan kamar-kamar dan bahagian-bahagian untuk tempat bersantai seperti kapal turis biasa. Kapal-kapal ini sedang ramai menelusuri pantai Indonesia Timur dan Australia Utara, disekitar Great Barries Reef. Pembuatan kapal-kapal pesiar ini tidak hanya berpusat di Sulawesi Selatan (Tanah Bern), tetapi telah tersebar di beberap lokasi, dimana perkayuan masih memungkinkan dijadikan bahan pembuatan kapal ini.

Kami sendiri melakukan penelitian pembuatan kapal Pinisi (1975-1976) dibawah bimbingan Prof Umar Kayam dan Prof Clark Cunningham. Selama setahun itu dibawah proyek PLPIS (Pusat Latihan Penelitian Ilmu-

ilmu Sosial) Jakarta, melakukan penelitian “Pewarisan membuat perahu Pinisi” di Sulawesi Selatan. Kapal-kapal layar Pinisi ini dibuat oleh punggawa-punggawa yang berasal dari satu desa, yaitu Ara (diutara desa Bira) kabupaten Bulukumba. Pertukangan perahu Bugis ini pusatnya masih berada di desa Tanah Beru.



*Kapal Pesiar Pinisi*

Orang-orang Ara sampai sekarang masih terkenal sebagai punggawa-punggawa ahli perahu. Keahlian mereka membuat perahu layar Pinisi masih diturunkan kepada anak dan cucu (laki-laki) sampai sekarang, tetapi orang Ara bukan pelaut, mereka hanya ahli membuat perahu. Sedang yang melayarkan perahu-perahu Pinisi ini adalah pelaut-pelaut Bugis Makassar, begitu juga yang empunya atau pemilik Pinisi (*sombalu*) banyak yang berprofesi sebagai pedagang. Sehingga di kalangan orang Bugis Makassar ada tiga pihak (profesi) yang menangani Perahu Pinisi: Pembuat Perahu-Pengendali Perahu-yang empunya (*sombalu*/pedagang) (lihat Pelly, Pinisi Nusantara, 1998)

Untuk merumuskan hal-hal seperti diatas, bersama m1 kami turunkan sebagai berikut :

1. Revitalisasi kawasan cagar budaya merupakan upaya menghidupkan Kembali kawasan yang pada masa silam pernah hidup “dead Monument” dengan fungsi baru bermuatan kearifan-arifan nilai Keaslian

2. Mengendalikan dan mengembangkan kawasan berdesakan atas potensi Yang dimiliki oleh suatu kawasan, sehingga revitalisasi didasarkan atas “Layak dan tepat, harus dan perlu/dibutuhkan”
3. Memberikan peningkatan kualitas lingkungan yang pada akhirnya Berdampak pada kualitas hidup dari penghuninya, (Drajat, 1995).

## 9. Penentuan Batas Kawasan Cagar Budaya

Langkawi adalah sebuah pulau di Malaysia Utara yang berbatasan dengan Thailand. Ibu kota pulau ini bersama Kuah. Dari kota kecil ini kita bisa menyewa mobil, mengelilingi pulau ini seharian, singgah di beberapa situs budaya yang terpencar-pencar. Di utara pulau ini merupakan hutan hunian, maksudnya di dalamnya ada permukiman yang unik. Kita dapat menyewa hotel (tempat penginapan) ditengah hutan atau di atas pohon kayu besar.

Rumah yang merupakan hotel ini berjarak sekitar 15-20 meter satu dengan lainnya. Wisatawan dapat tinggal disana semalam atau dua malam dalam suasana hutan yang sesungguhnya. Kicauan burung dan margasatwa hutan, merupakan orkestra hutan yang selalu menggema, terutama di dalam hati. Kecuali binatang buas, memang tidak kita jumpai disitus ini. Jalan aspal tertata rapi menghubungkan satu hotel dengan lainnya.

Ditengah pulau itu terdapat perumahan penduduk, pebukitan dan padang savana yang luas. Di daerah ini terdapat pusat kuliner tempat wisatawan berkumpul, berbelanja dan membeli berbagai makanan. Orang-orang Melayu, membuat dan mejajakan makanan siap saji. Ada onde-onde (buah melaka), karas-karas sampai pada rujak, buah-buahan dan pecal serta nasi bungkus. Ada bangku-bangku bersandar tempat duduk yang bertebar mengelilingi lapangan tempat orang main layang-layang. Para wisatawan datang kedaerah ini, seakan menghadiri sebuah bazar, Mereka membeli penganan, kue-kue tradisional Melayu, dan berusaha untuk berfoto dalam rombongan-rombongan wisata.

Yang menarik sekali ialah wisatawan yang bermain layang-layang. Mereka nampaknya menjadi sangat asyik. Apalagi waktu musim angin kencang. Layang- layang mereka satu dengan yang lain saling bersenggolan.

Oleh karena itu mereka bisa tiba-tiba berteriak seperti orang histeris sendiri, karena layang-layangnya dipotong layang-layang orang lain dan putus. Tetapi layang-layang yang ekomya panjang, kebanyakan tidak dilayangkan ke udara tinggi-tinggi seperti layang-layang biasa. Keributan para pemain layang-layang ini karena anak-anak mereka menurut sertakan bapak dan ibunya. Mereka berlari kian kemari dengan asyik bersama layang-layang mereka. Memang kelihatan ada beberapa orang lapangan pulau itu yang bertugas untuk mengatur dan membantu wisatawan yang sedang asyik dilapangan, agar tidak terjadi tabrakan dan kecakauan. Tetapi keasyikan wisatawan main layang-layang ini dapat menghabiskan waktu mereka sampai larut sesudah magrib.

Tidak jauh dari pebukitan layang-layang itu ada daerah yang sejuk, dekat tebing pebukitan disana ada tempat duduk untuk bersantai, Para wisatawan diberikan beberapa naskah-kertas untuk membaca sebuah cerita-hikayat. Hikayat itu menceritakan kisah yang sedih dan mengharukan. Konon di pulau itu dahulu hidup seorang raja, yang sedang berseteru dengan raja Thailand. Raja Melayu ini sedang menghadapi perang dengan pasukan Thailand. Pasukan raja Melayu ini dipimpin oleh seorang panglima tentera yang gagah berani, dia mempunyai seorang istri yang cantik. Celaknya, sang raja jatuh hati pada sang istri panglima perang ini. Dan ketika diberitakan bahwa sang panglima tewas dimedan pertempuran, sang raja cepat-cepat meminang sang janda yang celitanya itu. Tetapi apa yang terjadi sang janda menolak, sang raja murka dan mengukum sang janda dengan hukuman gantung di tepi tebing tempat wiasawan duduk santai menghadap tebing itu.

Tetapi ada kisah nyata yang kami dapatkan ceritanya dari *guide* turis kami, bahwa Mahatir Muhammad (yang jadi Perdana Menteri Malaysia ketika itu) dan istrinya setelah menyelesaikan kuliah di kedokteran di UKM Kuala Lumpur ditempatkan dipulau itu bekerja. Keduanya saling jatuh hati dan menikah. Karena itu menurut *guide* kami tadi, sewaktu Mahatir jadi Perdana Menteri Malaysia pulau itu jadi perhatian beliau, terutama pembangunan keparawisataannya, terutama pelabuhan laut untuk wisata pantai dan pelabuhan udara intemasional yang dapat didarati pesawat-pesawat berbadan besar.



Kota Kuah memang ramai pagi hari, karena pajak atau pekan digelar setiap harinya, dimana orang Melayu datang menjual segala keperluan rumah tangga sehari-hari. Ada pajak yang menjual ikan basah, beras, sayur mayur, gula dan sayur mayur serta berbagai keperluan rumah lainnya. Yang menarik disini ialah penduduk di sekitar kota Kuah yang berada di pasar-pasar keramaian ternyata banyak yang berasal dari Aceh. Mereka satu sama lain berbahasa Aceh. Sehingga saya yang kebetulan dapat berbahasa Aceh dengan mudah melakukan tawar-menawar dalam bahasa itu dan rasanya saya seperti berada di Sabang atau di Banda Aceh.

Ada beberapa pulau kecil-kecil disebelah Barat Kuah yang sering dikunjungi wisatawan, namun penulis sendiri belum pernah kesana. Menurut data pulau ini, merupakan destinasi wisata Malaysia yang terbesar dan dikunjungi oleh wisatawan mancanegara setiap tahunnya tercatat 3-4 juta wisatawan mengunjungi pulau ini. Namun pulau ini memiliki destinasi wisata yang tersebar seperti yang diungkapkan diatas tidak jelas batas-batas kawasan cagar budayanya. Atau pulau Langkawi dapat dianggap sebuah cagar budaya.

#### a. Kawasan Budaya yang Berserak

Dalam menghadapi kawasan budaya yang berserak dalam satu lokasi atau pulau seperti di Langkawi, strategi untuk penentuan batas-batas cagar budaya perlu diperhatikan pedoman seperti dibawah ini :

- (1) Batas asli dari benda cagar budaya yang berupa himpunan atau berdiri sendiri bila masih ditemukan dan tampak dipermukaan bumi
- (2) Bila tidak ditemukan, ditinjau dari keadaan geografis setempat seperti Lereng, lembah, sungai dan lain sebagainya
- (3) Kelayakan pandang dalam mengapresiasi benda cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
- (4) Disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan dan pengembangan pemanfaatannya sebagai objek wisata budaya dengan sistem pemintakan (*zoning*), (Drajat, 1995).

## 10. Pengembangan Kawasan Cagar Budaya

Danau Toba berasal dari Kaldera gunung Toba yang meletus dan menggoncangkan dunia. Letusan gunung Toba ini terjadi 74 ribu tahun yang silam, lebih seperempat penduduk dunia ketika itu menjadi korban. Sekarang kita hanya dapat menatap keindahan Danau Toba yang mempesona. PBB yang menaruh perhatian telah menabalkan Danau Toba sebagai salah satu “Kaldera *Heritage* Dunia” yang terbesar, dan akan diikuti sertakan dalam berbagai event wisata dan kegiatan budaya internasional.

Sementara itu pemerintah Indonesia telah menetapkan Danau Toba sebagai salah satu dari lima “Bali Baru” dan berusaha untuk segera mempercepat pengembangan kawasan itu sebagai cagar budaya dan destinasi wisata internasional. Masalah krusial yang sedang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam usaha menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata dan cagar budaya. Terutama wilayah geografis danau Toba dan kawasan sekitarnya terlalu luas, sehingga menyulitkan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pariwisata.

Keseluruhan wilayah Danau itu terdiri dari 5 kabupaten, dan dihuni oleh 4 kelompok etnis, Toba, Simalungun, Dairi/Pak-Pak Barat dan Karo. Toba sendiri terdiri dari dua kabupaten: Samosir (pulau yang berada ditengah Danau Toba, dan Humbang Hasudutan (wilayah pantai selatan). Pengembangan budaya keempat kelompok etnis ini juga banyak memeras perhatian, terutama dalam pergelaran berbagai *event* budaya untuk wisatawan. Pantai-pantai Danau Toba yang menyediakan wisata air, masih perlu perhatian pemerintah. Banyak kecelakaan yang terjadi pada wisata air. Kedua, masalah perhubungan, sekarang masih dalam konstruksi, terutama perhubungan darat.

Rencana akan dibangun jalan bebas hambatan (*by-pass*) dari Medan ke Prapat, sehingga dari 5 jam perjalanan bus menjadi dua-setengah jam. Sementara perhubungan udara dengan dibukanya hubungan langsung bandara Silangit dengan Kuala Lumpur dan Singapura, maka hubungan via udara sudah teratasi. Ketiga, peroblem menjamunya budi daya ikan keramba, yang sekarang telah berjumlah 11,416 petak, menyebabkan pencemaran berat air danau, baik untuk mandi atau air minum dan kegunaan lainnya. Keempat, masalah ekologi terutama kelestarian hutan. Kebakaran hutan, sesuatu yang sangat ironis, masih sering terjadi dikawasan Danau Toba.

Kelima, penolakan masyarakat untuk menjual tanah mereka. Sikap ini memang dalam berbagai pertimbangan dapat di mengerti, terutama melihat dampak kapitalisasi yang terjadi dikawasan pariwisata lainnya seperti di Bali (tersisihnya orang Bali dari negerinya sendiri karena invansi kapitalisme asing). Namun sikap ekstrim yang tidak bersahabat ini juga dapat mengambat pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Keenam, belum tumbuh kembangnya budaya wisata dikalangan masyarakat Danau Toba sebagai “host” (tuan rumah), keterampilan budaya ini masih harus ditingkatkan.

Setidaknya keenam masalah diatas ini sangat terkait dengan “*Sustainable Tourism Development*” (Pembangunan Turisme yang berkelanjutan) dan Daya Saing Pariwisata Indonesia didunia Intemasional. Pemerintah sekarang berusaha menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut, bersama masyarakat setempat. Proses penyelesaiannya, tampaknya masih berjalan sangat alot dan tersendat-sendat. Belakangan ini, pemerintah pusat menetapkan untuk mengembangkan beberapa Wisata Desa dibelahan Selatan Danau Toba, yaitu di daeah Toba (Samosir) dan Hasundutan.

Danau Toba merupakan salah satu destinasi pariwisata yang penting, bagaimana mengembangkan kapasitas semua pemangku kepentingan baik yang terkait dengan distinasi wisata dan cagar budayanya, khususnya budaya dari beberapa kelompok etnis yang mendiami satu kawasan (Danau Toba), agar sinkron dan komprehensif sehingga dapat memikat wisatawan. Justru itu kelompok etnis seperti Batak Toba, Dairi/Pak-pak Barat, Karo dan Simalungun, yang hidup mengelilingi Danau Toba, harus bersandar bahu membahu dan bersatu, untuk mufakat mengembangkan wisata intemasional Danau Toba.

Mereka secara prioritas harus mempedomani dan menekuni pemecahan masalah kasus-kasus yang masih terjadi di sekitar Danau Toba dengan strategi seperti yang yang dikeluarkan oleh Direktorat Sejarah dan Pubakala Depatemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :

- (1) Membuka peluang/kesempatan kerja yang berdampak pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat setempat
- (2) Meningkatkan status sosial masyarakat
- (3) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pelestarian nilai luhur kawasan cagar budaya

- (4) Pengembangan dengan memanfaatkan potensi budaya dan masyarakat setempat
- (5) Implikasi di atas saling terkait dan menimbulkan dampak yang lebih kompleks seperti perubahan tingkah laku masyarakat dari tertutup menjadi terbuka.

Demikian strategi, program dan permasalahan peranan budaya dalam pengembangan destinasi pariwisata. Bahwa pembangunan kepariwisataan perlu mengedepankan kebudayaan dengan berbagai warisan budaya secara integratif, agar pelestarian dan pengembangan budaya nasional secara komprehensif dapat segera dilanjutkan.





## OTONOMI DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pendekatan *advocacy* dibidang pariwisata telah mendorong pertumbuhan dan pengelolaan berbagai sumber potensi daerah termasuk potensi sosial budaya, sehingga memunculkan egosisme sektoral pada tingkat kabupaten/kota dalam mengelola pariwisata, tanpa memperdulikan kabupaten/kota yang lain. Dengan mengandalkan Otonomi daerah (UU Nomor 22 tahun 1999), mereka merumuskan dan menetapkan berbagai Perda (Peraturan Daerah) sendiri untuk mendorong partisipasi masyarakat. Pariwisata yang mengutamakan “*growth oriented development*” yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ini, dalam banyak hal dapat menimbulkan kecemburuan kabupaten/kota lain. Dalam kaitan seperti ini pihak pemerintahan provinsi dapat melakukan usaha netralisasi agar pertumbuhan pariwisata disuatu daerah (kabupaten/kota) tidak mengusik suasana harmonis antar kabupaten dan kota tetangganya.

Mengali dan mengembangkan Sumber Daya Alam dan bidang sosial budaya harus dicermati agar tidak terkesan “menjual murah” potensi asli masyarakat yang bersangkutan, terutama dibidang sosial budaya. Masalah ini telah menjadi pemikiran yang krusial dibeberapa destinasi wisata, seperti di Hawaii atau di Haiti, karena akhirnya terjadi pencemaran keaslian budaya masyarakat di destinasi wisata yang bersangkutan. Kasus ini juga menjadi perhatian pemerintah RI, terutama dalam kasus destinasi wisata Bali. Peringatan ini, patut digarisbawahi agar pariwisata tidak berarti menjual budaya masyarakat setempat, demi majunya pariwisata atau tercapainya

target ekonomi. Seperti temuan beberapa antropolog di Danau Maninjau, para wisatawan mandi di danau itu dengan berpakaian bikini. Kalau hal ini dibiarkan, maka contoh ini akan menjadi perbincangan masyarakat, dan menimbulkan konflik. Para remaja dan kelompok melenial mungkin diam-diam akan mencontohnya. Kebiasaan mandi dengan memakai bikini ini mungkin akhinya akan menjadi kebiasaan massif, akibatnya norma dan ketentuan agama akan terlanggar dan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu sebelum meluas, masyarakat setempat dan pemerintah harus tetap waspada terhadap setiap pelanggaran norma-norma yang terjadi.

Seperti dinyatakan oleh antropolog Spillane (1994:28), pendekatan *advocacy* memiliki tujuan utama untuk menggali dan mengembangkan sumber daya alam dan sosial budaya sebagai objek atau daya tarik wisata yang sering kali mengabaikan hak-hak budaya tuan rumah (*host*). Memang hampir semua negara mengakui bahwa pariwisata dengan pendekatan *advocacy* ini mempunyai potensi yang cukup besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan pariwisata dapat dimamfaatkan berbagai kegiatan ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja baru, memperoleh devisa asing dan berbagai aspek ekonomi lainnya.

Pembangunan industri pariwisata untuk memperoleh devisa justru dapat menjadi bumerang bagi perekonomian rakyat kecil (petani). Pembangunan fasilitas pariwisata dengan skala besar, seperti pembangunan hotel-hotel berbintang, jalan tol, lapangan udara dan laut dan berbagai fasilitas lainnya, lambat atau cepat, akan mempersempit lahan pertanian dan meminggirkan kebutuhan rakyat. Semua lahan dan *resources* itu akan berpindah tangan ke pemilik modal.

Apalagi kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat setempat tidak dapat mengejar kebutuhan perkembangan industri pariwisata, sehingga SDM setempat hanya dapat melihat perkembangan pariwisata dari luar pagar. Mereka yang terpelajar dapat bekerja di hotel, guide turis, restoran seniman/budayawan atau dalam aktivitas industri pariwisata lainnya. Akan tetapi mereka yang tingkat pendidikannya rendah dapat dipastikan akan tersisih. Motivasi ekonomi yang berlebihan dalam pengembangan pariwisata dapat meninggalkan sektor-sektor selain yang berabau ekonomi, terutama masalah

yang terkait dengan sosial budaya. Artinya mamfaat ekonomi harus ditempuh dengan menggadaikan sektor lainnya.

Seperti Bali yang merupakan sebuah ekosistem pulau kecil, yang serba terbatas dan sangat peka dengan perubahan lingkungan. Apabila kewenangan otonomi terlalu ditekan pada eksploitasi ekonomi secara parsial akan menimbulkan masalah ekologi dan lingkungan di pulau Bali. Apalagi masyarakat Bali tidak berorientasi ke laut, mereka bukan pelaut atau nelayan, sehingga tumpuan kehidupan mereka sangat tergantung pada pertanian (lihat Gde Pujaastawa 2017).

## 1. Partisipasi Masyarakat

Pembangunan industri pariwisata harus dimulai dari bawah, pembangunan ini harus merupakan “*social learning*,” tidak mungkin “*top down*.” Banyak alasan mengapa harus demikian, apalagi pembangunan pariwisata akan melibatkan aspek budaya masyarakat dan tidak hanya sekedar menjual panorama alam. Apabila tidak hati-hati kasus pulau Haiti (Atlantik) dan Hawaii (Pasifik), akan berulang kembali. Seperti ketidakhati-hatian masyarakat di Hawaii, budaya mereka dihancurkan oleh kaum Hipiis, sehingga sampai sekarang masyarakat Hawaii harus memulai pengembangan dan perbaikan budaya mereka dari awal. Pengelolaan pembangunan di resort pariwisata itu, harus dilakukan oleh masyarakat yang hidup di lokasi pariwisata itu sendiri. Karena kehidupan budaya mereka langsung dipengaruhi oleh pembangunan pariwisata itu. Dengan kata lain, manajemen kehidupan masyarakat yang bersangkutan yang harus menentukan apakah sebuah unsur (*traits*) perubahan budaya tertentu dapat diterima atau tidak.

Inilah yang dikemukakan oleh Korten (1996) sebagai “*community based resource management*” atau “*community management*.” Seperti apa yang sekarang dihadapi oleh masyarakat Bali. Mereka dihadapkan kepada satu pilihan untuk merubah tarian sakral yang biasanya mereka tarikan untuk menyenangkan hati para dewa. Sekarang, tarian itu harus mereka persembahkan waktu kedatangan tamu (wisatawan) yang berkunjung ke Bali. Apakah tarian sakral itu dapat digunakan atau ada alternatif lain. Mereka harus menciptakan tarian baru yang spesial untuk menerima tamu atau wisatawan.

Orang lain seharusnya tidak boleh campur tangan, biarlah masyarakat Bali sendiri yang memutuskannya.

Ada tiga alasan penting yang menurut Korten (1986), mengapa “*community managment*” ini penting sebagai perpegangan masyarakat di destinasi wisata:

Pertama, adanya “*local variaty*” (varietas lokal), atau lokasi yang spesial atau spesifik yang berbeda dengan yang lain. Dan perbedaan ini tidak dapat tidak dihiraukan (tidak diindahkan). Perbedaan ini menuntut perbedaan sistem pengelolaan tersendiri, dan masyarakat lokallah yang lebih paham bagaimana pengelolanya.

Kedua, adanya “*local resources*” (sumber daya lokal) yang telah dikelola masyarakat setempat dari generasi ke generasi dan diwariskan secara turun menurun. Pengambil alihan “*resources*” ini kemungkinan besar akan menimbulkan ketersinggungan masyarakat, dan dapat mengakibatkan rasa anti pati masyarakat setempat.

Ketiga, “*local accountability*” (tanggung jawab lokal) yang berarti bahwa pengelolaan yang dilakukan masyarakat setempat biasanya lebih bertanggung jawab. Karena berbagai hal yang mereka lakukan terhadap sumber daya tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka sendiri. Apabila pengelolaan dilakukan oleh orang lain, kerap tidak mengandung kedekatan moral dengan masyarakat lokal, dan orang luar dikhawatirkan tidak memiliki tanggung jawab moral yang tinggi (lihat Pujaastawa, 2017).

Akhir-akhir ini telah timbul kesadaran bahwa pembangunan pariwisata berdimensi kerakyatan kian meningkat, apalagi karena mamfaat pariwisata lebih banyak dirasakan oleh pihak pemilik modal, yang umumnya lebih banyak pula berasal dari masyarakat luar (Wend Brechin, 1991; Wells dan Brandon, 1992). Dalam banyak kasus pembangunan pariwisata berskala besar, sangat kurang melibatkan peran serta masyarakat setempat, karena itu terjadi proses yang memarginalisasi masyarakat setempat. Sebab itu masyarakat setempat sering tidak berdaya untuk mempengaruhi pola-pola pembangunan pariwisata.

Pembangunan pariwisata berdimensi kerakyatan mengacu pada pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan model yang memberikan peluang yang lebih



besar agar masyarakat lokal setempat secara efektif dilibatkan dalam kegiatan pembangunan. Menurut Cemea (1991) kedudukan masyarakat lokal adalah pemeran utama dalam membuat keputusan dan merekalah yang seharusnya melakukan kontrol terhadap kebijakan pembangunan itu secara menyeluruh.

## 2. Melestarikan Warisan Budaya Maritim

Kita harus memiliki strategi pengembangan budaya dengan ideologi kebaharian yang jelas. Pinisi Nusantara selama ini telah terbukti dapat menerima inovasi dari perkembangan ilmu dan teknologi.

“Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengharungi luas samudra..,” lirik dan syair lagu yang diciptakan Ibu Sud ini sangat menggugah semangat kebaharian nusantara. Sama ketika penemuan sebuah kerangka kapal kayu tua di kedalaman teluk Mexico (1975). Hasil penelitian para ahli mengungkapkan bahwa perkapayan kapal kuno abad ke VII itu berasal dari Indonesia.

Penemuan ini memang luar biasa dan misterius, namun dia telah menyulut ide yang brilian di kalangan pelaut dan TNI AL. Laksamana Sudomo, waktu itu Menteri Tenaga Kerja dalam kabinet Suharto dan beberapa pemuka Bugis-Makassar di Jakarta, bersepakat untuk melayarkan Perahu Pinisi ke Vancouver (Kanada) guna menghadiri Expo Internasional 86 yang kebetulan akan dibuka beberapa bulan lagi. Mereka ingin membuktikan kepada dunia internasional bahwa kapal kuno di dasar laut teluk Mexico itu bukan hanya masa lalu bangsa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut yang diperhitungkan.

Demikianlah sebuah Perahu Layar Pinisi (lk.500 ton) dibangun oleh para punggawa di Tanah Beru (Sulawesi Selatan). Semua anak buah perahu dan kapten kapal Pinisi dipersiapkan oleh panitia kecil, termasuk peralatan canggih telekomunikasi. Jarak antara Jakarta-Vancouver melalui lautan Pasifik lebih lk.11.000 miles. Dengan upacara yang sederhana Pinisi Nusantara itu yang dihadiri beberapa menteri dan punggawa Pinisi, kami lepas dari Muara Tanjung Priok. Alhamdulillah, Pinisi Nusantara itu mampu menjelajahnya dengan gagah berani dalam waktu 91 hari. Pada waktu itu Pinisi memasuki perairan Amerika Serikat, sebuah kapal induk negara adidaya itu menyambutnya

dengan menaikkan bendera warna-warni dan membunyikan “terompet” sebagai ucapan selamat! Ternyata semangat bahari bangsa Indonesia tidak pernah padam dan terbukti mereka dengan gagah berani mengharungi lautan dan selamat sampai di Vancouver (14 Sept. 1986).

Semangat mengharungi lautan, adalah sebuah nilai bahari (kelautan) yang harus diselamatkan dan dilestrikan. Kapal layar Pinisi adalah alat transportasi laut hasil karya maritim yang telah digunakan berketurunan dan membumi dalam budaya bahari orang Bugis-Makassar. Sebagai alat transportasi dia telah mengalami perubahan sepanjang masa. Pemerintah tidak ingin masyarakat kita hidup membelakangi laut lagi. Apa yang harus dipertahankan dan apa akan diperbaharui, agar kapal-kapal layar seperti Pinisi ini tetap eksis? Agar hasil bumi dan laut dari ribuan pulau yang tersebar itu memiliki nilai dan arti ekonomis untuk diperdagangkan demi kesejahteraan rakyat.

#### **a. Modernisasi Pelayaran Nusantara**

Ada tiga jenis kapal layar nusantara yang dapat diidentifikasi keberadaannya, yaitu Pinisi (Bugis-Makassar), perahu Cadik (Madura) dan Lancang Kuning (Melayu). Beberapa kelompok etnik lainnya seperti Minahasa, Banjar dan Ambon-Maluku sampai sekarang memang masih menggunakan perahu tradisional bercadik, tetapi digunakan terbatas sebagai perahu penangkap ikan. Sedangkan Lancang Kuning (Melayu), tidak ada lagi berlayar di lautan, hanya lagunya yang masih terdengar. “...Lancang Kuning, Lancang Kuning berlayar malam...” Mungkin sejak berlayar malam itu orang tidak melihatnya. Tetapi prototipe lancang kuning hampir mirip dengan perahu orang-orang Oman-Gujarat waktu kami mengunjungi Oman (2012) dan singgah ke museum kerajaan, duplikat perahu Oman ini masih dipajang di sana.

Orang Bugis-Makassar adalah kelompok etnik yang sangat intim kehidupannya dengan laut, tidak mengherankan kalau perahu layar Pinisi masih melayari Nusantara. Siapa yang mengunjungi pelabuhan Sunda Kelapa di Tanjung Periok akan bertemu dengan ratusan kapal Pinisi mangkal di pelabuhan yang penuh sesak dengan kegiatan bongkar-muat barang dari dan ke berbagai pelabuhan nusantara. Sekarang sebagian besar perahu Pinisi sudah dilengkapi dengan mesin motor. Di tengah laut ketika ombak

besar dan angin tidak berembus, mereka menggunakan motor agar kapal Pinisi itu dapat melaju tanpa layar. Kalau tidak ada motor maka kapal Pinisi akan dipermainkan ombak besar dan kemungkinan kecelakaan karena perahu tiba-tiba dapat terlempar ke batu karang.

Menggunakan motor di buritan kapal Pinisi merupakan suatu inovasi yang terjadi di daerah buritan, karena itu Pinisi disebut juga PLM (Perahu Layar Motor). Dengan motorisasi ini, mereka tidak perlu pulang di musim Barat (September-Desember). Ini sebuah contoh inovasi penting yang merupakan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi yang dilakukan tanpa goncangan budaya. Memang beberapa investor asing menawarkan agar perahu layar Pinisi secara keseluruhan diganti dengan kapal motor buatan Jepang atau Eropa, seperti kapal-kapal kargo biasa. Ternyata pemerintah daerah dan masyarakat bahari Sulawesi Selatan tidak menyetujuinya.

### **b. Tol Laut Untuk Siapa?**

Pemerintah Jokowi sekarang merencanakan pembangunan tol laut, terutama di sepanjang ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Agar transportasi dan perhubungan nusantara dapat memajukan perekonomian nasional. Modernisasi perhubungan laut haruslah diletakkan dalam kerangka pembangunan budaya bahari secara menyeluruh, proporsional dan *integrated*. Pembangunan transportasi laut tidak hanya terbatas pada tol laut saja, yang ditenggarai sarat dengan kepentingan kapitalisme-liberalisme atau karena elit kita “latah” dengan rayuan modernisasi dan melupakan kepentingan dan kebanggaan rakyat banyak terhadap budaya maritim mereka.

Tol laut dalam kerangka pengembangan pusat perekonomian internasional di kepulauan nusantara haruslah diselaraskan dengan perbaikan transportasi kapal-kapal layar antar pulau seperti yang diperankan selama ini oleh Pinisi Nusantara. Kapal-kapal layar tersebut sangat efisien dan murah. Sebaian besar pelayaran mereka digerakkan oleh angin bukan oleh motor yang menghabiskan Migas. Awak kapal (pelaut) dapat merangkap pekerja bongkar-muat di pelabuhan. Kapal-kapal layar ini dapat berlabuh di pelabuhan-pelabuhan sederhana, tidak perlu menunggu pelabuhan internasional seperti tol laut yang direncanakan.

Kalau pemerintah tidak melihat potensi transportasi tradisional seperti Pinisi nusantara dan hanya fokus pada pembangunan pelabuhan modern untuk tol laut, maka nasib Pinisi akan mengikuti nasib yang menimpa Lancang Kuning. Para investor tidak peduli apakah kita masih memiliki kebanggaan terhadap budaya, yang penting bagi mereka “jualan mereka laku”. Kapitalisme liberalisme, akan mendesak diri, dengan perhitungan keuntungan yang menggiurkan.

Kita harus memiliki strategi pengembangan budaya dengan ideologi kebaharian yang jelas. Apa yang telah kita miliki, seperti Pinisi Nusantara selama ini telah terbukti dapat menerima inovasi dari perkembangan ilmu dan teknologi. Masalahnya kalau dianggap kurang cepat dan spektakuler memang inovasi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa bantuan dan perhatian pemerintah berlangsung alami. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk melakukan modernisasi bahkan menghancurkan sebuah situs budaya seperti apa yang terjadi pada Lancang Kuning di zaman kolonial.

### c. Modernisasi Warisan Budaya

Jepang melakukan modernisasi dari budaya sendiri, bukan dari budaya orang lain. Mereka seakan mencangkokkan unsur modernisasi itu pada batang tubuh budaya Jepang sendiri. Modernisasi Jepang kuat karena akar budayanya tidak tercerabut. Modernisasi sistem manajemen perusahaan Jepang sangat tangguh, karena dia memindahkan ideologi keluarga (yang disebut *ie*) ke dalam perusahaan industrinya.

Setiap industri, seperti Toyota, Mitsubishi atau Sony dianggap sebuah keluarga dan menerapkan ideologi keluarga Jepang. Pegawai atau karyawan adalah anggota keluarga. Perusahaan menangani semua urusan karyawannya secara menyeluruh, apakah itu perumahan, perkawinan, kesehatan, atau pendidikan. Karena itu kesetiaan terhadap perusahaan sama seperti kesetiaan terhadap keluarga sendiri. Sistem manajemen yang tangguh itu telah mampu menghadapi setiap guncangan (*malaise*) ekonomi internasional.

Apabila transportasi budaya maritim seperti kapal Pinisi dianggap sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dimodernisasi, maka masyarakat dan pemerintah perlu memikirkan “teknologi canggih” apa

yang secara efisien dapat dicangkokkan pada Pinisi itu agar dia menjadi lebih handal dan mampu bersaing di lapangan. Sementara itu kita dapat berbangga atas kelestarian warisan budaya maritim itu. Insya Allah.

### 3. Tenggelamnya Kapal Bajak Laut

Jangan dibayangkan tenggelamnya kapal “bajak laut” | itu seperti tenggelamnya kapal van der wijk dimana seorang janda muda berada di atas kapal.

Prof.Mattulada dari Universitas Hasanuddin, pernah mengeluh betapa piciknya “wawasan nusantara” para pejabat kita di Jakarta. Hal itu saya rasakan juga ketika meminta persetujuan terhadap kesepakatan kerjasama penangkapan ikan IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangles) di pantai Sumatera Bagian Barat (1984). Seperti diketahui ikan-ikan bertelur dan menetas di Laut Cina Selatan kemudian besar di pantai Barat Sumatera. Sebab itu penangkapan ikan di sana ramai, bukan di laut Cina Selatan atau di laut Jawa. Kesepakatan itu meliputi pengadaan kapal (semuanya disediakan oleh Malaysia dan Thailand), ABK (anak buah kapal) juga dari Thailand dan Malaysia, kita hanya menyisipkan 35% sebagai ABK yang akan dilatih, selebihnya kita akan menyiapkan pabrik es di Olele (Banda Aceh), pulau Simeulu dan Nias untuk keperluan pendinginan ikan pada kapal-kapal yang beroperasi.

Permohonan persetujuan kerjasama itu harus dari Menteri Perikanan dan kami lalui dengan menemui Dirjen Perikanan Laut. Tetapi sampai di sana delegasi kami mentok. Malah kami dibentak-bentak, seakan kami telah memalukan RI hanya berperan sebagai “tukang jual es”. Kami sudah menjelaskan bahwa kita tidak punya kapal, dan ABK yang berpengalaman. Nelayan “perahu pong-pong” tidak mungkin diandalkan. Sebaiknya anak-anak muda mereka didorong sebagai ABK pemula di kapal-kapal IMT-GT untuk dilatih, sementara pemerintah pusat dapat diharapkan membantu pengadaan kapal nantinya. Kalau tidak ikan kita di pantai Barat Sumatera dicuri orang. Dengan cara berangsur seperti ini, masa depan RI “Jaya di laut” dapat diraih. Pertemuan demi pertemuan IMT-GT kami lalui, izin itu tidak muncul juga, sehingga pada pertemuan terakhir, kami pula yang

dilecehkan orang Thai “*are your goverment still serious...???*” “ejek” mereka (lihat Pelly : *The Broken Triangles*, Seminar Internasional Antropologi, Jakarta, 1989).

Sekarang tiga puluh tahun sejak pertemuan IMT-GT itu Presiden Joko Widodo “memerintahakan” untuk menenggelamkan setiap kapal pembajak ikan di lautan yang tertangkap. Tentu yang menenggelamkan itu bukan nelayan “pong-pong”, tetapi kapal patroli perairan yang terintegrasi yang diperlengkapi dengan peralatan canggih termasuk radar, satelit dan marine recue coordinating center (MRCC) dan dengan bantuan Angkatan Laut. Memang Amerika Serikat pun pada Abad Pertengahan dalam sejarahnya menembak dan menenggelamkan kapal-kapal penjual budak dan manusia, terutama di laut Mediteranian, di daerah utara Mesir, Libya dan Marokko (lihat Hymne AL-AS, dimana liriknya terkait dengan peristiwa bajak laut ini).

Memang hukum di laut keras, berbeda dengan di darat. Keuntungannya kalau kapalnya ditenggelamkan, maka “jaringan mafianya di darat” juga turut ditenggelamkan. Mereka tidak bisa membeli atau melepaskan kembali kapal-kapal sitaan yang mangkal di pelabuhan. Memang kejahatan itu tidak berdiri sendiri, apalagi kejahatan pencurian ikan itu telah berpuluh tahun beroperasi dan mekar dengan dukungan mafia yang kuat. Karena itu kita usulkan agar tidak hanya kapal-kapal asing pencuri ikan yang ditenggelamkan, tetapi juga kapal-kapal mafia Migas/penyeludupan BBM, kayu, Narkoba dan barang elektronik agar sekalian ditenggelamkan. Setidaknya dengan tindakan tegas ini kewibawaan Indonesia perairan ditegakkan.

Sebenarnya, tidak hanya efek jeranya telah diberlakukan tanpa ditunda-tunda, tetapi dampak terhadap jaringan mafia di darat atau di laut, eksportir, industri pengolahan, tokoh-tokoh dan para pejabat pelabuhan di dalam dan di luar negeri akan turut mengalami *shock* (goncangan batin). Jangan dibayangkan tenggelamnya kapal “bajak laut” itu seperti tenggelmnya kapal van der wijk dimana seorang janda muda berada di atas kapal tersebut. Bayangkan betapa perihatannya rakyat kita hanya menerima penghasilan sekitar Rp60 triliun per tahun, sedangkan kerugian dari pencurian ikan yang dilahap para mafia ditaksir Rp300 triliun per tahun atau lima kali lipat. Memang tidak sedikit, cukup untuk menopang pertumbuhan dan kebutuhan peralatan penangkap ikan mereka di tengah laut.

## **Inovasi Kehidupan Nelayan**

Kalau ada kelompok masyarakat yang tidak tersentuh oleh percikan keuntungan dari kemerdekaan yang kita raih, maka kelompok masyarakat itu adalah nelayan. Pak Harto dan Ibu Tien semasa hidup mereka, beberapa kali bersama petani di tengah sawah yang sedang menguning dengan gembira menyabit padi. Kita tidak pernah melihat keceriaan seperti itu dilakukan mereka bersama nelayan atau pelaut! Bahkan pejabat-pejabat lainpun sangat jarang berbicara mengenai nasib nelayan kita. Mereka merasa “tidak nyaman” saja kalau berada di tengah nelayan, karena itu perhatian pemerintah kita sejak kemerdekaan memang kurang sekali singgah dalam kehidupan nelayan.

Padahal pantai kita adalah pantai yang terpanjang di seluruh dunia, dan sepanjang pantai itu hidup nelayan. Sejatinya para pejabat kita banyak yang dibesarkan dalam budaya yang membelakangi laut. Kalau di India sebegini besar nelayan inilah dikategorikan sebagai kasta paria (di bawah kasta sudra) yang tidak perlu dianggap ada di muka bumi. Pada waktu saya belajar di Calcutta (1964), setiap musim dingin dan panas terik, mayat mereka bergelimpangan di tepi jalan. Hanya petugas kereta sorong yang mengemasi mayat-mayat ini untuk dibakar. Karena itu hampir 50 persen orang melarat setingkat budak di dunia ada di India. Mudah-mudahan saja sekarang telah berubah, apalagi teknologi maju (IT) telah menjamah kehidupan mereka.

Dengan kebijakan baru yang melihat laut sebagai sahabat bukan musuh dan menyakini masa depan kita ada di laut, maka nasib nelayan juga akan berubah dan menapak keera baru. Tiga hal pokok harus segera dilakukan pemerintah (1) melakukan intervensi dalam kehidupan nelayan, terutama mengkatrol mereka dari kemiskinan struktural, (2) melakukan inovasi dalam penangkapan ikan, ada pentahapan pemakaian teknologi modern agar mereka dapat meninggalkan tradisi nelayan pong-pong, dan (3) pendidikan maritim terhadap generasi muda nelayan. Selama ini para LSM nelayan banyak yang cenderung mendorong anak-anak nelayan untuk meninggalkan laut, mencari kehidupan yang membelakangi laut, agar dapat kehidupan baru tidak sebagai nelayan lagi. Tetapi saya rasa dorongan ini kurang tepat, karena masa depan kehidupan kita di laut sangat menjanjikan.

Tentu anak-anak nelayan yang habitat lingkungannya bersama laut akan lebih sesuai dengan tantangan dalam dunia maritim. Apabila kebijakan pemerintah mengenai pembangunan maritim kita dapat kita jadikan pegangan tidak hanya sebagai slogan atau *style* baru dalam kehidupan politik, maka kita dapat berharap masa depan yang gemilang dalam kehidupan bangsa kita, karena memang justru di laut kita akan jaya! Insya Allah.

#### 4. Cetak Biru Negeri Maritim

Jarang sekali kita dapati Pak Harto dengan nelayan atau pelaut. Tokoh seperti ini tidak nyaman berada di tengah nelayan atau pelaut apalagi untuk menjelajahi pulau. Kasus serupa dapat dilihat pada kepemimpinan dari kelompok rural-minded.

Menyimak apa yang diungkapkan calon presiden dan wakil presiden (Capres/Cawapres), baik Prabowo-Hatta, maupun Jokowi-Kalla di berbagai media dan dialog di TV, kita jadi miris dan merasa tersudut sendiri. Betapa tidak, pada tingkat tokoh-tokoh sekaliber mereka pun ternyata tidak memiliki konsep utuh mengenai Indonesia sebagai negeri maritim. Di sana sini yang bermunculan hanyalah beberapa serpihan yang terkait dengan kemaritiman, seperti toll-laut, pelabuhan utama peti kemas, pulau-pulau terluar yang mulai dikuasai asing, kesombongan Australia di batas perairan laut Indonesia, laut China Selatan yang penuh sengketa dan pencurian ikan di perairan nusantara.

Semua cuplikan itu tidak menggambarkan penguasaan Capres/Cawapres kita terhadap cetak biru Indonesia sebagai negeri maritim terbesar di dunia. Kedua pasangan juga tidak tergugah terhadap kenyataan ironis yang menyilaukan mata, seperti pasar-pasar swalayan kita yang menjual ikan impor yang sebenarnya banyak yang berasal dari ikan yang dicuri dari perairan Indonesia sendiri. Bukankah ini semua “kebocoran”? Mengapa hal ini sampai terjadi? Bahkan penjarahan kekayaan laut secara besar-besaran itu bukan baru kejadian, tetapi telah puluhan tahun berlangsung. Bedanya sekarang memakai teknologi canggih dan dilengkapi pula dengan dokumen “canggih”, sehingga tidak terdeteksi dengan peralatan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat yang tetap “abal-abal”.



Kalau ada orang yang mengungkapkan kerugian atau kebocoran sampai ratusan triliun rupiah pertahun dari dari laut nusantara kita, ada saja pejabat “abal-abal” kita yang merasa tersinggung dan sempat merasa tidak dihargai. Karena apa? Karena memang hitung-hitungan mereka masih dalam lingkup “nelayan pong-pong” yang hanya mampu melaut sekitar 15 miles dari pantai, dan lebih banyak kemudian nongkrong menganggur di musim Barat.

### **a. Pergilan ke Negeri China**

Banyak contoh dan iktibar dari Negara tetangga kita yang seyogianya membangkitkan syahwat bahari para pejabat. Seperti apa yang selalu dicontohkan China membangun kelautannya. Sungguhpun luas laut China lebih kecil dari Indonesia, tetapi untuk mendukung pembangunan kawasan lautnya di setiap provinsi yang berbatasan dengan laut mereka membangun sebuah universitas kelautan yang melingkup industri perkapalan, pengolahan ikan, penjagaan dan keamanan perairan.

Pelaut-pelut “modern” China hasil didikan perguruan tinggi yang menjadi nelayan ini telah menghasilkan produksi ikan yang mencengangkan. Sekarang produksi ikan China meroket menjadi 19 juta ton pertahun, sedangkan Indonesia tetap 5,5 juta ton pertahun, padahal perairan laut Indonesia tiga kali lebih luas dari mereka. Ini adalah sukses kedua setelah KEK (Kawasan Industri Khusus) di provinsi Kuandong Sen-Sen yang telah membuktikan betapa sumber daya manusia (SDM) yang dibina lima perguruan tinggi yang menopang puluhan industri daerah khusus dapat berjaya memberikan sukses yang diharapkan.

Mungkin kita lupa untuk belajar sampai ke negeri China seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Bukankan bait nyanyian “nenek moyangku orang pelaut”, tidak sampai mengatakan sampai ke negeri China? Hanya legenda Sawerigading yang menyebutkan dia belayar dan berperang merebut dan mengawini gadis China Wi Cun Dai di sana.

## b. Mengapa Kita Membelakangi Laut?

Setelah Kerajaan Mataram gagal menguasai Malaka abad 17. Dan pasukannya cerai berai di lautan, mereka mengurung diri ke pedalaman, hidup membelakangi laut, lebih banyak karena frustasi. Banyak bandar-bandar sepanjang pantai utara pulau Jawa yang dibumihanguskan oleh kerajaan Mataram, agar mereka tidak tumbuh besar menyaingi pusat kerajaan yang mengundurkan diri ke pedalaman itu. Tetapi sejak pengunduran diri ini, tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Jawa dua budaya yang saling memisahkan diri. Budaya pantai-pesisir dan budaya-pedalaman yang “men-deso”.

Kalau ada kecenderungan Universitas Gadjah Mada yang disebut men-deso, serba tenang dan terkesan “lamban” itu adalah ciri-ciri budaya pedalaman, sedang Universitas Indonesia yang terkesan “cepat” dan urban-minded itu adalah pengaruh budaya kota di pesisir-pantai. Tokoh-tokoh nasional kita, baik pejabat sipil atau militer dapat diidentifikasi apakah mereka cenderung tergolong yang urban minded (kota-pesisir) atau rural minded (men-deso).

Sampai sekarang masih sebagian besar pejabat kita adalah dari kelompok “deso”, jadi terkesan serba lamban dan banyak pertimbangan (keraguan). Sementara itu tokoh-tokoh luar Jawa (sabrang) adalah urban-minded, tetapi yang lebih banyak terpakai, mereka yang dikategorikan sebagai kelompok deso-minded. Kecuali seperti Akbar Tanjung dan kawan-kawannya yang lebih mempersunting gadis-ningrat Solo misalnya, dimana telah terjadi pembatasan budaya. Pertarungan dalam kepemimpinan elit nasional Indonesia dapat dilihat dari dua pola (gaya) kepemimpinan ini (urban versus rural-minded).

## c. Cetak Biru Negeri Maritim Indonesia

Disinilah kesukaran Indonesia melahirkan cetak biru Negara Maritim Indonesia. Pertama, perbedaan orientasi antar pimpinan. Pejabat seperti Soeharto dan SBY adalah mereka yang dilahirkan dari masyarakat petani pedalaman Jawa. Orientasinya adalah pedalaman yang membelakangi laut. Orang di Yogya, menurut Umar Kayam, hanya bisa membedakan lima jenis ikan laut. Banyak kasus yang menceritakan bagaimana pertemuan

Pak Harto dengan petani di dangau atau tengah sawah waktu panen. Tetapi jarang sekali kita dapati pertemuan Pak Harto seperti itu dengan nelayan atau pelaut Indonesia. Tokoh-tokoh pemimpin seperti ini tetap tidak merasa nyaman berada di tengah nelayan atau pelaut, apalagi untuk menjelajahi pulau-pulau terluar di nusantara kita. Kasus-kasus serupa dapat dilihat juga pada kepemimpinan Indonesia lainnya dari kelompok rural-minded.

Dalam situasi corak kepemimpinan bangsa kita seperti di atas, dapat dimengerti nasib tragis yang menimpa Bapak Prof Dr Makagiansar, mantan Dirjen Perguruan Tinggi umpamanya. Beliau dilahirkan di pulau Talaud Sulawesi Utara. Dengan kesepakatan para Rektor Perguruan Tinggi se Indonesia (1974), dirancanglah apa yang disebut sebagai Pola Ilmiah Pokok (PIP) Perguruan Tinggi (PT). Setiap PT harus memilih PIP yang didasarkan pada Budaya Hinterland atau aspirasi masyarakat PT setempat.

PIP ini kemudian diminta persetujuan dirjen. Seperti USU umpamanya, sebuah PT yang dikelilingi oleh berbagai perkebunan (komoditi ekspor yang terbesar di Indonesia), maka sewajarnya PIP USU itu Ilmu Perkebunan. Demikianlah ditetapkan ada empat PT Ilmu Kelautan (Maritime Universities): (1) Universitas Sriwijaya (Palembang, Sumatera Selatan), Universitas Tanjung Pura (Pontianak, Kalimantan Barat), (2) Universitas Hasanuddin (Makassar, Sulawesi Selatan), dan (3) Pattimura (Ambon, Maluku).

Kebetulan waktu itu (1979) penulis berada di Unhas Makassar, Rektor mereka Prof Dr Aminuddin adalah bekas Rektor ITB Bandung, yang sengaja pulang kampung ke Makassar untuk memimpin Unhas sebagai Universitas Maritim. Beliau seharian sibuk menggelar persiapan dan uji coba kurikulum Unhas sebagai universitas kelautan. Beliau mendatangkan beberapa orang guru besar kelautan dari University of Hawaii Amerika dan Vancouver Canada bertugas di Unhas. Ternyata semua fakultas dan bidang studi di Unhas, harus mengarahkan diri memperdalam Ilmu Kelautan, seperti Fakultas Hukum memperdalam hukum kelautan, Kedokteran merangkum studi semua penyakit kalautan, Fakultas Teknik perkapalan dan dsb.

Tetapi ironisnya sampai permulaan tahun 1976, pemerintah pusat belum mensyahkan pendanaan Unhas sebagai Universitas Maritim. Malah saya dengar peralatan untuk laboratorium perkapalan umpamanya masih tetap dikirim ke ITB Bandung, walaupun mereka tidak punya laut. Prof

Dr Makagiansar yang kecewa berat karena konsep PIP ini dicegal pemerintah pusat, kemudian mundur dan dimutasikan ke Unesco (PBB) di Paris. Dengan kepergian beliau, berakhir pulalah cita-cita Indonesia untuk memiliki Universitas Kelautan.

Dari kisah tragis Makagiansar tersebut, dapat dimaklumi mengapa kita sampai hari ini tidak memiliki strategi pembangunan kelautan yang menyeluruh seperti apa yang dimiliki negara kelautan lainnya seperti China atau Canada. Karena cetak birunya tidak bisa diciptakan oleh sarjana dan pejabat yang budaya hidupnya membelakangi laut.

## 5. Turis Membelah Bukit Barisan

Ada tiga hal universal yang harus kita miliki sebagai host (tuan rumah) yaitu keramahan, kerapian dan kebersihan, semua manusia menyukai dan mengharapkan kalau pergi ke suatu destinasi wisata.

Ketika seorang turis berketetapan hati untuk melangkah meninggalkan rumahnya ke suatu tujuan wisata, apa yang hendak dicarinya? Dia ingin mendapatkan sesuatu kejutan baru (*excited*) dalam kehidupannya, agar dia dapat melepaskan rutinitas kehidupan sehari-hari yang membelenggunya. Sebab itu ketika dia menetapkan untuk mengunjungi suatu daerah, sebenarnya dia belum mengetahui benar apa yang mengejutkannya di daerah itu. Yang jelas ia ingin menemui sesuatu yang berbeda dengan daerah yang ditinggalkannya. Karena dana yang diperlukan juga bukan sedikit, biasanya keluarga-keluarga di Eropa atau Amerika menabung untuk dapat berwisata setiap tahun atau dua tahun sekali. Tidak seperti kebanyakan kita di Indonesia, tergantung kepada “uang dadakan” (maaf umpamanya menang lotre atau korupsi) atau jatuh sakit maka harus berobat ke luar negeri (*health tourism*). Sewaktu saya bertugas sebagai konsultan lingkungan pada proyek wisata Bintang Utara yang dikelola perusahaan turis Singapura (1987-1990), mereka ingin mengeluarkan semua orang melayu Bintang dari Utara pulau itu. Sebagian besar tanah-tanah mereka telah dibeli, baik karena terpaksa atau imbalan tertentu, mereka yang belum pindah hidup seperti menumpang di tanah sendiri. Dalam beberapa pertemuan, tim kami yang waktu itu dipimpin Ir Wimar Witular, meyakinkan para pengusaha Singapura ke

Bintan setiap tahunnya, apabila tidak bertemu (*eccounter*) dengan masyarakat setempat, itu artinya hanya sekedar” pindah tidur” dan hanya akan bertahan 2-3 tahun saja. Wisatawan akan menghindari membuang waktu berharga yang telah dijadwalkan semula.

Setelah beberapa pertemuan, akhirnya program kehadiran kami, diubah menjadi mempersiapkan *living community* masyarakat Melayu keseluruhan pulau Bintan itu. Yang dimaksud dengan *living community* adalah masyarakat Melayu yang hidup selayaknya, punya tanah, tebat (kolam ikan), sawah dan ladang (kalau melayan punya perahu dan kelengkapannya), dalam suatu perkampungan (komunitas) yang kompak (punya masjid dan sekolah).

Pertemuan para wisatawan dengan masyarakat Melayu (*living community*) setempat dengan segala aneka budaya asli yang ada pada mereka, itulah salah satu faset kehidupan manusia yang menyebabkan mereka merasa excited. Apalagi kalau mereka dapat membawa oleh-oleh seperti kerajinan tangan atau benda-benda asli lainnya dari masyarakat yang mereka temui. Jadi bukan karena tidur lelap di hotel berbintang lima, punya kesempatan berdisco, melantai dan menikmati konser segala, karena semua itu ada di negeri mereka. Sangat aneh pula, kalau mereka hanya dapat bertemu sesama turis saja!

### **Lama Turis Menetap**

Lama turis (*length of staying*) di suatu negara sangat tergantung dari tujuan yang telah dirancangnya. Tetapi biasanya seorang turis ingin menikmati objek wisata secara menyeluruh (*holistic*) yang dapat dijalaninya secara melingkar, sehingga waktunya dapat dipergunakannya secara lebih efisien tidak hanya habis di tengah jalan (transportasi) saja. Karena itu kunjungan wisata yang melingkar seperti dari airport ke kota tertentu, dari kota ke danau, dari sana ke pegunungan, terus ke pantai atau ke perkebunan, kemudian kembali ke airport (*from airport to town, and from the town to lake, from the lake to beach, and from the beach to mountain and then back to airport*), dan akhirnya baru kembali ke tanah airnya. Dengan program wisata seperti itu, akan menghabiskan waktu minimal 6-7 hari. Kalau satu hari seorang turis mengeluarkan dana rata-rata \$250 perhari (di luar ongkos transport),

maka dengan jadwal seperti ini dia akan menghabiskan uang sebanyak \$1.500 selama berada di suatu tempat. Kalau seorang wisata selama ini ke Sumatera Utara, hanya mengunjungi Danau Toba kemudian buru-buru pulang untuk mengunjungi Bali sebagai tujuan wisata kedua umpamanya, maka dia hanya mendapatkan dua destinasi wisata dengan pengalaman yang mungkin sama.

Mungkinkah seorang wisata mengunjungi destinasi melingkar di Sumut? Dengan dibukanya Airport Silangit secara resmi oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan bulan lalu, maka besar sekali kemungkinan destinasi wisata melingkar dikembangkan di Sumut. Pertama Sumut memiliki objek wisata dari pantai Timur ke Barat yang sangat potensial untuk dikembangkan. Medan (sebagai Paris van Sumatra) memiliki daya tarik tersendiri, dia punya kota tua (pecinan) yang baik, pasar tradisional dan kebun binatang. Kemudian tentu saja Danau Toba sebagai tujuan wisata yang telah dikenal manca negara. Kota memiliki destinasi lain di sekitar danau itu, seperti kota pegunungan yang sejuk di Brastagi, proyek panas bumi, dan kebun teh Sidamanik yang menarik terutama bagi wisatawan Eropa dan Amerika, sebagai peminum teh terbesar di dunia, tetapi mereka belum pernah melihat perkebunan teh dan bagaimana teh itu diproses. Alangkah nyamannya bagi seorang turis, kalau pada suatu pagi sesudah dia minum teh hangat, kemudian pergi melihat bagaimana teh ditanam dan bagaimana pula orang memetikinya, dapat melihat sendiri bagaimana teh itu diproses di pabrik.

Mungkin di Brastagi mereka berminat mendaki gunung Sibayak. Objek wisata ini sangat potensial untuk dikembangkan bagi turis asing. Hiking mountain (pendakian gunung) hal ini sangat tepat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki gunung di daerah khatulistiwa (bayangkan seperti permainan ski di pegunungan salju pada musim dingin). Setelah itu, airport Silangit dapat segera menyeberangkan mereka umpamanya ke Sibolga atau ke Nias (karena objek-objek turis di Tapanuli Selatan belum dikemasi).

Kedua tempat ini merupakan tujuan wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Selama ini turis susah menggapainya karena transportasi ke Danau Toba telah menguras tenaga dan waktu mereka. Mungkin mereka akan bersilancar di pantai Teluk Dalam yang sangat terkenal ombaknya (menurut para turis luar negeri, lebih baik dari Bali atau tempat lainnya

di dunia). Banyak objek wisata lainnya yang dapat disarankan untuk turis di Nias (seperti mengunjungi permukiman rumah adat Nias “mendaki matahari” atau peninggalan zaman megalitik), tergantung bagaimana kita dapat memoles programnya.

Keberadaan KNIA (Kualanamu Airport) akan sangat mendukung arus wisata internasional ke Sumatera Utara. Selama ini arus turis dari Australia dan Jepang umpamanya dari Jakarta terus mengalir ke Timur (Bali dan Yogyakarta). Dengan dibukanya KNIA mereka tidak perlu ke Jakarta lagi dapat langsung pulang pergi ke Medan. Arus turis dari Jepang saja setahunnya berjumlah hampir lima juta orang, sedang Australia tiga juta orang, merupakan potensi yang menantang untuk Sumatera Utara. Memang Bali dan Yogyakarta umpamanya memiliki keunikan tersendiri untuk orang Australia, tetapi hal ini perlu diteliti apa saja keunikan itu agar Sumut dapat berpacu setara dengan Bali atau Yogyakarta. Keunikan itu dapat membawa para turis menemukan mimpi-mimpi *excited* mereka. Tetapi ada tiga hal universal yang harus kita miliki sebagai host (tuan rumah) yaitu keramahan, kerapian dan kebersihan, semua manusia menyukai dan mengharapkannya kalau pergi ke suatu destinasi wisata.

Dalam tiga hal di atas, Bali dan Yogyakarta berbeda dengan Sumatera Utara yang multietnis dan multikultural. Mereka akan bertemu (*ecounter*) dengan manusia yang tidak seragam, karena itu Sumatera Utara tidak hanya menampilkan keindahan alam yang beragam tetapi juga keanekaan budaya multikultural yang menarik. Ketika mereka mengunjungi tujuh destinasi wisata di Sumatera Utara, mereka seolah-olah telah bertemu dengan tujuh bangsa yang berbeda-beda (bukan ini unik dan memikat?). Pertanyaannya yang penting dijawab ialah dapatkah kita mengemas wisata melintasi Bukit Barisan ini dengan baik dan tidak memalukan?

## 6. Universitas Maritim

Belajarlah dari China, mengapa mereka dapat menghasilkan 15,9 ton ikan setahunnya, sedang kita hanya 5,6 juta ton padahal laut kita tiga kali lebih luas.

Belakangan ini perhatian publik Indonesia, banyak tertuju kepada masalah kelautan (maritim). Pertama, hal itu dipicu oleh keprihatinan bangsa Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, tetapi masih tetap berorientasi ke bidang agraria (60 persen Jawa, dan 20 persen luar Jawa). Kekayaan Indonesia di darat (termasuk hutan dan mineral) makin menipis, sedangkan kekayaan laut yang dikelola baru sekitar 20 persen (menurut perhitungan Prof.Dr Habibie hanya 8 persen).

Kedua, besarnya potensi kerugian negara (*potential lost*), pertahunnya diperhitungkan telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun, sehingga kita sendiri tidak tahu kalau ikan impor yang dibeli di mall atau supermarket berasal dari ikan di laut kita sendiri yang dicuri orang. Ketiga, sampai saat ini kita tidak memiliki *blue-print* (perencanaan) yang matang mengenai pembangunan kelautan (lihat wawancara Kompas dengan Rohmin Dahuri, ahli Kelautan Nasional dari IPB Bogor, yang juga mantan Menteri Perikanan dan Kelautan RI, 25 Juli 2014). Basis Ilmiah Data Kelautan memang ada, tetapi tersebar di beberapa instansi dan lembaga. Menurutnya itu karena riset-riset kelautan dilakukann secara sporadis, tanpa ada institusi yang diberi kewenangan mengoordinasikannya.

Ketiga, alasan pokok ini baru merupakan hipotesa dari masalah utama (postulat) yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu terbelahnya latar kehidupan budaya pejabat pemerintahan dan politik yang berpengaruh di Indonesia, ke dalam dua poros, yaitu budaya maritim dan budaya agraria (pedalaman). Seperti kami utarakan sebelumnya dalam artikel Waspada 1 Juli 2014, bahwa budaya penduduk Jawa sesudah kekalahan kerajaan Mataram untuk menduduki Malaka dari kekuasaan Potugis abad 17. Mataram (karena frustrasi) mengundurkan diri dari pesisir dan konsentrasi ke pedalaman (n-deso). Bahkan, mereka membumihanguskan bandar-bandar di pesisir utara pulau Jawa agar tidak memunculkan pesaing baru yang secara potensial dapat membahayakan kerajaan Mataram yang sedang mundur ke pedalaman dan hidup membelakangi laut.

Sejak itu diperkirakan berkembangnya kecenderungan budaya pedalaman, dengan pusat Yogyakarta dan Solo dengan filsafat Islam-Jawa Sinkritisme. Sementara itu di pesisir Jawa seperti Banten, Cirebon, Pekalongan, Tuban dan Gresik mekar budaya Jawa Pesisir dengan etos Islam Puritan. Dua



polarisasi budaya Jawa inilah yang membesarkan pejabat-pejabat teras Republik Indonesia. Saya masih teringat keluh kesah dua orang sahabat saya yang mempunyai latar belakang pesisir Jawa yaitu Nurcholis Madjid dan Muhammad Adnan, waktu sama-sama kuliah di Chicago (1979). Yang pertama pertama beristeri orang Madiun dan kedua ningrat Solo.

Keduanya menceritakan bagaimana mereka sebelum berumahtangga “di-Jawa-kan” oleh kedua calon mertua mereka, agar dapat hidup dengan adat istiadat Jawa pedalaman, termasuk penggunaan Bahasa Jawa Kromo (ningrat) bukan ngoko (kebanyakan). Walaupun Muhammad Adnan (yang pernah menjadi Rektor Gadjah Mada) mengatakan, “Mas Usman, saya di rumah mertua tidak pernah berbahasa Jawa, karena takut salah.... saya memakai bahasa Indonesia saja”. Dari nama-nama kedua mereka saja telah dapat kita tebak apakah mereka Jawa pesisir atau pedalaman. Yang banyak memakai nama-nama Arab pastilah dari pesisir, sedang yang Sanskerta (seperti Kuntjaraningrat atau Selo Sumarjan, keduanya bekas guru saya), pastilah dari pedalaman.

Sebagai polarisasi budaya, perbedaan itu tidak hanya tampil dalam kecenderungan pemakaian nama dan ewuh pakewuh (tata sopan santun) tetapi juga lebih penting adalah pada pola pikir dan tindakan sosial (*social action*). Waktu Dirjen Dikti (Pendidikan Tinggi) dijabat Prof Dr Makagiansar (seorang putra Pulau Talaud, Selawesi Utara), memprakarsai pembentukan Universitas Maritim di beberapa universitas dalam rangka penerapan PIP (Pola Ilmiah Pokok) masing-masing perguruan tinggi, seperti di Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Pattimura Ambon, ternyata semua PIP universitas maritim ini tidak berjalan, karena Dirjen Makagiansar terganjal oleh tidak disetujuinya anggaran pemerintah dan DPR.

Kedengarannya memang sangat terkait dengan prosedur dan kewenangan birokrasi pemerintahan. Tetapi apa sebenarnya terjadi? Petinggi-petinggi negara kita waktu itu (pejabat pemerintahan dan politik masih dikuasai oleh mereka yang budaya kehidupannya membelakangi laut). Analoginya hampir-hampir sama dengan tindakan kerajaan Mataram abad ke 17 yang membumihanguskan bandar-bandar pesisir waktu mereka sedang mundur kepedalaman, agar bandar-bandar itu tidak muncul sebagai pesaing yang membahayakan kedudukan kerajaan di pedalaman.

Memang waktu telah bergulir, sekarang tidak seperti tahun 1975, empat puluh tahun lalu. Namun kita mungkin masih ingat waktu Habibie mengakhiri jabatannya sebagai Presiden RI, industri pesawat terbang nusantara (IPTN) Bandung yang akan menghasilkan pesawat untuk menjembatani pulau-pulau nusantara yang ribuan itu, begitu Habibie dijatuhkan dari presiden dan tidak berkuasa lagi, industri pesawat terbang itu dikebiri dengan alasan keuangan negara. Sekarang masa-masa saling menjagal itu, mudah-mudahan telah dapat kita lalui tanpa mengorbankan masa depan kesatuan Republik kepulauan nusantara yang tercinta ini.

### **Universitas Maritim**

Banyak yang masih meragukan apakah Universitas Maritim ini tidak cukup levelnya dengan sebuah institusi atau sekolah tinggi saja (lihat UU Perguruan Tinggi). Batang tubuh ilmu kemaritiman memang melingkupi berbagai bidang studi yang harus dikembangkan dalam berbagai fakultas. Tidak hanya Fakultas Teknologi Perkapalan, Perikanan Laut (Biota Laut), Pertambangan Laut (Mineral), tetapi juga seperti Kedokteran Maritim, akan mengkaji semua penyakit kelautan (*marine diseases*) yang berdampak bagi kesehatan manusia di pantai dan di tengah laut.

Begitu juga Fakultas Hukum Kelautan, seperti yang pernah dikembangkan Ammana Gappa, seorang ahli hukum kelautan orang Bugis-Makassar abad Ke 8. Bukunya diterjemahkan Prof Dr PL Tobing (Dekan Fakultas Sastra Unhas, 1967). Buku itu mirip sebuah encyclopedia, yang memuat semua aturan seperti apa kewajiban nakhoda sampai ke kelasi kapal, bagaimana hak dan kewajiban para penumpang kapal, apa sanksi kalau kapal terlambat sampai ke tujuan. Begitu juga fakultas Pendidikan Kelautan, bagaimana konten kurikulum dan metodologi pengajar orang-orang pesisir yang sangat berbeda dengan pegunungan. Apalagi dengan fakultas Ekonomi, Farmasi dan Lingkungan merupakan dunia ilmu pengetahuan yang sangat berbeda dan khas.

Pembangunan Universitas Maritim yang dirancang bersama Prof Makagiansar (1975) dahulu ternyata sesuai ALKI (Alur Lintas Kepulauan Indonesia) seperti Laut China Selatan-Selat Sunda (dimana terletak Universitas Tanjungpura dan Sriwijaya). Jalur ALKI Selat Makassar-ke Selat Lombok

Nusa Tenggara (Universitas Hasanuddin) dan jalur ALKI Kawasan Tinur dari Laut Halmahera-Laut Banda dan Selat Ombai (NTT) (Universitas Pattimura, Ambon). Dengan demikian putra bangsa yang ingin memperdalam ilmu kelautan tidak perlu harus ke ITB, UGM atau IPB yang tidak punya laut dan tidak ada di jalur ALKI, dan sebagian pengelolanya kehidupan budayanya masih membelakangi laut.

Apabila pemerintah merencanakan pembangunan ketiga poros ALKI ini, dalam sepuluh tahun mendatang, maka SDM yang akan mendukungnya harus dipersiapkan dari sekarang, tidak dicomot dari sana sini, tetapi telah dididik Universitas Maritim. Kalau perlu belajarlah sampai ke negeri China, mengapa mereka dapat menghasilkan 15,9 ton ikan setahunnya, sedang kita hanya 5,6 ton padahal laut kita tiga kali lebih luas dari mereka.

## **7. Barus Sepanjang Bukit Barisan**

Orang Portugis pertama sesudah Marco Polo datang ke Barus dipastikan bukan mencari kamper (kapur barus) tetapi mencari emas.

Pakansi Natal kali ini (2013), diniatkan untuk “sekali membuka pura dua tiga pulau terlampai”. Pertama, memang telah lama keinginan untuk kembali ke Barus kota tua Nusantara itu, sejak perbincangan tahun 1960 dengan Dada Meuraxa, beliau tetap bertahan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui Barus. Namun diskusi intensif dengan Buya Hamka, Mohd Said HA Thalib Lubis dan DR Mukti Ali dalam seminar masuknya Islam ke Indonesia (1962), menyimpulkan bahwa Pasai adalah kota tempat Islam pertama kali bermukim di Indonesia. Memang seminar juga menyatakan bahwa Barus adalah kota internasional pertama dimana para taipan mancanegara bermukim sebelum kedatangan Islam. Sekarang telah terbit buku Barus Seribu Tahun Yang Lalu (Jilid II, 2008) dari arkeolog Prancis Cloude Guillot cs yang mengemukakan bahwa (1) Kota Barus ada dua buah, (2) Ada kembaran Sriwijaya yang memiliki raja dan ibukota yang berbeda, dan (3) Ditemukan sebaran mata uang emas Barus di Nusantara dan Timur Tengah (Iran, Mesopotamia dan Mesir), Timur Dekat (Gujarat, India), dan (4) Bahasa Melayu telah digunakan di Pantai Barat Sumatera sejak abad ke 10, maka dorongan untuk ke Barus menjadi lebih kuat.

Walaupun, dua tahun yang lalu kami sekeluarga telah ke Sorkam, ke kampung Akbar Tanjung, mengawinkan anak angkat kami dengan seorang putri Sorkam. Dan kali ini kami kembali ke Sorkam menghadiri perkawinan adik kandungnya dengan seorang pemuda Jawa dengan upacara adat pesisir. Berada di tengah kaum kerabat Sorkam, memang sesuatu yang unik dan menarik. Bukan masalah kuliner, makanan yang serba lezat itu, tetapi yang menarik lagi, bahasa Melayu Pesisir dengan dialek Minang yang kental, sopan santun dan tegur sapa mereka, serasa di kampung halaman sendiri.

#### a. Air Terjun Pulau Mursala

Siang tengah hari ini boat kami timbul tenggelam dibuai gelombang menghadap air terjun pulau Mursala yang gagah menjulang langit. Suasana seram dan ceria silih berganti antara gelombang yang menghayun badan dan gelinding air terjun yang menjamah tubuh. Kami berdiri terpukau. Air terjun pulau Mursala ini luar biasa. Boat kami kemudian menghindari pulau Mursala menghadap Bukit Barisan. Kali ini kami sungguh terkesima menikmati keperkasaan deretan Bukit Barisan yang seakan muncul dari permukaan laut dari Utara sampai jauh ke Selatan, penaka barisan pasukan kehormatan yang rapi. Di titik Utara sebelah kanan pemandangan kami itu terletak Barus. Itulah kota penyair legendaris Hamzah Fansuri. Kami singgah dahulu di pulau Putri makan siang.

#### b. Dua Kota Barus

Kami mendarat di Barus membawa tanda tanya di mana kembaran Barus yang baru? Dalam catatan Guilloid "...nama Barus dipakai untuk kampung di daerah Minangkabau itu tidak muncul secara kebetulan. Menurut interpretasi yang masuk akal, setelah beberapa peristiwa, sejumlah penduduk Indrapura yang terpaksa melarikan diri memilih Barus sebagai tempat pengungsian..." Para pengungsi ini sebenarnya berasal dari Barus-Pancur. Semua ini menurut arkeolog Prancis itu menunjukkan keterlibatan Barus yang kuat dalam "*collective memories*" (ingatan bersama) masyarakat di bahagian Selatan daerah Minangkabau. Selain itu salah satu kronik Sejarah Barus yang berjudul "Sejarah Tuanku Batu Badan", mencatat

bahwa beberapa keluarga dari raja Indrapura telah berpindah ke Tarusan, sekitar 60 km di selatan Padang, di suatu tempat yang bernama “Barus” (Guillod, 2008). Kecenderungan munculnya Barus-Barus kembaran ini disebabkan karena kota Barus memiliki daya tarik yang multi dimensi. Orang Timur Tengah dan Timur Dekat (India) lebih melihat Barus sebagai pelabuhan eksportir Kamper (Kapur Barus) dan Damar disamping barang tambang lainnya, sedangkan orang Jawa dan para penguasa Sriwijaya, melihat Barus tidak hanya sebagai muara kapur barus, tetapi pusat eksportir barang tambang yang berharga, emas dan perak. Tambang-tambang emas sepanjang Bukit Barisan, terutama di Tapanuli (Batang Toru dan Padang Lawas), Minangkabau (Tiku dan Pariaman) serta Bengkulu (Rejang dan Lebong) mengirim hasil tambang emas dari Jawa sangat berperan meramaikan perdagangan emas di Barus dan di sepanjang “jalur emas” Bukit Barisan. Munculnya kota Barus abad ke 17-19 di luar kawasan Lobu Tua oleh penduduk Kerinci di sebelah Timur Indrapura, dimungkinkan dalam kaitan perdagangan emas.

### c. Dua Sriwijaya

Orang Portugis pertama sesudah Marco Polo datang ke Barus dipastikan bukan mencari kamper (kapur barus) tetapi mencari emas. Tome Pires juga mengemukakan daftar bahan dagangan di Barus: emas, sutera, kemenyan, kapur barus, lilin, dan madu serta berbagai jenis obat-obatan. Dari daftar di atas dapat disimpulkan bahwa Barus merupakan pelabuhan dan sumber bahan dagangan yang terkaya pada abad-abad 9 dan 10 masehi. Tetapi jaringan perdagangan manca negara ini seakan hanya didukung oleh *hinterland* pedalaman yang kaya. Memang hubungan kepedalaman, menurut kronik Batak berjalan sangat baik, mereka menghormati kepala-kepala suku apabila datang berkunjung ke Barus. Tetapi sukar untuk dapat dimengerti apabila Barus tidak berada dalam kekuasaan kerajaan atau dilindungi oleh negara yang kuat ketika itu.

Para arkeolog memang belum mendapatkan bukti yang dapat menjelaskan hubungan Barus dengan Sriwijaya, walaupun pada masa Lobu Tua (sebelum abad ke 9), kapur barus telah diekspor dan dipasarkan di Sriwijaya dan keping-keping mata uang emas Barus telah ditemukan di Muara Jambi. Sumber-sumber dari China yang banyak mengungkapkan bahwa dalam

priode yang bersamaan ada dua kerajaan Sriwijaya, satu di Palembang dan satu lagi di Jambi. Sriwijaya di Jambi inilah menurut catatan dinasti Tang (Xintang Shu) yang menguasai pelayaran Dunia Melayu sebelah Barat (Kerinci-Barus). Dinasti Tang ini menyebutnya sebagai dua Sriwijaya dengan "...dua kerajaan yang pemerintahannya terpisah", memang China mengimpor kapur barus dari Brunei, baru pada abad 15 mereka mengimpor kapur barus langsung dari Barus. Jalur pantai Barat Sumatera inilah kemungkinan yang dianggap oleh China sebagai jaringan Sriwijaya kedua (Xintang Shu:Lang-po-lu-si atau Barus)? Bagaimana dengan keramik China yang banyak didapati tidak hanya di barus tetapi juga di sepanjang pantai Sumatera bahagian Barat?" Dalam kaitan ini Guillod mengemukakan walaupun hubungan langsung antara China dan Barus tidak terjalin sebelum abad ke 15, tetapi keramik-keramik China diimpor ke Lobu Tua (Barus) melalui suatu sistem pelayaran komersial yang menggunakan beberapa pelabuhan perantara. Pedagang-pedagang Jawa banyak berperan dalam komunitas China ini.

#### **d. Penyebaran Mata Uang Emas Barus**

Penyebaran mata uang Barus abad 7-9 di berbagai kota dunia tidak hanya menunjukkan tingkat kota Barus sebagai sebuah "negara" adikuasa, tetapi juga menampilkan betapa luas jalur maritim yang telah dikuasai atau terkait dengan luasnya perdagangan yang telah terbina. Walaupun hubungan dengan Sriwijaya umpamanya belum terungkap oleh artifak arkeologis lainnya tetapi penemuan tiga keping mata uang emas Barus dalam sumuran Candi Gumpung di Muara Jambi abad ke 10, sangat membesarkan makna. Apakah Sriwijaya dan Barus menguasai tambang emas bersama di Muara Enim (Bengkulu) atau di Tiku dan Pariaman bersama Minangkabau? Mata uang emas Barus dengan berhias "Bunga Cendana" ditemukan juga di kerajaan-kerajaan Jawa seperti Kerajaan Mataram Pertama pada abad 10 (Wonosobo). Mata uang Barus itu tidak hanya menunjukkan kekayaan dan kejayaan kota Barus, tetapi juga dalam sejarah telah dicatat sebagai mata uang logam emas yang pertama dan terkuno di Indonesia. Bagitu juga temuan mata uang Barus di Tanah Genting Kra (Thailand), Teluk Benggala. Kemudian penemuan ini terungkap pula dalam penggalian-penggalian arkeologis di Persia, Irak, Mesir dan Mesopotamia. Dapat dicatat

bahwa hubungan antara Barus dan Mesir pada masa dinasti Fatimid sangat kuat, ini dibuktikan temuan mata uang Barus di Fustat. Tetapi orang-orang Mesir di Barus selalu disebut sebagai orang Arab.

### **e. Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca**

Kota Barus merupakan sejenis republik kecil yang dikuasai sejumlah pedagang. Kesimpulan Guillod ini tidak berubah. Berbagai prasasti menunjukkan keberagaman budaya bangsa di kota tua itu. Ada prasasti dalam bahasa Jawa, Sanskerta, Arab dan Tamil. Nahaisan Tengah kota (*down-town*) dikuasai para pedanang besar yang terlibat dalam perdagangan internasional dan menguasai kota. Dalam kesatuan multi etnis dan ras ini muncul problem “lingua franca” bahasa bersama yang dipergunakan untuk komunikasi. Barus menggunakan bahasa Melayu, ini terbukti dengan prasasti dari berbagai daerah pertambangan dengan Barus (Padang Lawas:Lokanatha; Krui: Batu Bedil). Sepanjang pantai Barat Sumatera menggunakan bahasa Melayu dialek Minang (salah satu dari tujuh dialek Melayu Nusantara), sejak abad ke 7, sehingga pujangga Hamzah Fansuri (abad 15) yang melantunkan syairnya dalam bahasa Melayu Pesisir (yang digelar juga bahasa ogek-ogek Sibolga) adalah bahasa Melayu Barus (Batak Rusak). Barus adalah kota internasioal yang melahirkan peradaban baru dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nusantara pertama di Indonesia.

## **8. Barus Negeri Misterius**

Agustus 1995, di Lobu Tua dekat kota Barus, terpancang slogan besar “Dirgahayu ke 50 negaraku, dan dirgahayu ke 5.000 desaku!”

Mungkin tidak ada negeri tua di Indonesia yang sekaligus menjadi situs sejarah dan arkeologi internasional yang sangat penting, namun sampai kini masih diselimuti misteri seperti negeri Barus. Nama kota negeri ini juga beragam, mungkin sesuai dengan para pelawat dan pedagang yang mengunjunginya: Kafer (Belanda), Kampara (Rusia), Kamfor (Inggris), Alkapur (Arab), Camper/Kampora (India/Sangsekerta), Balus/Barosai/PanTsuah (China), dan Kapur Barus (Melayu), seperti yang penulis dengar di Pulau Mursala.

Istilah ini mungkin merujuk kepada Kapur Barus yang jadi andalan utama mengapa para pedagang dan pelaut dunia datang memperdagangkannya. Menurut Prof MP Rivet, 6.000 tahun lalu kapur barus sudah diperdagangkan ke seluruh dunia. Pada zaman Firaun di Mesir orang telah ramai ke Barus membeli kapur barus, kemenyan putih dan emas. Mummi Ranses II dan III yang memakai kapur barus dan rempah dari Ophir (dekat Natal). Sedang nabi Sulaiman as telah memerintahkan pelaut Punicia mengambil emas dari Barus, Natal dan Muara Soma (1015 SM)

### a. Putri Runduk

Tokoh Dada Meuraxa (tokoh sejarah Barus) punya kisah lain mengenai negeri misterius ini, kali ini ternyata bukan mengenai kapur barus. Tetapi tentang Putri Runduk, yang menimbulkan perang antar bangsa. Di sekitar kota itu berdiam seorang wanita yang sangat terkenal kecantikkannya yang disebut sebagai Putri Runduk.

Menurut yang empunya kisah, putri ini beragama Islam (abad ke 7), dia tinggal di desa Patupang dekat Bandar Barus. Berbagai pendekar dan putra raja datang meminang. Di antaranya Raja Janggi dari Sudan (Afrika), raja China datang dengan seperangkat emas kawin dan porselin, dikawal bala tentara. Keduanya ditolak oleh Putri Runduk.

Akhirnya dia menerima pinangan raja Jawa, dengan alasan satu agama. Tetapi kedua raja lain tidak senang dan menghadang raja Jawa sehingga terjadi pertempuran segi tiga, sementara itu Putri Runduk menghilang di dekat mahligainya. Mahligai ini dapat dikunjungi dekat air mancur pulau Mursala. Kisah Putri Runduk ini menarik perhatian sarjana-sarjana Belanda, begitu juga dua sejarawan kawakan Indonesia Prof Dr Purbocoroko dan Prof Muhammad Yamin. Kisahnya dapat dibaca di perpustakaan.

### b. Kota dan Raja yang Serba Kembar

Dalam Buku Seribu Tahun Barus, Guilford (arkeolog Prancis) mencatat berbagai kembaran. Nama kota Barus didapati juga di daerah Selatan Minangkabau, mungkin didirikan para pengungsi Barus (sebagai *collection*



*memories*). China menganggap Barus sebagai “Sriwijaya kedua”, setelah Palembang. Pertama, mereka mengimpor kapur barus dari Brunei dan Jambi, baru abad ke 15 mereka mengimpornya langsung dari Barus.

Keramik China didatangkan sebelumnya dari berbagai pelabuhan dan diperdagangkan orang Jawa. Menurut Drakard (2003) tahun 1668, VOC baru mengetahui Barus diperintah dua raja. Raja Hulu dan Raja Hilir. Raja di Hulu keturunan Melayu Batak dan di Hilir keturunan Melayu Minangkabau. Kedua raja ini tidak membagi kekuasaan. VOC menciptakan pergiliran, pemegang kekuasaan. VOC menciptakan pergiliran pemegang kekuasaan pertama raja di Hilir sesudah itu baru raja di Hulu, sementara raja dijadikan penghulu atau Kuria. Tetapi VOC harus keluar dari Barus dan menyerahkan benteng (*loji*) ke Barus, karena mereka diusir tentara Aceh. Menurut beberapa naskah sejak abad ke 17 Barus dan sebagian besar pantai Sumatera bagian Barat adalah wilayah kekuasaan kerajaan Aceh.

Abad ke 16 Barus merupakan pusat budaya dan agama, terutama dengan keberadaan penyair mistik Islam Abdul Rauf Al-Fansuri. Tidak ada kesepakatan ahli sejarah, apakah Abdul Rauf yang menamakan dirinya Fansuri (Fansur = Barus) atau karena lahir atau meninggal di Barus. Yang jelas beliau dan murid-muridnya mengharumkan nama kota itu. Makamnya masih dapat ditemukan di Barus. Beliau meninggal terbunuh dalam kerusuhan pertikaian agama dengan kerajaan Aceh (1636).

Waktu saya ke Barus tahun 2000 tidak ada perubahan dari sebelumnya. Banyak keramik dan situs bersejarah bergelimpangan di sana. Saya tidak sanggup lagi menaiki tangga ke bukit makam papan panjang. Di tengah perjalanan mendaki, saya duduk menikmati keindahan matahari terbenam. Sampai sekarang ahli sejarah belum dapat memastikan sejak kapan kota tua itu didirikan. Agustus 1995, di Lobu Tua dekat kota Barus, terpancang slogan besar “Dirgahayu ke 50 negaraku, dan dirgahayu ke 5.000 desaku!” Jadi menurut masyarakat di sana Barus telah berumur 5.000 tahun.

### **c. Tugu Km Nol Masuknya Islam**

Presiden Jokowi 24-25 Maret 2017 meresmikan tugu km nol masuknya Islam ke Nusantara di Barus. Jamiyah Batak Muslim Indonesia (JBMI)

jadi sponsornya. Masyarakat menerima berita ini dengan haru dan bersyukur, tetapi tidak sedikit terbungong-bungong bertanya-tanya. Bagaimana dengan keputusan hasil seminar sejarah masuknya Islam di Indonesia 17 sd 20 Maret 1963 di Medan. Panitia seminar waktu itu diketuai Muhammad Said (Waspada), dan saya sekretaris panitia. Jadi saya turut kebingungan.

Kalau Dada Meuraxa masih hidup saya rasa dia akan melonjak kegirangan. Bukankah beliau yang “ngotot” memperjuangkan bahwa Islam masuk pertama kali di Barus. Hanya Buya HAMKA yang selalu menyabarkannya. Buku-buku mengenai Barus yang banyak ditulis arkeolog Prancis saya lirik kembali, tidak ada yang baru. Saat itu saya merasa ketinggalan zaman, saya ingin segera menghubungi Jamiah Muslim Batak.

Saya kontak Dr Siamu Manurung tidak berhasil. Seminar yang dilaksanakan di Aceh dan di tempat lain tidak ada yang menggugat tempat masuknya Islam ke Indonesia selain Aceh. Akhirnya Dr Ichwan Azhari (Ketua PUSIS Unimed Medan) menghubungi saya, dan menceritakan beliau telah kontak dengan ketua JBMI, sejarawan Unsyiah di Banda Aceh dan beberapa teman sejarawan dari UIN Jakarta serta tokoh-tokoh Balai Arkeologi Medan, saya sangat lega, karena tanggal pertemuannya telah ditetapkan.

Saya menghargai inisiatif JBMI melobi Presiden Jokowi sampai menghadirkan Beliau ke Barus dan memancarkan toggak km nol masuknya Islam ke Nusantara. Kejadian ini saya rasa merupakan tambahan “kemisteriusan” Barus. Karena selama ini jangankan presiden, seorang gubernur Sumatera Utara, sejak provinsi ini berdiri (seingat saya), tidak pernah melirik Barus untuk dikunjungi, apalagi memancarkan titik nol masuknya Islam yang pertama di Nusantara. Ini adalah prestasi politis bagi JBMI, tetapi dampak akademiknya, terpaksa kami harus memikulnya. Karena keputusan seminar yang digelar secara akademik 54 tahun yang lalu di kota Medan memutuskan lain.

Persisnya kesimpulan Seminar Sejarah masuknya Islam ke Indonesia 17 sd 20 Maret di Medan sebagai berikut: (1) Bahwa menurut sumber-sumber yang layak diketahui, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah (Abad ketujuh/kedelapan Masehi) dan langsung dari Arab; (2) Bahwa daerah pertama didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatra, dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat pertama berada di Aceh; (3) Bahwa dalam proses pengislaman selanjutnya orang

Indonesia ikut aktif mengambil bagian; (4) bahwa mubaligh-mubaligh Islam yang mula-mula itu selain sebagai penyiari Islam juga sebagai saudagar; (5) Bahwa penyiaran Islam di Indonesia itu dilakukan dengan cara damai; (6) Bahwa kedatangan Islam ke Indonesia itu membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian Indonesia; dan (7) Bahwa sebuah badan penelitian dan penyusunan sejarah Islam di Indonesia yang lebih luas dan tetap harus dibentuk. Dinyatakan supaya badan ini berpusat di Medan, sedang di tempat lain yang dipandang perlu dibentuk pula cabangnya teristimewa di Jakarta.

#### **d. Pertemuan Rekonsiliasi**

Kelompok kecil yang digagasi sejarawan Dr Ichwan Azhary telah bertemu dalam sebuah seminar terbatas di Unimed 6 April 2017, tokoh sejarawan dari Unsyiah, UIN Jakarta, Unimed dan Arkeolog Medan yang dihadiri ketua JBMI, mahasiswa jurusan sejarah Unimed dan UMSU, membentangkan pendapatnya masing-masing. Kami menganalisa pengertian “masuknya” Islam ke Indonesia dalam tiga kategori: (1) Seseorang yang beragama Islam masuk melangkahakan kakinya ke Indonesia; (2) Terbentuknya komunitas Islam pertama di satu daerah tertentu; atau (3) Munculnya peradaban Islam dalam bentuk kerajaan di daerah itu.

Kategori ketiga jelas adalah Aceh Kerajaan Samudera Pasai (sesuai keputusan Seminar Masuknya Islam di Medan 1963). Sedang yang pertama dan kedua bisa di mana saja. JBMI menyatakan mereka melihat kedudukan Barus sebagai Bandar tertua di Indonesia, yang telah berjaya setidaknya sejak abad ke 7, yang memiliki hubungan internasional, terutama dari Timur Tengah, sangat memungkinkan dan tidak dapat ditolak, salah satu saudagar atau ulama Islam dari Timur Tengah itu telah berkunjung ke Barus. Bahwa komunitas Islam kemudian berkembang dapat disimak dengan kehadiran jamaah Tuan Syech Abdul Rauf Fansuri. seminar dan pertemuan bersejarah ini ditutup tekad mensponsori Seminar Masuknya Islam ke Indonesia dalam cakupan lebih luas (seperti diamanahkan seminar Medan), setidaknya menetapkan masuknya Islam ke Indonesia dalam ketiga kategori tersebut di atas. Insyallah.

## 9. Tak Hilang Melayu di Bumi

Poros maritim, dimana deburan ombak memecah pantai, di sana ada masyarakat Melayu! Memang Melayu Tak Hilang di Bumi.

Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk memahami siapa orang Melayu. Pertama, apabila kita melihatnya sebagai sebuah kelompok etnis (suku bangsa), maka kita akan bertemu umpamanya dengan etnis Melayu Deli, Serdang, Langkat, Asahan, Siak, Betawi atau Banjar.

Asal usul kelompok-kelompok etnis ini beragam, karena dua atau lima keturunan di atas mereka, kita akan bertemu kelompok etnis lain sebagai asal usul nenek moyang mereka, seperti Karo, Simalungun, Aceh, Mandailing, Jawa, Banjar, Minangkabau, bahkan India-Pakistan, Arab atau Tionghoa, bahkan Portugis atau Belanda.

Banyak orang Melayu sekarang ini yang mempertahankan pendekatan ini, walaupun mereka mengakui bahwa nenek buyut mereka berasal dari berbagai kelompok etnis atau bangsa di atas. Apa yang menarik, nenek burut mereka dahulu masuk Melayu sangat beragam, yang jelas karena terjadi proses islamisasi atau perkawinan. Mereka yang masuk Islam berarti masuk Melayu. Islam dan Melayu, seperti dinyatakan antropolog Benedict Nagata (1964), disenafaskan (*once breath*) “masuk Islam masuk Melayu, masuk Melayu masuk Islam”

Menjadi Melayu berarti menjalankan syariat Islam dan hidup dalam budaya Melayu termasuk, adat resam Melayu, berbahasa Melayu, tinggal di kawasan Melayu dan mengaku Melayu (lihat hasil Kongres Melayunologi Tanjung Pinang, 1986). Ternyata mereka juga tidak melupakan rumpun kelompok asal usul buyut mereka, terutama setelah kemerdekaan, ketika kesultanan Melayu bubar dan tidak memiliki kekuatan politik dan ekonomi lagi dan proses Melayunisasi inipun terhenti.

Pada waktu Kongres Internasional Minangkabau dilaksanakan di Bukittinggi tahun 1985, kami dari rombongan Sumatera Utara terdiri dari M. Yusuf Sou'yeb, Sabaruddin Ahmat, Ibu Yo Mahadi, Tengku Luckman Sinar, dan beberapa anak muda dari Jurusan Antropologi USU. Beberapa hari setelah pembukaan seminar, ternyata Tengku Luckman sinar menghilang, sehingga kami tidak dapat memperkenalkannya dengan Gubernur Azwar

Anas yang waktu itu datang menjenguk penginapan kami di hotel Indira kota sejuik itu. Waktu beliau kembali, Kami akan berangkat pulang. Ke mana saja beliau menghilang, jawabnya santai "... saya ke Batu Sangkar, di sana saya diterima oleh ninik mamak dari ibu saya", "... kalau di Sumatera Barat ini saya kan menjadi orang Minang!" (sambil memperlihatkan tarombo yang dibawanya).

Lain lagi dengan Tengku Amin Ridwan (mantan Dekan Fakultas Sastra USU) yang mengatakan bahwa neneknya bermarga Tarigan (Karo). Cerita seperti ini akan banyak kita dapatkan, apalagi dari teman-teman Labuhan Batu dan Rantau Prapat. Sebab setelah kemerdekaan mereka cenderung memakai kembali marga Batak Toba, Sipirok dan Angkola seperti Harahap, Siregar, Panjaitan, Silalahi, Sihombing dst. Mereka bangga meluruskannya dengan pantun, kampak bukan sembarang kampak, tetapi kampak pembelah batu, Batak bukan sembarang Batak, tetapi Batak masuk Melayu. Sedang orang-orang Betawi Tugu sebagian besar adalah keturunan Portugis, sementara orang mengenal juga Belanda Depok.

Pendekatan kedua, melihat Melayu sebagai kelompok budaya bukan etnik atau suku bangsa. Pendekatan makro ini lebih mudah memahami siapa Melayu. Karena Melayu didekati dari sudut peradaban (civilisasi), tidak dari segi ras atau etnik. Kelompok Melayu seperti kelompok Mestizo di Amerika Latin yang dikenal sebagai komunitas "*literacis*" (terpelajar, berbudaya), warga negara kelas satu (tidak lagi bar-bar). Berbagai ahli antropologi, seperti Milner 2010, Andaya, 2000; Belwood, 1995 atau Adlaar 1985, menggunakan pendekatan ini, "*it's much be better understood in civilization, rather than racial or ethnic term*". Seperti di manakah kampung asal (*homeland*) penutur asli bahasa Melayu? Prof. Kern umpamanya dari dahulu bersikukuh menyatakan bahwa Indochina (Champa/Kamboja) adalah penutur asli bahasa Melayu, tetapi penemuan-penemuan arkeologi-antropologi yang terbaru (2000) telah menggeser pendapat itu. Kampung halaman Bahasa Melayu adalah Kalimantan (Borneo), pulau terbesar ketiga di dunia. Sedang penutur asli (autentik) bahasa Melayu adalah orang Dayak Iban (Kaltim). Dari sanalah arus migrasi bahasa Melayu ke Nusantara, termasuk ke pulau Jawa, Sulawesi, dan ke Utara Mindanao, kemudian bercabang ke NTB dan NTT. Sedang ke arah Barat mereka bermigrasi ke Sumatera, Malaysia dan terus ke Madagaskar.

Dari rute migrasi bahasa Melayu dapat dilihat betapa Sumatera pada abad ke 10-12 telah menjadi pusat Kesusasteraan Melayu, jadi sebelum lahirnya kesultanan-kesultanan Melayu Sumatera Timur, seperti pada era Kerajaan Haru (Sitor Situmorang, 2006). Sebelumnya, pada abad ke 7 Bahasa Melayu telah menjadi "*lingua franca*" untuk seluruh pantai Barat Sumatera yang berpusat di kerajaan Barus dan sampai sekarang tetap bertahan dan digunakan dengan nama Bahasa Melayu Pesisir atau Bahasa Melayu dialek Minang.

Ada 6 (enam) dialek bahasa Indonesia nusantara yang disebut Adlaar sebagai *the six descendant varians*. Umpamanya dialek-dialek bahasa Indonesia di Jawa memang berbeda dengan dialek Bahasa Indonesia Sumatera karena pengaruh yang berbeda, satu dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta (India) yang satu lagi dipengaruhi oleh bahasa Arab (Islam). Sebab setelah kemerdekaan orang Jawa sukar untuk menafsirkan umpamanya sajak-sajak Chairil Anwar, seperti "aku ini binatang jalang, dari kumpulan yang terbuang", "aku ingin hidup seribu tahun lagi", hambuslah kau aku tak peduli", Ayo Bung Karno kasi tangan, kita bikin janji", Ketika untaian kata itu telah menjadi sebuah sajak, maka dia telah terpaut erat pada dunianya sendiri, tidak dapat dipilah perkata lagi. Karena itu, orang yang tidak terbiasa mengenal dialek dan morfologi Bahasa Melayu Medan, akan sukar mengerti sajak Chairil (lihat Damiri Mahmud: Rumah Sembunyi Chairil, 2014).

### a. Melayu Baru, Melayu Nusantara

Prof. Ismail Husen (Ketua Gapena/Gabungan Penulis Malaysia) sebagai salah seorang pemuka Gerakan Melayu Baru, telah mengunjungi pantai barat Afrika dia bertemu dengan masyarakat pantai Timur Madagaskar, mereka sebagian besar adalah keturunan orang Banjar, agak berbeda dengan pantai Timur Afrika Selatan komunitas Melayu di sana adalah keturunan Bugis Makassar, pengikut-pengikut Syech M. Yusuf yang dibuang Belanda.

Komunitas Melayu ini sangat disanjung oleh Nelson Mandela (Presiden Afrika Selatan), karena dukungan mereka yang sangat gigih dalam perjuangan melawan apartheid. Yang mengagetkan kami juga keterangan Prof. Ismail Husen waktu beliau di Manila beberapa orang cendekiawan Filipina menyatakan

bahwa mereka juga adalah orang Melayu. Pernyataan seperti ini telah kami dengar juga waktu Seminar Internasional Sosiologi di Universitas Filipina (UPI-Makati). Bukankah di wilayah Timur Tengah seperti di Mesir tidak semua kelompok etnis di sana yang beragama Islam.

Berbeda pula dengan kisah orang-orang Jawa yang ditransmigrasikan Belanda ke Suriname (Amerika Selatan), setelah kemerdekaan diraih dari penjajahan Belanda, salah seorang Petinggi Suriname (Wakil Perdana Menteri, 1986) adalah orang Jawa yang fasih berbahasa Jawa. Pada setiap kongres antropologi (AIA) mereka mengirimkan utusan dan berpidato dalam bahasa Jawa Kromo. Uraian di atas menunjukkan betapa permukiman komunitas-komunitas Melayu telah tersebar tidak saja di nusantara, Malaysia, dan Filipina, tetapi juga ada di beberapa pantai Afrika dan Amerika Latin (Selatan). Kenyataan ini menunjukkan betapa luas jangkauan permukiman orang-orang Melayu di berbagai poros Maritim Dunia.

Adalah suatu ironi apabila kami menampilkan pengalaman bertemu dengan salah satu komunitas Melayu Singapura pada tahun 1976. Kami diundang untuk memberikan ceramah silaturahmi dengan komunitas Melayu Muhammadiyah Singapura (tidak ada hubungannya dengan Yogyakarta). Dalam pertemuan pagi hari, sekitar 70 orang Melayu Singapura memenuhi ruang pertemuan. Di tengah ruangan itu ada sepanduk dengan tulisan besar: "Tak Hilang Melayu di Bumi!" Kami agak terkesima juga membacanya, bukankah itu sumpah Hang Tuah, pahlawan Melayu. Kami bertanya pada Pengetua Pertemuan itu (Bapak Mochtar), mengapa slogan itu dipampang pada pertemuan ini. Beliau agak miris menjawabnya: "yah, encik juga dapat mengerti bahwa orang Melayu di Singapura ini tinggal kami-kami ini, yang lain telah banyak dikebumikan!"

Memang mereka telah mengukir sejarah sendiri bahwa Singapura adalah daerah Tumasik yang ditemukan dan dibesarkan oleh orang Melayu, tetapi sekarang benar seperti kata Pak Mochtar, hanya tinggal mereka yang belum dikebumikan. Masyaallah!. Kebetulan Singapura adalah salah satu poros maritim yang ditukar guling dengan Bengkulu antara Belanda dan Inggris yang melihat betapa strategisnya kedudukan Tumasik, dan ini penting untuk mereka, bukankah "*British rule the waves!*". Tetapi kekhawatiran bahwa Melayu akan hilang di bumi telah menyelinap ke hati sanubari

orang Melayu yang hanya tahu Melayu dari pendekatan pertama, yang hanya melihat Melayu sebagai kelompok etnik bukan sebagai sebuah civilisasi (peradaban) yang menguasai poros maritim nusantara. Pendekatan civilisasi ini telah dikembangkan kembali oleh Melayu Baru!

### **b. Poros Maritim Nusantara Menjajah Dunia Melayu**

Presiden Jokowi berkeinginan agar semua poros maritim di Indonesia dapat dikembangkan bersama industri galangan kapal, pertambangan, perikanan dan perdagangan nusantara. Poros maritim Indonesia bahagian Barat membentang dari lautan Hindia ke Selat Sunda, Selat Lombok, Maluku, Papua dan Australia. Nanti kapal-kapal kargo yang bermuatan lebih dari 5000 ton tidak mungkin melewati Selat Malaka lagi (karena lautnya bertambah dangkal).

Sebagai langkah pertama Jokowi ingin pelabuhan samudera Sibolga diperluas tiga kali lipat dengan kucuran dana pertama 286 miliar. Untuk mendukungnya di sana perlu didirikan Universitas Maritim. Artinya pelabuhan-pelabuhan laut yang lain akan menyusul seperti Meulaboh, Teluk Bayur, Bengkulu, dan Pelabuhan Ratu. Semua pelabuhan laut itu akan mempertemukan komunitas Melayu, karena di setiap sentra poros maritim, di mana deburan ombak memecah pantai, di sana ada masyarakat Melayu! Memang Melayu Tak Hilang di Bumi.

### **c. Pariwisata, Program Pembangunan Utama**

Salah satu dari delapan destinasi pariwisata Nasional adalah Danau Toba, yang telah disediakan alokasi dana pembangunannya dari pusat sebesar 1 (satu) triliun rupiah. Tetapi selain Danau Toba banyak objek lain yang dapat dijual kepada wisatawan. Apalagi, lapangan pariwisata dimana-mana sangat merakyat. Rakyat tidak memerlukan sekolah tinggi dan modal yang besar untuk melibatkan diri dalam proyek wisata. Walaupun daya tarik destinasi wisata itu Danau Toba yang merupakan unggulan sangat spesifik, tetapi selain Danau Toba semua kekayaan alam dan tenaga manusia “bisa dijual.”



Seperti hampir semua kegiatan budaya, kesenian, tarian nyanyian, teater tradisional Tilhang, mitologi dan cerita rakyat. Tidak hanya laut dan gelombng (untuk selancar), hutan, kebon, sayur mayur, buah-buahan, bahkan angin. Waktu saya di Langkawi (terletak antara perbatasan Malaysia-Thailand), wisatawan setiap hari sampai magrib, bermain layang-layang. Begitu capai mereka duduk makan onde-onde (buah Malaka) dan karas-karas serta minum air tebu atau kelapa. Pulau Langkawi itu dapat mendatangkan wisawan 4 (empat juta) orang setahun! Sama dengan wisatawan yang datang ke Bali, sedang Sumatra Utara hanya 400 ribu orang setahunnya, itupun karena ada Danau Toba. Biasanya sesudah sehari atau dua hari wisatawan terbang kembali ke Bali atau keluar negeri. Jadi, *“lenght of staying”* (lama seorang wisatawan tinggal di Danau Toba 1-2 hari saja).

Bagaimana caranya agar waktu tinggal ini dapat sampai 5 atau 7 hari? Bukankah rata-rata perhari seorang wisatawan menghabiskan dana \$100.00 (seratus dollars)? Caranya memperbanyak destinasi wisata di lingkungan destinasi utama wisata. Karena didekat Danau Toba telah dibangun bandara Internasional Silangit, maka usaha memperbanyak destinasi: *“from the lake to the mountain area, from themountain, to plantation, from the plantation to the beach, from the beach, to the town and then back to the air port.”* Dengan lima destinasi ini, seorang wisatawan akan menghabiskan semua waktu pakansinya di Sumatra Utara. Artinya dia akan menghabiskan bukan \$ 200,00, tetapi sampai 6 atau \$ 700,00 Itu artinya kalau wisatawan dapat datang setiap tahunnya 3 (tiga) juta orang saja, maka hitungannya:  $3.000.000 \times 5 \times \$100,00 = \$1,500,000,000$ .-

Belum lagi dari wisatawan domestik. Kalau ada sekitar 7.000 orang yang terlibat, maka mereka rata-rata akan mendapat tambahan penghasilan sekitar tiga puluh juta rupiah per-tahun. Pekerjaan yang terbuka untuk lapangan parawista ini juga beragam, dari penjual tiket wisata, pemandu wisata, perhotelan, kebon wisata. *home staying*, penjual souvenir, penterjemah, berbagai ragam kesenian dan budaya, rumah makan, jajanan sampai penyedia dan pendayung sampan atau motor boat. Jelaslah bahwa jarang ada proyek yang merakyat dan menebar keterlibatan secara massif seperti pariwisata.

Namun, yang perlu juga harus diperhatikan, pemerintah, para cendekiwan dan pemerhati sosial harus juga bekerja keras untuk menjaga dampak

sosial dari pariwisata ini, agar keaslian budaya jangan sampai tergadai. Dampak ini sangat penting, tentu saja masalah keamanan dan kenyamanan juga penting bagi semua yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Dalam banyak kasus hal ini selalu dianggap kecil dan remeh, tetapi akibatnya besar untuk keutuhan bangsa dan negara. Kita tidak ingin proyek pariwisata Indonesia terjerumus menjadi proyek wisata seks seperti di Thailand dan beberapa negara lain. Apakah konstruksi pemikiran seperti ini yang diharapkan para pemilih generasi muda dari para paslon.

#### **d. Konstruksi Pemikiran yang Cerdas**

Seperti dijelaskan di muka pemilih generasi muda yang akan berjumlah 40% itu sangat memperhatikan figur (paslon) yang memiliki konstruksi pemikiran seperti konstruksi pariwisata tersebut. Konstruksi seperti ini dapat dikembangkan pada bidang pertanian dan kenelayanan, bahkan kebidang bidang lainnya dalam ekonomi mikro seperti PKL dan pedagang menengah. Apalagi, Sumatra Utara memiliki ribuan hektar kelapa sawit, coklat, karet, dan tebu, tetapi mengapa industri hilir kita tidak berkembang? Apa salahnya? Mengapa kita selama ini merasa puas diri sebagai pengeksport bahan mentah saja? Pemilih generasi muda kita ingin mengetahui bagaimana pemikiran para paslonnya. Konsep-konsep detail pemikiran inilah yang mereka cari, teliti dari setiap paslonnya. Kalau ada benturan dengan konglomerat tertentu atau hambatan dari pemerintah pusat bagaimana mereka mengatasinya, apakah mereka tidak dapat berkoordinasi dengan para anggota DPR dan DPD asal daerahnya. Kenapa tidak mungkin, apa yang menjadi *handikap* (biang kerok-nya) selama ini?

Kalau mereka tidak menemukan figur pemikiran seperti di atas, mereka tidak tertarik pada hanya ketokohan para paslon atau pada partai-partai dimana mereka bertengger. Mereka ingin penyelesaian masalah ini telah difikirkan "*now and here!*" (sekarang dan disini). Maka, sangat disayangkan kalau mereka, memutuskan untuk tidak memilih atau menjadi golput! Ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi telah terjadi dimanca negeri. Obama di Amerika Serikat telah menemukan jumlah golput yang tinggi (47%), terdiri dari generasi muda, mellineal, para cendekiwan, artis dan pekerja seni lainnya. Obama menjadikan dirinya sebagai tokoh pemikir, bagaimana

mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, serta terpuruknya posisi Amerika dimata dunia. Beliau merinci programnya sehingga semua masalah itu terjawab “*now and here*” dan akhirnya beliau terpilih berturut dua kali dalam pemilihan, sebagai presiden pertama yang kulit hitam. Hak suara bagi setiap warga negara adalah inti yang paling penting dari konstitusi, sebab itu, hak suara itu tidak akan diberikan secara cuma-cuma, apalagi sebagai pecundang.





## WISATA DESA, DESA WISATA

**D**anau Toba, telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu dari lima Bali Baru atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Seperti diketahui, Danau Toba sebagai danau vulkanis terbesar di dunia dan danau terbesar kedua setelah danau Vitoria yang merupakan bahagian tiga negara, yaitu Tanzania, Uganda dan Kenya, bahkan danau Toba telah mendapatkan status “*Global Geo-park*” dari UNESCO pada 2019. Kawasan Danau Toba ini akan menjadi salah satu pusat pariwisata Internasional di Indonesia. Namun satu pertanyaan yang harus di jawab, apa yang “baru” dari Bali yang akan di bangun di Danau Toba sebagai “Bali Baru.” Apakah hanya sekedar menduplikat apa yang ada di “Bali Lama” itu?

Menko Luhut Binsar Panjaitan telah menetapkan dua kabupaten Danau Toba, Samosir dan Toba, untuk memulai wisata desa. Sepuluh desa di kedua kabupaten itu akan memulai debutnya sebagai desa wisata. Salah satu desa itu, umpamanya Desa Sigapiton, letaknya sangat strategis, bisa dicapai dari darat dekat air terjun Binangalon yang airnya bernuara ke Danau Toba, atau dari pelabuhan Ajibata. Desa Sigapiton yang dipenuhi oleh rumah-rumah tradisional Toba, dapat memberikan nuansa kehidupan asli masyarakat Batak Toba. Desa ini dahulu yang disinggahi oleh Raja dan Ratu Belanda, William Alexander dan Ratu Maxima. Sejatinnya, penetapan wisata desa ini merupakan sebuah *starting point* yang baik, dan sekaligus untuk menyahuti kegalauan pemikiran sebahagian penduduk sekitar Danau Toba yang tidak bersedia menjual tanahnya guna pembangunan Danau Toba, sebagai *resort* wisata Internasional.

## 1. Desa Wisata Menghindari Spekulasi Tanah

Sekilas seakan ada sekelompok pemilik modal besar yang ingin mencuri kesempatan untuk segera membeli tanah-tanah strategis di sekitar Danau Toba. Tentu saja maksudnya agar tanah di daerah itu segera dimiliki, seperti apa yang terjadi di Bali. Tanah-tanah strategis di *Resort* Nusa Dua, Sanur, Kuta, dan Ubud, sebelum pembangunan besar-besaran dilakukan, sebahagian besar telah jatuh ketangan pemodal dari Jakarta atau asing. Memang spekulasi ini banyak kebenarannya, apalagi dikaitkan dengan sejarah pembangunan Bali lima puluh tahun yang lalu. Tanah-tanah disekeliling pantai Bali telah jatuh ketangan pemilik modal dalam dan luar negeri, sehingga orang Bali sendiri, tersingkir ketika *resort-resort* itu telah menjadi lokasi wisata Internasional. Apa yang terjadi di Bali tiga-lima dekade yang lalu itu dapat disimak dan dipelajari kembali.

Wisata Desa sendiri, adalah *starting point* yang strategis, dimana masyarakat Danau Toba dengan yang ada padanya, mulai menerjunkan diri dalam pembangunan *resort* pariwisata ini. Dari *home stay* di desa wisata, mereka bisa mendirikan *bungalow* atau *cottage* dan kemudian hotel-hotel Melati, kepunyaan mereka sendiri. Mereka juga dapat mempersiapkan pargelaran seni tari, atau teater Tilhang, galeri budaya dan berbagai kerajinan lainnya, seperti pahatan patung dan kerajinan tangan yang akan dipamerkan sebagai sovenir kepada wisatawan.

## 2. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah

Sejarah telah mengungkapkan, bahwa kebijakan pemerintah pusat di Jakarta maupun di Denpasar (Bali), tetap mengutamakan pariwisata papan atas, yang dinilai lebih bergensi, lebih mudah diatur, dan dianggap lebih menguntungkan dari sudut perolehan devisa. Meskipun demikian tidak sedikit ahli ekonomi Bali yang berpendapat bahwa perhotelan Internasional yang dibangun secara besar-besaran di beberapa *resort* Bali, ternyata tidak menjamah masyarakat Bali, dan berada diluar kontrol mereka. Kami sendiri pernah melaksanakan seminar kependudukan Asia Pasifik disebuah hotel berbintang di Nusa Dua yang disponsori oleh Departemen

KLH Jakarta (1990) selama lima hari, sampai hari terakhir dan keluar dari hotel itu, kami merasa tidak pernah bertemu dengan orang Bali.

Bahkan pembangunan spektakular itu sesungguhnya, hanya memiliki rangsangan yang terbatas terhadap ekonomi daerah Bali. Para ekonom justru menilainya telah mendorong terjadinya impor-impor baru yang besar, dan menghabiskan devisa negara. Jelas manfaat yang jatuh kepada orang Bali sedikit sekali (Erawan, 2004). Jadi terdapat pertentangan antara pengusaha asing dan domestik (Bali) dalam industri pariwisata Indonesia: antara penanam modal dari Jakarta dan penanam modal dari Denpasar, dan antara pengusaha pada umumnya dan masyarakat Bali yang ingin menikmati hasil pariwisata secara bermartabat (Picard, 2006).

### 3. Wisata Desa Bali di Resort Ubud

Apa yang diutarakan diatas dapat dicek dari pembangunan *resort-resort* pariwisata Bali yang tersebar, seperti di Nusa Dua, Sanur, Kuta dan Ubud. Dari keempat *resort* raksasa ini, dari Nusa Dua sampai ke Ubud menggambarkan sekuen pembangunan raksasa yang menelan investasi besar, dibiayai dan dikelola oleh orang asing serta relatif tertutup terhadap orang Bali sendiri. Sementara, *resort* Ubud yang mengembangkan wisata desa, memaunculkan usaha-usaha kecil, padat karya dan memberikan tempat kepada masyarakat Bali sendiri. Oleh karena *resort* itu, dikelola oleh masyarakat Ubud sendiri. Sebab itu tidak mengherankan bahwa *resort* wisata Ubud merupakan dambaan Bali baru.

Di *resort* Ubud wisatawan dapat melihat dan melakukan *encounter* (berbaur) dengan masyarakat Bali, terutama dalam citra seni dan upacaranya, dari pada tempat-tempat yang memperagakan sex dan berselancar dipantai seperti di Nusa Dua, Sanur dan Kuta. Berbeda dengan di *resort* Ubud, wisatawan dapat melihat Desa asli Bali, bahkan seakan wisatawan dapat menemukan “Bali Tempo Dulu.!” Memang Ubud baru berkembang sekitar 1976, ketika listrik akhirnya dipasang didesa-desa Ubud. Desa-desa Ubud mulai berkembang pesat pada tahun 1980-an, ketika penginapan, restoran, butik, galeri serta bank dan biro perjalanan berdiri disepanjang jalan yang mulai di aspal (Picard, 2006).

Sejak itu pula *home stays*, *cottages*, hotel melati yang dikelola oleh orang Bali bermunculan. Baru kemudian pada tahun 1980, hotel berbintang muncul di *resort* ini dalam jumlah yang terbatas (20 kamar), sementara *homestays*, *cottage* dan hotel melati dari 450 kamar (1970) menjadi 2.200 kamar (1994). Yayasan Bina Wisata, selain mengkoordinir penginapan, juga mengkoordinir pertunjukan seni budaya (pertunjukan seni dan pengrajin), karena desa-desa di Ubud dimeriahkan dengan pertunjukan seni tari, pameran, galeri seni lukis dan budaya Bali. Di desa Ubud inilah wisatawan baru merasa “*encounter*” dengan orang Bali. Sebab itu desa Ubud diberi penghargaan pemerintah Bali sebagai “Desa Teladan Bali” (1982).



*Wisata Sawah Pematang Johar*

#### 4. Wisata Desa dan Desa Wisata

Pilihan Wisata Desa, seperti yang digambarkan dalam kasus *resort* desa Ubud bukan tidak memiliki resiko, seperti yang digambarkan diatas. Tetapi kalau desa-desa di kedua kabupaten Toba Samosir di Danau Toba sudah bertekad untuk mulai merintis Wisata Desa, dan membangun desanya sebagai desa wisata, maka bersiaplah untuk tidak populer, secepat apa yang mungkin diperoleh oleh *resort* wisata lainnya di Danau Toba.

Desa-desa di kedua kabupaten diatas dari segi antropologi termasuk desa yang budaya masyarakat Toba-nya lebih kental dari yang lain. Artinya mereka dapat memperkenalkan budaya asli Toba dengan rumah-rumah tradisional dan berbagai artefak peninggalan budaya mereka. Masyarakat di desa wisata itu harus memulai membangun "*home stays*," kemudian *cottages*, *bungalow*, dan balai-balai pertunjukan serta pertunjukan tetap seni budaya atau teater Batak. Balai-balai diperlukan untuk pameran hasil kerajinan (pahatan, tenun atau benda-benda sovenir lainnya). Pembahagian kerja dan koordinasi perlu dilakukan oleh Kepala Desa dan pemuka adat setempat. Siapa yang membuka *home stay*, siapa yang bertugas menyewakan sepeda, menyiapkan kuliner, pertunjukan, kebersihan dan sebagainya. Sedemikian, sehingga keindahan Danau Toba dan panoramanya, dipadukan dengan berbagai pertunjukan seni dan hasil budaya masyarakat Danau Toba tersebut, akan merupakan simponi alam yang akan memikat wisatawan. Memang kita tidak bisa hanya menjual "*view*" (pemandangan) Danau Toba saja, karena sesudah itu wisatawan akan pindah ketempat lain, *length of staying* mereka untuk tinggal di Danau Toba akan sangat minim.

Di kawasan *resort* candi Brobudur (Bali Baru kedua setelah Danau Toba), mereka juga memulai pembangunan *home stays*, *cottages* dan *bungalow*, sehingga wisatawan dapat menginap di kawasan candi. Sambil berjalan kaki dipagi hari, mereka dapat menikmati candi Brobudur yang diselimuti embun pagi. Presiden Jokowi telah menggelontorkan dana sebesar Rp.2,3 triliun untuk membangun infra struktur, memperbaiki dan memperlebar jalan dari Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) ke candi Brobudur melalui bedah Monoreh.



Tetapi *resort* candi Brobudur sampai saat ini, belum bisa menandingi resort pariwisata Angkor Wat di Kamboja, yang mampu menyedot 2,6 juta wisata manca negara setiap tahunnya. Sementara Brobudur masih tertinggal jauh 308.764 wisatawan asing (2019) (lihat Taman Wisata/WTC 2019). Ternyata kekurangan *resort* candi Brobudur. mengapa rata-rata “*length of staying*” (lama menginap) wisatawan hanya sekitar 1,2 hari, karena di *resort* candi Angkor Wat (Kamboja), wisatawan tersebut di hidangi oleh berbagai pergelaran seni budaya, sedangkan di Brobudur *home stay*nya, hanya sekedar tempat pindah tidur saja. Memang infra struktur menuju situs budaya itu perlu diperbaiki, tetapi apa yang ada disitus budaya itu bagi wisatawan lebih penting lagi.



Gambar Borobudur

Kita ingin mengucapkan selamat kepada desa-desa yang sedang membangun desa wisata, agar wisatawan desa dapat berkunjung dan menikmati simponi keindahan alam Danau Toba dan budaya masyarakatnya. Mungkin dikeheningan pandemi covid-19 corona ini, mereka lebih dapat konsentrasi. Jadikanlah desa-desa anda sebagai “desa wisata” sehingga wisatawan akan berkunjung sebagai “wisata desa,” semoga Danau Toba dapat dijadikan *Resort* Wisata Desa Internasional yang bermartabat.



## DESA WISATA SEBAGAI ALTERNATIF

**M**engembangkan pariwisata pedesaan dapat dianggap sebagai alternatif yang paling tepat untuk menghadapi situasi pacekelik rupiah yang semakin mengancam, terutama di tahun politik dan tekanan ekonomi global dewasa ini yang sukar untuk diprediksi pemulihannya dalam waktu yang singkat. Masyarakat dipedesaan kelak akan semakin rentan, walaupun berdasarkan data BPS tingkat kemiskinan di pedesaan sekarang telah menurun, tetapi itu lebih banyak karena program-program kuratif yang dilakukan pemerintah, seperti ketepatan waktu penyaluran bantuan sosial dan realisasi penyalurannya yang mencapai target.

Namun, seperti diutarakan oleh berbagai ahli, adalah sebuah ironi bahwa sebahagian besar penduduk desa yang memproduksi komoditas pertaniannya, tetapi untuk bahan pangan mereka sendiri harus membeli dari pedagang. Oleh karena bukan rahasia lagi petani menjual hasil pertaniannya, kemudian membeli hasil olahan pertanian tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Sebab itulah sektor pertanian yang menjadi tumpuan penduduk desa semakin kurang menguntungkan, meskipun produktivitasnya akan ditingkatkan setiap tahunnya. Apalagi luas lahan mereka, secara nasional rata-rata kurang dari 0,5 ha, sedang banyak petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri. Dapat dimaklumi pula, apabila pendapatan petani jauh lebih rendah dari upah minimum regionalnya sendiri. Sementara dimasa depan, lahan-lahan produktif yang ada semakin berkurang karena dialihfungsikan menjadi lahan kelapa sawit, jalan tol dan berbagai industri lainnya. Belum lagi berbagai bencana alam seperti hutan dan lahan yang terbakar ketika kemarau, gunung

meletus, gempa bumi dan tanah longsor, air bah yang selalu mengancam kehidupan mereka.

Desa-desanya kelak, tidak pelak lagi akan menjadi kantong-kantong kemiskinan bangsa. Sebab itu, diperlukan terobosan bagaimana meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka tanpa harus berurbanisasi atau menggantungkan diri pada bantuan sosial pemerintah. Salah satu cara yang paling efektif ialah memindahkan sentra industri ke pedesaan dengan pemanfaatan sumber daya alam lokal yang dapat menggerakkan perekonomian desa itu sendiri, yaitu mengembangkan pariwisata di pedesaan, dengan kata lain menjadikan desa sebagai destinasi wisata yang baru.

## 1. Desa-desanya Wisata yang Berdikari

Sekitar tahun 1979, sewaktu penulis melakukan penelitian disertasi doktor, mengitari desa-desanya dari Tapanuli Selatan sampai ke Sumatra Barat. Di Maninjau tempat kelahiran bebuyut penulis, para orang tua menemui penulis, untuk menanyakan apa yang penulis bawa dari rantau. Penulis jawab bahwa penulis masih sekolah. Sewaktu mereka mendengar penulis berkuliah di Universitas of Illinois di Chicago Amerika Serikat, mereka berpandangan satu sama lain. “Wah kalau begitu rantau anak telah jauh, datanglah ke surau kami dan disana nanti ceritakan, apa yang dapat kami lakukan disini dari rantau itu.” Penulis kaget juga apa yang harus diutarakan, tetapi penulis ingin menceritakan apa yang terjadi di tepi danau Erie, dekat Air Terjun Niagara. Bukankah penduduk di tepi danau itu mengembangkan semacam “*home stay*” (rumah-rumah pondokan) untuk wisatawan, sementara selama satu dua hari, mereka telah berenang dan bersenang-senang mengedari danau itu. Ternyata cerita yang penulis utarakan ini memikat beberapa kelompok penduduk yang berumah di tepi Danau Maninjau. Tiga tahun kemudian ketika penulis berkunjung kembali kesana. Mereka dengan gembira mengatakan bahwa usaha “*home stay*” mereka itu, Alhamdulillah telah berhasil baik. Banyak wisatawan asing (bule-bule) kata mereka yang datang dari Bukit Tinggi dan menginap sehari dua hari di rumah-rumah yang mereka siapkan. Penulis mendatangi rumah-rumah itu, cukup bersih dan menyenangkan, apalagi berada dibawah pohon-pohon yang rindang yang menambah keindahan danau Maninjau yang berada dihadapan mereka.

Makanan yang disediakan pun menurut mereka sangat digemari bule-bule itu. Waktu penulis tanyakan apa ada masalah? Mereka saling berpandangan. Salah seorang etek-etek sambil tersipu-sipu mengatakan, bahwa ketika bule-bule itu mandi, selalu saja ada beberapa anak-anak muda nongkrong melihat mereka. Penulis cepat memaklumi apa maksudnya. Oleh karena itu penulis nasehatkan agar mereka, pergi ke Bukittinggi untuk membeli handuk yang panjang, sepanjang tumit kaki sampai ke dada, setiap kali para perempuan bule itu hendak mandi, sodorkan handuk yang besar-besar itu untuk dipakainya. Bukankah ini masalah universal dari perbedaan budaya antar bangsa di dunia ini?

Begitu juga waktu penulis mengunjungi beberapa desa di Panguruan dan bertemu dengan beberapa orang *inang-inang*, mereka menceritakan bahwa dalam beberapa tahun ini mereka telah menerima tamu yang senang dengan berbagai pohon buah-buahan di pekarang rumah mereka, wisatawan itu tinggal bersama beberapa hari. Ternyata mereka tidak kehabisan tamu. Padahal tidak seorangpun dari mereka memasang advertensi, iklan atau pengumuman baik di kantor desa atau tempat lain. Oleh karena yang menjadi advertensi itu adalah berita dari mulut ke mulut para mantan wisatawan, kemudian beredar tanpa mereka sadari. Penulis belum menemukan semacam “*home stay*” di Tanah Karo atau Nias. Beberapa bekas mahasiswa penulis di Nias Selatan ada yang menceritakan telah ada *homestay* seperti itu di beberapa tempat, terutama di pantai-pantai tempat wisatawan berselancar. Memang di daerah itu sekarang tidak ada hotel berbintang, walaupun wisatawan asing yang berdatangan, ada diantaranya termasuk telah berkelas dunia.

## 2. Membangun Wisata Desa Batu Megalitik

Beberapa bulan yang lalu sewaktu penulis menghadiri peresmian Marga Zeboa di Gunung Sitoli, penulis menyempatkan diri menjelajahi pedalaman Nias. Penulis menemukan beberapa desa dimana banyak rumah-rumah penduduknya yang terdiri dari situs-situs gua batu besar purbakala zaman megalitik. Dihalaman muka rumah-rumah itu masih berdiri kukuh bangunan batu bersusun “menhir” untuk tempat pemujaan dan “dolmen” kursi raja dan para pembesarnya, serta tempat acara lompat batu Nias yang terkenal itu, serta susunan rumah tradisional yang mengagumkan. Bungkahan besar

batu-batu zaman Megalitik ini sangat langka di dunia. Penulis sempat menyarankan pada para petinggi di kabupaten Nias, agar diusahakan mendirikan “wisata rumah desa Megalitik” di daerah itu. Situs ini akan menarik wisata tidak hanya kelompok millineal domestik, tetapi terlebih lebih wisata dari mancanegara. Penulis memberikan contoh, bagaimana pemerintah Jerman Selatan menjadikan beberapa Desa di daerah Bayer Munchen, untuk dijadikan museum desa sebelum Perang Dunia Pertama (1920-an).

Apabila kita memasuki Desa itu, kita akan mendapati rumah-rumah kuno sederhana yang didiami penduduk Jerman ketika itu. Kelihatan masih asli dan utuh. Bahkan di dalam rumah yang terawat rapi itu, masih dapat kita temui bagaimana keadaan ruang tamu, kamar makan lengkap dengan piring, sendok dan garpu, kamar tidur, kamar mandi dan dapur mereka, dengan peralatannya. Bahkan kita dapat melihat kelambu, tilam dan bantal serta peralatan mandi, karena ada juga yang masih memakai sumur mandi biasa. Diperlihatkan juga cara-cara mereka mengolah makanan, menggiling gandum atau jagung dengan dua batu giling bundar yang dihela oleh kuda, begitu juga kincir air untuk keperluan air bersih dan listrik di desa itu. Yang menarik juga pekarangan mereka ditanami sayur mayur organik (yang tidak memakai pupuk buatan atau pestisida). Sayur mayur ini kemudian merupakan oleh-oleh para wisatawan yang berkunjung. Disekitar desa-desa itu juga dibangun toko-toko souvenir yang ramai dikunjungi wisatawan.

Pulau Nias, apabila mampu membangun desa-desa batu Megalitik seperti yang diajukan dengan contoh desa-desa Jerman di Bayer Munchen ini, akan memiliki daya tarik sendiri yang rasanya tidak ada duanya dimuka bumi ini. Memang potensi alam lokal sangat bervariasi di Sumatra Utara, dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai potensi wisata dan akan menjadi magnet baru dalam menggerakkan perekonomian desa. Berbagai contoh dapat disimak di Nusantara yang telah mengembangkan wisata desa, seperti Pantai Pasir Itam di Sabang, Desa Nyalo Painan Sumatra Barat, Desa Adat di Madobak Mentawai, Desa Taman Sari di Bayuwangi, Desa Pujon Kidul di Malang dengan wisata agro-nya. Pasar Seni di Ubud Gianyar, hingga Umbol Ponggok di Klaten.

Beberapa diantaranya desa-desa wisata ini, menurut Tasmilah (Statisti pada BPS Kota Serang-Republika) mampu menghasilkan Rp.6,5 miliar dalam

setahun. Yang menarik, dan diluar dugaan banyak orang, bahwa kebutuhan terhadap desa wisata ini sangat besar, terutama di kalangan kelompok wisatawan domestik terkait dengan gaya hidup milenial yang dikenal sebagai “*leisure economy*,” berupa rekreasi ketempat wisata pedesaan. Via sosial media mereka mengembangkan dan memperkenalkan lokasi-lokasi wisata desa ini dalam jejaring sosial yang telah menjamur di tempat-tempat tersebut.

### 3. Danau Toba sebagai Mega Proyek Wisata

Menurut rencana Menteri Pariwisata, rute Kuala Lumpur-Silangit mulai dioperasikan bulan Oktober 2018 dengan frekuensi empat kali dalam seminggu. Pembukaan rute Internasional ini akan mendorong investasi pariwisata di sekitar Danau Toba, karena itu juga pemerintah akan memperpanjang landasan di Silangit dari 2.050 meter menjadi 3.000 meter, dan memperluas apron dan bangunan terminal untuk mengakomodasi lebih banyak pesawat dan penumpang. Ternyata, perencanaan pengembangan Danau Toba dan sekitarnya sebagai objek pariwisata Internasional ini, masih banyak ditanggapi oleh masyarakat sekitar Danau Toba itu sendiri dengan sangat beragam.



*Danau Toba*

Sumber : [https://www.google.com/search?q=foto+turis+wisata+sumatera+utara&safe=strict&sxsrif=ALeKk01h-2obvJa0AheahE4WGgikLWHTg:1598165046319&tbn=isch&source=iu&ictx=1&fir=AkyB1IX\\_I59A-](https://www.google.com/search?q=foto+turis+wisata+sumatera+utara&safe=strict&sxsrif=ALeKk01h-2obvJa0AheahE4WGgikLWHTg:1598165046319&tbn=isch&source=iu&ictx=1&fir=AkyB1IX_I59A-)

Ada yang gembira, tetapi banyak juga yang was-was bahkan curiga, apakah mereka masih punya tempat dalam mega proyek itu. Mereka seakan akan tersisih dalam pengembangan pariwisata spektakular ini kelak. Kalau saja anda keliling Danau Toba dan melihat kekanan kekiri, ada saja yang datang dan bertanya apakah anda (mungkin seorang calo) yang sedang mencari lahan untuk mendirikan hotel atau bangunan. Seyogyanya pihak Pemda di tujuh Kabupaten sekitar Danau Toba dapat menjelaskan bahwa kita menginginkan berkembangnya ratusan desa-desa wisata di tujuh kabupaten yang mengitarin Danau Toba itu.

Oleh karena kita berhasrat memindahkan sentra industri pariwisata ke pedesaan dengan membangun desa sebagai pusat destinasi wisata itu sendiri. Jangan mereka bayangkan bahwa wisatawan-wisatawan mancanegara itu akan lebih senang tinggal di hotel-hotel berbintang, naik boat mewah berkeliling danau saja. Banyak yang memilih untuk mengunjungi desa-desa wisata, ketika masyarakat memang telah mencoba dan berusaha sejak sekarang membangunnya.

Penulis pernah tingal tiga hari di perkampungan Narumonda (1947) dekat Sitio-tio Porsea, menghadiri pernikahan guru penulis dari Kutacane. Kami tinggal di rumah adat dan makan bersama belingkar, dengan piring yang lebar-lebar. Mereka tahu penulis Muslim dan menghidangkan ikan danau Toba yang dibakar. Perhelatan itu sangat meriah. Tetapi yang menarik bagi penulis adalah acara tari-tarian dan acara nonton bareng teater tradisional Batak Tilhang.

Acara-acara seperti inilah yang sangat didambakan para wisatawan milenial dan wisatawan asing. Mereka akan tersipu-sipu pulang kenegerinya dan menceritakan kenangan indah di desa wisata ini. Ketujuh kabupaten yang melingkari Danau Toba itu memiliki potensi alam yang cukup menarik bagi turis dalam dan luar negeri. Dari perkebunan teh Simalungun, sampai ke perkebunan sayur, buah dan bunga di Tanah Karo atau membawa mereka berdendang ke Simalem, menjelajahi hutan dan air terjun serta berlayar mengelilingi Danau Toba.

Jadi jangan bayangkan turis akan mengalami apa yang akan dialami, ketika mereka berwisata ke Paris atau ke New York! Kita berharap dengan wisata desa dapat mengembangkan sumber daya alam lokal, termasuk potensi wisata yang dapat menjadi magnet baru dalam menggerakkan perekonomian desa, sehingga desa-desa tidak berubah menjadi kantong-kantong kemiskinan. Insya Allah!



## PEMBANGUNAN DARI AKAR RUMPUT: PARIWISATA DAN MASYARAKAT

Pembangunan dari akar rumput sebuah istilah yang dipopulerkan belakangan ini, karena banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemilik modal besar dalam dan luar negeri terutama dibidang pariwisata. Terutama pariwisata yang melibatkan rakyat banyak dan menghandalkan partisipasi mereka sepenuhnya. Bagaimana jadinya kalau pembangunan yang melibatkan masyarakat secara massal, tetapi dikendalikan oleh pemilik-pemilik kapital besar (konglomerasi), sehingga masyarakat seakan tidak berdaya dan melaksanakan apa yang dihendaki pemilik kapital. Masyarakat hanya sebagai sekerup-sekerup dari sebuah mesin raksasa yang berjalan.

Pertama kita tidak bisa lagi berbicara bahwa pembangunan itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Apalagi dalam pembangunan pariwisata yang seluruhnya menghandalkan partisipasi masyarakat secara “*all out*” (sepenuhnya), seperti Bali dan lima destinasi “Bali Baru.”

Mungkin tidak banyak pembangunan yang menghandalkan masyarakat, baik partisipasi atau dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Oleh karena pariwisata adalah mempertemukan orang dengan orang, masyarakat dengan masyarakat, mereka diminta untuk berintegrasi melakukan “*encounter*,” mereka melakukan akulturasi satu sama lain. Oleh karena dua atau lebih budaya bertemu satu sama lain, dan terjadi saling memberi dan menerima. Rasanya tidak ada tersisih celah untuk ditempati atau dikuasai secara penuh oleh kelompok konglomerasi. Namun demikian apakah hal tersebut benar



dapat terjadi diseluruh destinasi wisata, bukankah tanpa pemilik modal prasarana tidak akan ada, hotel mewah dan restoran, serta transportasi dan prasarana wisata tidak tersedia. Apa yang harus dilakukan?

## 1. Peran Pemerintah

Disinilah peran pemerintah sebagai penguasa, mereka harus berpihak kepada rakyat. Pembangunan yang berwawasan kerakyatan harus meningkatkan ekonomi kerakyatan, bukan pembangunan untuk konglomerasi (pemilik modal) saja. Memang pembangunan pariwisata “papan atas” lebih memberikan peluang yang besar kepada kelompok konglomerasi dan jaminan devisa kepada negara. Oleh karena bagi pemerintah memang lebih mudah dan leluasa mengorganisirnya serta *manage* hasilnya. Namun demikian bagi masyarakat pembangunan seperti itu, hanya sekedar untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh pemerintah untuk memutar roda perekonomian pariwisata. Hasil pariwisata itu sangat sedikit yang jatuh ketangan mereka, seperti yang dapat dilihat dari beberapa resort wisata di Bali dan beberapa tempat lainnya, malah tidak sebesar tenaga dan jerih payah yang mereka tumpahkan.

Menurut dari perhitungan kasar, sekitar 50% lebih pengeluaran wisatawan perkapita jatuh kepada hotel dan restoran, sedang lebih dari 25% untuk transportasi, sehingga yang jatuh ketangan masyarakat hanya sekitar 10-20%. Dengan demikian sebahagian besar keuntungan pariwisata jatuh ketangan konglomerasi. Memang limpahan devisa kepada negara dari pariwisata cukup besar dan karena itu, pemerintah sangat berkepentingan agar pariwisata dapat dikembangkan. Akan tetapi apa artinya bagi rakyat yang mengais di bawah, mereka tetap mendulang penghasilan yang paling kecil. Apalagi panorama yang indah dan mempesona yang mereka “miliki” tidak pernah diperhitungkan. Dan inilah yang terjadi di beberapa resort dan destinasi wisata seperti di Bali dan Brobudur atau Danau Toba.

Seharusnya porsi yang dikucurkan oleh wisatawan perkapita, harus lebih banyak jatuh ketangan masyarakat, bukan kedatangan konglomerasi. Ini hanya dapat terjadi kalau wisata desa sepenuhnya dapat dikembangkan, seperti di *resort* Ubud dan bukan Nusa Dua di *resort* pariwisata Bali.

Dimana masyarakat dapat sepenuhnya mengharapkan untuk mendulang porsi yang lebih besar dari pengeluaran perkapita para wisatawan.

## 2. Pembangunan sebagai “*Sosial Learning*”

Atas dasar pemikiran diatas, para ahli menekankan pentingnya pembangunan dijadikan sebagai “*social learning*” bagi masyarakat bawah. Mereka harus belajar dan dilibatkan dalam mengkalkulasi dan menghitung, serta membangun strategi untung rugi dalam bisnis pariwisata. Memang kelihatannya akan lebih mudah, kalau mereka menyerahkan membangun “*home stay*” atau bungalow dan pagelaran budaya kepada para kolemerasi sampai ke pedesaan. Akan tetapi akibatnya pembangunan itu tidak merupakan “*social lerning*” bagi masyarakat. Mereka hanya tinggal menerima jadi, dan kedudukan mereka hanya sebagai pekerja upahan. Yang diperlukan adalah “*community-based resource management atau cummunity management*” (Korten, 1986; Gde Pujaastawa, 2017).

Korten menunjukkan ada tiga alasan mengapa “*community management*” pada masyarakat sangat penting sebagai dasar pembangunan (lihat Gde Pujaastawa, 2017). Pertama, terdapat “*local variety*” (varietas lokal), yang tidak dapat diberikan perlakuan yang sama. Situasi dan kondisi daerah heterogen menuntut sisitem pengelolaan yang berbeda. Tentu masyarakat lokal yang sangat memahaminya.

Kedua, adanya *local resources* (sumber daya lokal), yang secara tradisional telah dikelola oleh masyarakat setempat dari generasi ke generasi. Pengalaman mengelola sumber daya setempat yang telah diwariskan secara turun temurun umumnya menimbulkan akumulasi pengetahuan tentang pengelolaan. Pengambilalihan pengelolaan ini akan dapat menimbulkan rasa ketersinggungan masyarakat dan masyarakat bersikap antipati terhadap proyek pembangunan.

Ketiga, *moral accountability* (tanggung jawab lokal), yang berarti bahawa pengelolaan yang dilakukan masyarakat setempat, biasanya lebih bertanggung jawab, karena berbagai hal yang mereka lakukan terhadap sumber daya akan berhubungan langsung terhadap kehidupan mereka. Pengelolaan oleh pihak luar kerap tidak mengandung kedekatan

moral dengan masyarakat lokal , sehingga tidak merasa mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi.

Dari ketika alasan diatas dapat dirasakan betapa pariwisata selama ini sangat berjarak dari masyarakat, karena itu usaha untuk melakukan pendekatan pembangunan pariwisata berdimensi kerakyatan terasa sangat penting dilakukan. Dengan demikian manfaat pariwisata akan berpihak lebih banyak kepada masyarakat ketimbang para kongloremasi dan para pemodal dari luar masyarakat setempat (lihat Brechin, 1991; Wells dan Brandon, 1992)

Seperti diketahui, pembangunan pariwisata berskala besar dan padat modal, umumnya sangat kurang melibatkan peran serta masyarakat setempat, bahkan sering mengakibatkan proses marginalisasi terhadap hak-hak komunitas lokal. Berkaitan dengan hal ini Cernea (1991), menyatakan bahwa baik dinegara-negara maju maupun berkembang masyarakat akar rumput sering merasa tidak berdaya untuk mempengaruhi pola-pola pembangunan pariwisata.

### **3. Pariwisata Berdimensi Kerakyatan**

Penerapan pariwisata berdimensi kerakyatan adalah membangun pariwisata dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jelas bahwa pemodal atau pemilik modal besar berdiri diluar pagar itu. Kendatipun modal diperlukan tetapi modal dialirkan atas dasar strategi perhitungan dari keperluan pembangunan dan si pemodal harus berada diluar pagar dari “rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.” Bukankah setiap kata yang diungkapkannya sebagai ucapan selamat datang kepada wisatawan keluar dari hati nurani dari rakyat sebagai “*host*’ pariwisata, bukan hanya sebagai pekerja wisata. Setiap langkah dari tarian yang diayunkannya dan setiap bait lagu yang dinyanyikannya berasal dari dada mereka. Oleh karena itu wajarlah kalau masyarakat itu benar-benar berkedudukan sebagai “*host*” dan sekaligus “pemilik” wisata itu.

Masyarakat jangan hanya dilihat sebagai pewaris dari bumi wisata dan alam yang indah yang telah menarik wisatawan untuk datang,

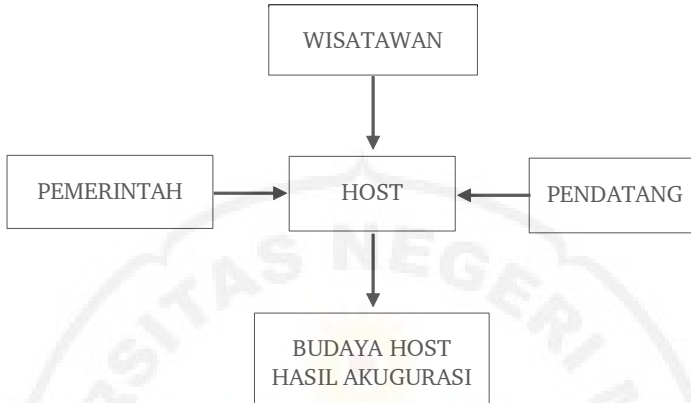
wajarlah kalau mereka dilihat tidak hanya sebagai pewaris atau pemilik bumi dan alam yang indah itu, tetapi pemerksa dan pelaksana warisan itu. Pendekatan dari rakyat oleh dan untuk rakyat ini akan menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai pewaris (*beneficiary approach*), tetapi sebagai pemeran utama dalam membuat keputusan dan melakukan kontrol langsung terhadap kebijakan yang mempengaruhi hidup mati pariwisata itu. Dengan demikian mereka berhak menerima keuntungan dan sekali gus kewenangannya (Cernea, 1991).

#### 4. Pariwisata dan Proses Globalisasi Budaya

Pariwisata mempertemukan beberapa ragam budaya, budaya tuan rumah (*host*), wisatawan, pendatang (pencari kerja) dan pemerintah Nasional dimana *host* berada. Pertemuan tiga komponen budaya tersebut mau tidak mau akan mendorong proses akulturasi satu sama lain. Pemerintah sebagai pemegang mandat untuk menerapkan *policy* budaya nasional (terutama dalam masyarakat pluralistik) seperti Indonesia, akan berusaha untuk menjaga proses akulturasi (perubahan budaya) tuan rumah (*host*), untuk tidak “kebablasan,” atau menjauh dari budaya nasional, terutama seperti Indonesia dari nilai-nilai budaya Pancasila.

Masuknya budaya yang beragam dari seluruh dunia, adalah konsekuensi yang logis dari pariwisata yang membuka diri secara global, semua budaya berdatangan seiring dengan masuknya wisatawan ke lingkungan budaya tuan rumah sebagai “*host*.” Pengaruh budaya asing kian terasa ketika perkembangan pariwisata telah mencapai tahap mass-pariwisata. Begitu juga kedatangan para pekerja dari dalam dan luar negeri, tidak dapat dibendung, karena aspek ekonomi pariwisata “*supply and demand*” mengundang mereka datang ke destinasi wisata.

Sket dibawah ini menunjukkan arus kontak sosial budaya dari tiga jurus kedalam tubuh budaya tuan rumah (*host*) pariwisata :



Ketika pariwisata yang telah sampai pada tingkat masif, dan tidak dipantau sejak awal, akan sulit untuk mengendalikan atau memitigasi dampak budaya tuan rumah ditengah jalan. Seharusnya ada strategi dalam mengantisipasi perkembangan pariwisata sebelumnya, agar budaya tuan rumah (*host*) tidak terlanjur tenggelam ditengah jalan. Desakan laju pariwisata yang didorong oleh perkembangan ekonomi dapat menyeret budaya tuan rumah dan akhirnya masyarakat tuan rumah tenggelam ditengah arus globalisasi seperti yang terjadi pada masa Eropah kedua atau mengarah kepada *Walkikinzation* (Seda, 1990:50; Noronha, 1976:177; Stanton, 1080).

Memang ada hal yang sebaliknya terjadi, bahwa kehadiran berbagai budaya global itu justru dapat memperkokoh budaya tuan rumah (*host*). Seperti apa yang terjadi pada kelompok etnik Ainu di Jepang. Kelompok Ainu yang minoritas ini berusaha keras untuk eksis ditengah masyarakat Jepang. Mereka memelihara dan mengukuhkan identitas mereka melalui revitalisasi budaya untuk dapat mempertahankan eksistensi mereka, ditengah budaya Jepang dan pengaruh internasional. Usaha ini, merupakan sebuah strategi keompok etnik Ainu untuk mendapatkan pengakuan sebagai kelompok etnis tersendiri. Mereka tidak menuntut proteksi politis apapun, tetapi agar dapat diterima sebagai mana adanya.

Kelompok Ainu membangun desa dengan ciri khas sendiri yang disebut "*chise*", dan mempersilakan wisatawan untuk tinggal dan menikmati kuliner gaya Ainu. Mereka memproduksi hasil kerajinan tangan sebagai pruduk Ainu dan mempersilakan wisatawan untuk membawa pulang sebagai souvenir

wisata. Mereka juga mendorong wisatawan mempelajari sejarah, mitologi, dan ritual Ainu. Ini adalah cara dan strategi kelompok Ainu untuk tetap bertahan dan terus berkembang dan tetap mempertahankan serta memperkuat identitas budaya Ainu.

Berbeda dengan Ainu, apa yang terjadi pada kelompok etnik Hawaii sebaliknya. Kelompok etnik Hawaii tenggelam dalam pangkuan modernisasi Amerika Serikat. Industri Pariwisata yang melimpah di kepulauan Hawaii, tanpa proteksi terhadap budaya Hawaii telah menyebabkan budaya masyarakat Hawaii itu, tenggelam dan kian terpinggirkan. Dewasa ini kelompok etnik Hawaii menjadi komunitas yang terisolasi dan menutup diri. Sekarang memang ada usaha untuk melakukan revitalisasi budaya dan reaktualisasi kelompok etnik Hawaii.

Dengan adanya arus akulturisasi budaya global dan kaum pekerja ke destinasi pariwisata, kedua arus diatas lambat atau cepat akan mempengaruhi keberadaan budaya tuan rumah (*host*), seperti apa yang terjadi pada kelompok etnik Hawaii atau Ainu. Keadaan ini, dapat diantisipasi kedepan terhadap pengembangan pariwisata delema destinasi Bali Baru di Indonesia. Apalagi kalau konsep dan strategi budaya pariwisata hanya menyandarkan diri untuk mengejar keuntungan ekonomi atau popularitas semata, mereka akan terjerumus kedalam petaka budaya. Pariwisata tidak hanya membawa anugerah tetapi juga musibah budaya dan harga diri masyarakat yang menjadi *host* wisata.

Dewasa ini banyak cendekiawan di bidang antropologi yang telah dan sedang mengkaji perkembangan dan kemajuan pariwisata di Bali. Memang dari segi popularitas pariwisata Bali termasuk “top” paling terkenal, malah orang lebih mengenal Bali dari pada Indonesia. Industri pariwisata di Bali merupakan pariwisata papan atas dunia.

Masalah yang dikaji oleh para antropolog, termasuk asal usul budaya Bali. Menurut Margaret Mead dan Bateson, budaya Bali sepenuhnya berasal dari agama Hindu. Budaya ini sekarang berada di tengah masyarakat yang bergama Islam dan Nasrani. Menurut kedua antropolog ini, lambat atau cepat budaya masyarakat Bali akan tenggelam kedalam pangkuan agama Islam atau Nasrani. Gejala-gejala kearah itu dapat dilihat sekarang

dari keberadaan agama Islam di desa-desa Buleleng. Di desa ini agama Islam sejak penghujung abad kedua puluh ini mulai berkembang dan dianut masyarakat Bali. Apakah budaya Bali tanpa agama Hindu akan tetap eksis memang dapat diperdebatkan, tetapi yang jelas sumber nilai budaya Bali adalah agama Hindu, apakah tanpa agama Hindu berarti budaya Bali akan tenggelam atau tetap eksis bersama pariwisata Bali?

Pekerja-pekerja asing dan domestik yang berdatangan ke Bali sebahagian besar beragama Islam, seperti kelompok etnik Arab yang bermukim di desa Buleleng, mereka menetap dan terjadi kawin mawin dengan penduduk asli Bali. Keturunan mereka sekarang adalah bahagian dari masyarakat Bali. Adalah menarik untuk mempertanyakan hipotesa Margaret Mead, apakah kelompok ini tetap mempertahankan budaya Bali dalam mengembangkan pariwisata disana. Ini masih merupakan problem dan pertanyaan yang perlu untuk diteliti.

Sementara itu, kita mempertanyakan kedudukan pemerintah dalam perolehan dan perkembangan kedepan budaya Bali, apa yang akan dilakukan pemerintah kalau budaya masyarakat Bali akan mengalami nasib seperti budaya etnik Hawaii? Atau dapatkah diharapkan bahwa pemerintah akan berusaha untuk mempertahankan eksistensi budaya Bali, seperti apa yang dicontohkan kelompok etnik Ainu di Jepang? Hal ini masih merupakan tanda tanya yang besar bagi bangsa Indonesia, apalagi Indonesia telah bertekad untuk menjadikan pariwisata sebagai tonggak utama kekuatan ekonomi Nasional.



## BALI, MASYARAKAT DI DESTINASI WISATA

**B**ali adalah masyarakat pariwisata pertama dan utama di Indonesia. Kekhasan ini, disebabkan reputasi pulau Bali sebagai “surga pariwisata.” Anggapan ini dibangun, menurut Picard (2006), karena wacana orientalis yang ingin melihat Bali sebagai “museum hidup” budaya Hindu-Jawa. Bali akan dijadikan kantong agama Hindu di Indonesia, ditengah negeri Islam terbesar di dunia. Sebagai sebuah museum adalah kewajiban bagi semua orang, termasuk pemerintah Belanda yang berkuasa ketika itu dan pendatang (turis) untuk mempertahankan kelanggengan “museum hidup” itu. Harapan ini agak sukar untuk diterapkan, karena Bali terletak di tengah kepulauan Nusantara, dipersilangan jalan (*cross road*), antara dua benua Asia dan Australia dan antara dua lautan Hindia dan Pasifik, yang ramai disinggahi dan di datangi para pelaut, pedagang, pelancong, penguasa asing dan berbagai kepentingan manusia.

Letak yang strategis itu menyebabkan masyarakat Bali menerima akulturasi kebudayaan Hindu dari pulau Jawa. Namun demikian masyarakat Bali itu secara menakjubkan luput dari upaya peng-Islaman dan moderenisasi Barat, dibandingkan dengan daerah-daerah lain, seperti Jawa Timur sendiri dan Pulau Lombok tetangganya. Bahkan penjajah Hindia Belanda terkesan sangat melindungi Bali dari guncangan-guncangan traumatis akibat penjajahan, seperti yang terjadi pada masyarakat di kepulauan Nusantara lainnya. Disamping itu sesuatu hal yang tidak dapat dianggap remeh, bahwa masyarakat Bali sendiri memperlihatkan suatu bakat istimewa, mereka sangat selektif



meyerap pengaruh-pengaruh dari luar. Orang Bali hanya memilih unsur-unsur yang cocok dengan nilai yang ada padanya dan kemudian dipadukannya, selaras dalam sistem budaya Bali sendiri (Picard, 2006).

Inti kebudayaan Bali adalah agama dan agama itu merupakan sumber utama nilai adat dan estetika, dari sumber ini pula sistem budaya, sosial, pribadi dan material dalam kehidupan mereka (lihat Parsons, 1969). Dari sistem material dapat diurut keatas ke sistem pribadi, terus ke sistem sosial, sistim budaya dan sumber nilainya: estetika adat dan agama. Agama adalah sumber nilai utama yang sangat dominan dan mewarnai adat dan estetika. Secara menyeluruh urutan itu dalam masyarakat Bali, sangat konsisten, padu dan sistimatik, sehingga payah untuk ditemukan kelonggaran atau celah yang bolong antara satu sama lainnya. Ikatan-ikatan itu dipertahankan melalui pura dan berbagai upacara, agar dewa-dewa menurut kepercayaan masyarakat Bali, memberi kekuatan dan kesatuan dalam kehidupan mereka. Ikatan leluhur masyarakat Bali, dapat diurut secara geneologis dengan teritorial dan pura-pura keluarga yang dihidupkan secara berkala.

## 1. Peranan Pura

Pura merupakan benteng-benteng yang menjamur, jumlah yang ribuan banyaknya tersebar dari pantai ke pedalaman masyarakat Bali. Upacara-upacara di pura inilah yang mengundang para dewa untuk turun dan bersemayam di pura dan berbagai candi. Oleh karena itu, desa di Bali merupakan, lebih dari kesatuan teritorial atau sosio politik, dia merupakan suatu perkumpulan keagamaan yang mempersatukan semua penduduk. Masyarakat Bali, terkait dalam tiga bentuk pura (Kahiyangan Tiga), yaitu: (1) Pura Puseh, tempat diadakannya upacara dewa-dewa pelindung dan leluhur-leluhur pendiri desa, (2) Pura Desa, tempat rapat dewan desa yang terkait dengan ritual-ritual kesuburan, dan (3) Pura Dalem, tempat pengaruh negatif arwah leluhur yang belum dibersihkan, dihilangkan dan dewa penguasa maut yang dipuja.

Kehadiran pura di Bali dewasa ini merupakan masalah. Terutama yang berada di daerah pantai seperti di Nusa Dua, Kuta dan Sanur. Orang Bali ingin agar hotel-hotel berbintang itu didirikan sekitar 40 meter dari

pura, tidak seperti sekarang hanya sekitar 5-6 meter dan dipagar tinggi, karena itu tidak kelihatan dari luar. Keadaan ini sering menimbulkan konflik antara masyarakat Bali dan penanam modal besar. Oleh karena itu, orang Bali tidak merasa nyaman dengan kehadiran pembangunan spektakular wisata, di berbagai resort internasional seperti di Nusa Dua, Kuta dan Sanur. Mereka seakan menjauhinya, kecuali yang bekerja sebagai tukang pijat atau yang menyediakan keperluan agar wisatawan bisa berjemur di pinggir pantai.

Dalam dua dekade ini orang Bali mulai dari Ubud mengembangkan *home stay* atau *cottage* desa wisata. Usaha ini kelihatan memberi harapan baru, wisatawan banyak yang menyenangi desa, mereka lebih serasi dengan kehidupan orang Bali seadanya. Sendra Tari dan peragaan hasil pahatan yang dijajakan di desa atau di pasar dekat *home stay* lebih menarik dikunjungi wisatawan dari pada yang dipajang di hotel-hotel besar.

## 2. Struktur Sosial Budaya Masyarakat Bali

*Banjar* adalah komunitas masyarakat Bali yang sesungguhnya. Suatu kesatuan sosial berdasarkan tempat tinggal, yang tidak hanya memiliki otonomi yang luas terhadap desa, tetapi juga berwenang dalam hukum, pajak, dan ritual, *Banjar* terutannya mengurus hal-hal yang terkait dengan kontrol sosial, ketertiban umum dan jenis kerjasama antar warga yang berkenaan dengan masalah umum dan kewajiban agama. *Banjar* khususnya untuk penguburan dan pembakaran mayat. Rapat Banjar dilaksanakan secara berkala dalam sebuah gedung terbuka yang disebut *Bale Banjar*. Pesertanya terdiri dari semua laki-laki yang telah menikah, yang memiliki hak terhadap Banjar. Rapat dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih secara dengan musyawarah mufakat (Geertz, 1956).

Meskipun hidup di sebuah pulau, orang Bali tidak berorientasi ke laut, seperti orang Bugis-Makassar, mereka berorientasi ke gunung. Mungkin juga karena lautan Hindia diselatan Bali itu, penuh dengan batu karang yang berbahaya, karena terjangan ombak yang ganas. Mereka menganggap Lautan Hindia yang berada di hadapan mereka sama sekali “tidak ramah.” Mungkin juga karena ruang sosial masyarakat Bali, diatur oleh sebuah

kosmos yang tersusun secara hirarkis, berdasarkan atas pertentangan yang saling melengkapi antara “dunia atas” (*kaja*), arah gunung khususnya Gunung Agung. Gunung itu dianggap suci, sumber kesuburan dan kehidupan, tempat persemayaman para dewata dan leluhur-leluhur yang didewakan – dan “dunia bawah” (*kelod*), yaitu arah laut tempat para setan yang ditandai oleh penyakit-penyakit dan maut. Konfigurasi kosmis ini, ditandai oleh arah aliran sungai: air bersih turun dari gunung ke laut dan laut menampung segala kotoran yang tertampung air dalam perjalanan ke hilir.

Suburnya tanah Bali dan kecekatan para petani Bali mengelolanya sangat mengesankan. Memang sejak lama petani Bali mampu mengorganisasikan hasil padi sawah yang beririgasi secara rapi. Sawah-sawah Bali yang tertata dan tersusun, baik di dataran rendah sampai ke bukit-bukit, menunjukkan kepriawaian orang Bali mengatur irigasi. Pembahagian air irigasi ke sawah sawah dilakukan oleh koperasi (*Subak*) yang bertanggung jawab atas pengaturan siklus budi daya padi. Padi sebagai objek pertanian sekaligus pemujaan, adalah sumber pangan dan acuan budaya Bali.

Tanah pertanian Bali yang terbatas dan tidak mungkin diperluas menyebabkan peningkatan produksi harus melalui penanaman padi jenis unggul dan bersiklus pendek. Dengan cara ini, malah Bali dapat mengeksport padi, tetapi dengan cara ini pula, orang Bali terlibat dalam perdagangan antar pulau, ketergantungan terhadap teknologi pertanian dan sirkulasi uang tunai. Semua ini, berpengaruh terhadap hubungan sosial budaya dengan orang luar Bali. Para petani memperluas kegiatan-kegiatan mereka diluar pertanian dan tanpa disadari, mau tidak mau, secara demografis, terbentuklah cadangan tenaga kerja yang melimpah dan murah.

Bidang kerja yang dapat menyalurkan tenaga kerja itu, tidak mungkin ke bidang industri atau bidang pertambangan, karena Bali tidak memiliki aset (kekayaan) dibidang itu. Tidak mengherankan pilihan lain itu jatuh pada pariwisata. Bidang ini dianggap satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan taraf hidup, yang dianggap semula, tanpa resiko yang dapat merombak struktur sosial-budaya masyarakat Bali. Tetapi tujuan pariwisata, baik di Bali atau dimana saja, dampaknya sebagai sesuatu yang tidak terelakkan, baik dimata orang Bali, atau

wisatawan maupun pemerintah. Dia adalah hasil perjalanan sejarah yang khas, sebagai suatu harapan dan ancaman.



*Bedugul Bali*

### 3. Kedatangan Wisatawan

Kedatangan wisatawan pertama ke Bali dibawa oleh kapal pesiar KPM dari Eropah. Mereka melihat Bali sebagai pulau dengan panorama yang paling indah, di pasifik tempat terakhir yang dapat dikunjungi. Bali dimata mereka sebagai pulau ditengah samudra Selatan yang sangat menawan. Mereka menganggap sebagai pulau Tahiti di Atlantik. Mereka tiba di Buleleng dan menginap selama tiga hari di Bali hotel dan disuguhi pertunjukan tari Bali. Rombongan ini dibawa tour ke beberapa tempat seperti Goa Gajah dan terus ke Tampaksiring dan gunung Kawi, melihat berbagai makam kerajaan di gunung Kawi, terus ke Kulungkung dan kemudian kembali ke Denpasar. Klimak acara tour mereka, adalah menikmati puncak kaldera gunung Batur. Setelah santap siang di pasanggrahan Kintamani, mereka bergerak kembali ke pelabuhan Buleleng dimana kapal mereka telah menunggu. Kepulangan mereka ke Eropah telah menghebohkan publik disana, bahwa ada syurga dunia di penghujung

lautan Hindia, melebihi Tahiti dilautan Atlantik, dengan manusia yang antik dan gadis-gadis berbuka dada yang cantik.

Antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, beberapa seniman dan cendekiawan asing bermukim di Bali, mereka banyak bergaul dan tinggal dipedesaan. Para pemukim asing ini banyak mempopulerkan wisata Bali ke Eropah dan Amerika, mereka menaikkan citra Bali dikalangan wisata asing. Mereka bermukim terutama di Ubud, sebahagian berpencar di Sanur dan Kuta. daerah-daerah ini kemudian menjadi destinasi dan resort wisata Bali yang terkenal. Mereka juga mendorong modernisasi kesenian Bali dari kacamata Barat. Bahkan, mereka menyebarkan kode-kode aestetis yang selama ini kurang diperhatikan, dan berusaha untuk menghasilkan bentuk-bentuk seni yang sesuai dengan selera peminat asing dan dapat diperjual belikan kepada mereka sebagai wisatawan (Picard, 2006).

Kehadiran pemerintahan kolonial dan orang asing banyak dirasakan oleh orang Bali sebagai kungkungan terhadap kemerdekaan dan keleluasaan mereka. Seperti dipemerintahan umpamanya, yang tersisa bagi orang Bali hanyalah seni dan agama. Bagi para antropolog seperti Mead dan Bateson (1992, 1993), dampak pengetatan ini, patut dilihat dalam kerangka psikologi kulturalis, karena telah menimbulkan semacam skizofrenia kultural.

Diluar orang Bali tampak seakan tenang dan seimbang, tetapi amukan yang muncul dalam bentuk kerasukan, kadang-kadang seakan mendapat jalan keluar dari tekanan kontrol sosial yang ketat, yang menghantui keseharian mereka. Seperti dalam adegan Legang dan sang Randa, sosok penari-penari muda yang anggun itu, kelihatan telah dihantui bayangan tukang sihir tua yang menakutkan, Menurut Mead dan Bateson, dalam adegan ini Bali telah menjadi "Pulau Dewata" sekali gus "Pulau Setan."

#### **4. Kontrovesi mengenai Kelangsungan Bali**

Sejak Bali "ditemukan" oleh para seniman dan para cendekiawan Eropah dan Amerika (1920), mereka melihat adanya kontroversi untuk menetapkan Bali sebagai "museum hidup" budaya Hindu Jawa. Dari namanya saja telah menyiratkan, bahwa Bali cepat atau lambat akan menghadapi ambang kejatuhan dan akan terusir dari "Taman Firdaus," yang memang tidak

mungkin untuk terus menerus dinikmati oleh orang Bali. The “Last Paradise” akan menjadi “The Lost Paradise,” bahkan Margaret Mead (1977) menambahkan, “Tidak banyak harapan untuk Bali, oleh karena sistem sosialnya berdasarkan agama, dan mau tidak mau itu akan pecah dihadapan agama Islam atau Nasrani, kalau tidak dihadapan kaum skeptis modern yang memuja industrialisme.

Memang orang Bali masih berpegang teguh pada tradisi dan pola hidup mereka, tetapi mereka terlalu terbuka terhadap segala gagasan yang dibawa orang ke Bali, baik oleh pedagang, misionaris atau wisatawan. Waktu gunung Agung meletus (1967) kami mengirim bantuan uang dari Sumatra Utara, sebagai tanda turut berbelas-sungkawa. Penguasa Perang Daerah Sumut waktu itu, menugaskan kami bersama seorang teman saya Husen Umar (yang kemudian menjadi Ketua Umum PII Sumatra Utara, dan setelah beliau pindah ke Jakarta menjadi Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Pusat), membawa uang tunai itu untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Bali di Denpasar. Setelah menyerahkan bantuan itu, kami dibawa saudara Husien Umar ke kampungnya di Bali, namanya Buleleng terletak dikaki gunung Agung. Ternyata saudara Husien Umar bapaknya orang Arab dengan ibu orang Bali asli. Dan di kampung Buleleng itu banyak orang Bali yang beragama Islam. Dengan kenyataan ini, terbukti tidak mungkin ada “museum hidup” tanpa perubahan, baik di Bali atau dimanapun. Namun demikian bagaimana perubahan itu harus *dimanage* dan dikelola, disitulah perlunya ilmu pengetahuan, teknologi dan keimanan yang teguh dalam memitigasi dampak perubahan itu.

## 5. Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata

Kaum cendekiawan Bali terutama dari Universitas Udayana nampaknya terbelas dua, atau setidaknya tidaknya tidak bisa menyatukan pendapat mereka dalam menilai dampak pariwisata terhadap budaya Bali. Disatu pihak mereka mendukung pengolahan sumber budaya Bali, demi pengembangan pariwisata internasional, sejalan dengan kepentingan Nasional Indonesia.



*Tanah Lot*

Namun demikian, disamping itu kelompok lain menyayangkan ketika menyadari bahwa bahaya dampak pariwisata terhadap struktur sosial masyarakat Bali, mereka melihatnya seperti penyakit menular yang menyusup ke desa-desa Bali, yang menimbulkan sengketa dan kecemasan. Masyarakat Bali menurut pendapat mereka ini harus kuat menghadapi serangan ini, karena pariwisata dimata mereka, merupakan hidup mati masyarakat Bali. Pendeknya pariwisata tampak baik sebagai penyakit maupun sebagai obat, sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan sekaligus sebagai sesuatu yang dapat ditampik. Pariwisata dapat berperan sebagai penggerak pembangunan dan perangsang modernisasi yang didamba-dambakan dan sekaligus juga yang dikhawatirkan dapat meruntuhkan masyarakat Bali.

Ungkapan yang kontroversial ini, seperti yang diucapkan oleh Hanna maupun McKean (1972,1973), terutama dalam bidang kesenian Bali, bahwa pariwisata telah mengkomersialkan produksi kesenian, sambil merangsang kreativitas mereka. Memang pada umumnya para cendekiawan dan seniman Bali berpendapat, bahwa pariwisata memiliki andil yang

besar dalam ruang ekonomi dan keuangan yang mempercepat stratifikasi sosial masyarakat Bali.

Nada penyesalan itu kian lantang, yang dianggap sebagai pencemaran terhadap agama, seperti para turis yang memasuki pura-pura pada waktu acara orang Bali berlangsung, dengan menyempretkan kilauan kamera-kamera dari wisatawan dan wartawan. Padahal mereka melarang umpamanya, perempuan Bali yang tidak suci (kedatangan haid) untuk memasuki pura. Namun sebaliknya, rasa ingin tahu wisatawan terhadap agama Bali itu, juga memberikan rasa bangga mereka. Apalagi kalau dipikirkan, berapa banyak biaya yang diberikan wisatawan terhadap perawatan pura mereka. Demikianlah nilai budaya dan nilai ekonomi itu telah saling berhadapan.

Apalagi, harga yang harus dibayar orang Bali untuk meningkatkan “tarafhidup” mereka, kalau dihitung mungkin akan sama dengan pencemaran “tata hidup” keagamaan mereka, suatu dilemma yang harus mereka pikul berketurunan (Hanna 1972, Mc Kean 1973, dan Picard 1992).

## 6. Sendra Tari dan Berbagai Atraksi Pariwisata

“Kebudayaan Pariwisata” telah muncul ditengah masyarakat Bali, padahal mereka telah diingatkan agar selalu waspada dalam menggunakan simbol-simbol agama sebagai daya tarik untuk wisatawan. Seperti memanfaatkan patung, benda-benda ibadah (sakral) atau hiasan pura menjadi hiasan dekorasi hotel, restoran atau butik. Hal ini dianggap sebagai eksploitasi yang berlebihan untuk pariwisata. Apalagi seperti acara pernikahan dalam adat Bali untuk pasangan bintang selebritis terkenal seperti Mick Jakker dan Jerry Hall, yang dilakukan seorang pedanda Bali di Ubud. Dan satu hal lagi, yang paling merisaukan mereka adalah mempertunjukkan tari-tarian sakral untuk konsumsi pariwisata.

Kegalauan ini menyebabkan mereka, mencoba harus memisahkan tarian (sendra tari) sakral (untuk keperluan orang Bali sendiri) dan tarian untuk pariwisata yang harus segera diciptakan. Tarian untuk pariwisata bukan tarian sakral untuk pada dewa, tetapi tarian untuk



kebutuhan mereka sendiri dalam menyambut tamu atau wisatawan yang datang ke Bali. Memang orang juga ingin tahu apakah orang Bali mampu menciptakan dan membedakan antara tarian “sakral dan profan.”

Para antropolog menyatakan bahwa persembahan tarian (sendra tari) dan pertunjukan seni Bali adalah untuk para dewa. Persembahan itu dilakukan dalam upacara keagamaan (*yadnya*), yang tersebar ditengah kegiatan sehari-hari : seperti *adalan*, *msnusa yadna*, *ngaben*, *panglukatan*, dan lain-lain. Tarian-tarian itu dipersembahkan dalam upacara adat atau agama, dan berfungsi sebagai persembahan pribadi para penari. Tarian atau sendra tari itu, sekaligus sebagai kewajiban komunitas jamaah pura yang bertanggungjawab atas pelaksanaan itu. Semakin sempurna persembahan itu semakin puas para dewa.

Mungkin pembahagian tarian dan persembahan dalam kategori pemilahan paradok antara sakral dan profan tidak dikenal sampai sekarang di Bali, sehingga para antropolog melihat tidak sesuai untuk jalan keluar guna menentramkan orang Bali. Bahwa tarian itu, menurut mereka, seperti ditulis oleh Tyra de Kleen (1921), merupakan tarian persembahan untuk para dewata dan sekaligus juga hiburan untuk manusia, termasuk diri sendiri dan wisatawan.

## 7. Dampak Perubahan di Destinasi Wisata

Dari uraian di atas dapat disimpulkan apa dan bagaimana dampak perubahan sosial budaya di destinasi wisata Bali, dan mungkin juga terjadi di destinasi wisata lainnya di Indonesia, sebagai berikut :

### a. Dampak di Destinasi Wisata

Luas keseluruhan pulau Bali 5.632 km.2, kira-kira 1/7 dari Switzerland, wilayah destinasi negara terkenal di benua Eropah. Pengunjung wisatawan manca negara, setiap tahunnya hampir sama dengan pulau Langkawi Malaysia, yaitu 4-5 juta, tetapi pariwisata merupakan penghasil devisa terbesar di Indonesia. Pada tahun 2020 ini diharapkan pelonjakan wisata menjadi 10-15 juta orang.

Seperti dapat disimak di atas dampak wisata terhadap masyarakat Bali, dapat dilihat pada : (a) *life style*, nilai budaya dan *world out-look* (pandangan dunia) masyarakat, (b) transportasi, (c) penghasilan per kapita, (d) pendidikan, dan (e) properti (kekayaan). Sebelum wisata berkembang di Bali masyarakat di daerah pegunungan rata-rata lebih makmur dari yang berada di pantai. Sekarang masyarakat pantai lebih banyak mendapat kesempatan kerja, dan kontak dengan pariwisata. Namun demikian seperti diketahui, masalah pendidikan dan keterampilan masih tetap menentukan penghasilan.

Memang terdapat perbedaan antara turis di Timur seperti Bali dan Indonesia pada umumnya dengan di Barat seperti di Switzerland. Pada umumnya turis di Barat disamping menjual keindahan alam dan budaya, tetapi mereka menggunakan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) untuk melindungi budaya dan kerusakan alamnya. Seperti mengelilingi Eropa dengan kereta-api cepat dan dapat menyinggahi beberapa negara, atau bermalam di daerah-daerah musim panas atau main ski di musim dingin. Semuanya dapat dilakukan dengan mudah dan dalam waktu yang lebih efisien dan menyenangkan.

Begitu juga untuk “*shopping*” di kota, seperti di Melbourn (Australia), dengan peta yang lengkap, kita dapat mengelilingi kota itu dengan kereta-api (trem) yang gratis, ke toko buku, restoran atau pusat perbelanjaan tertentu. Begitu juga kalau kita mengunjungi ke Great Barrier Rief (dunia batu karang di dasar laut Australia Utara). Kapal yang terbuat dari kaca dan alumenium yang kita tumpangi menyelami dasar laut, membantu kita untuk menelusuri dunia batu karang yang sangat indah didasar laut. Kita tidak hanya dapat melihat aneka ragam batu karang, tetapi juga penghuninya, berbagai jenis ikan dan binatang laut yang mempesonakan, seperti di Bunaken Minahasa. Atau mengitari gunung Fuji di Jepang pada musim dingin dengan kereta-api, suasana dan kegiatan kita dapat berpindah dari satu bungalow ke-bungalow yang lain, untuk melihat keindahan alam dan beristirahat dengan berbagai alunan atraksi budaya Jepang yang nyaman dan mempesona.

Berbeda dengan di Indonesia, parawisata kita sangat rapuh, kerana penguasaan teknologi yang rendah, dan SDM yang juga berpendidikan

minim. Masa depan pariwisata Indonesia diharapkan tidak hanya menghandalkan seni-budaya dan keindahan alam tanpa penguasaan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi).

### **b. Perbedaan Cara Berfikir Masyarakat**

Penguasaan ilmu dan teknologi berdampak pada cara berfikir masyarakat dan pandangan dunia (*world out look*). Masyarakat tradisional yang penguasaan IPTEKnya rendah, selalu tidak berfikir secara kritis (*unconcius and practical konowledge*), berbeda dengan masyarakat maju (*modern society*), yang mengutamakan *emperical knowledge*, dan dibantu dengan perkembangan media dan pandangan dunia yang lebih luas (*globalization*).

Seperti masyarakat Bali yang tinggal di daerah pesisir pantai, sangat cepat terkena dampak wisata (*beach tourism*), karena para wisata membawa proses globalisasi dihadapan mereka, karena itu dampak langsung akan mereka terima, baik dalam bidang pekerjaan, budaya dan kehidupan mereka secara menyeluruh, dibandingkan dengan orang-orang Bali yang tinggal didaerah pegunungan (*mountaining areas*), yang bertani dan berkebun. Mereka menerima dampak yang lebih sedikit, sehingga perubahan-perubahan karena dampak wisata dalam kehidupan mereka sangat kecil dan mudah mereka olah.

Beberapa tipe pengetahuan dapat berbeda dalam penerimaan dampak wisata, seperti pengetahuan yang tidak disadari. Banyak petani yang sehari-hari mengolah sawah atau ladangnya, tidak merasakan adanya perubahan. Memang dengan berlangsungnya perjalanan waktu, pasti terjadi perubahan. Dampak kehadiran pariwisata secara keseluruhan telah membawa perubahan bagi masyarakat Bali, baik secara fisik maupun psikis. Walaupun tidak seperti yang dirasakan oleh pekerja-pekerja di bidang industri yang menggunakan pengetahuan praktikal, pekerjaan mereka banyak yang terkait dengan perubahan teknologi. Di bidang industri, berlaku "*practical and emperical knowledge*," yang berdampak pada kesadaran praktikal dan efisiensi serta filsafat yang alami. *Practical dan imperical kowledge* sangat berhubungan dengan perkembangan

dan kemajuan IPTEK, media dan globalisasi (apa yang dikerjakan dibelahan dunia lain).

### c. Perubahan kehidupan di destinasi wisata

Turisme di Indonesia memang dimulai dari pantai, daerah pantai merupakan sasaran eksploitasi untuk destinasi pariwisata, apakah untuk mendirikan hotel, restoran atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu masyarakat pantai merupakan sasaran utama dari perkembangan turisme. Nelayan di Bali sebahagian besar tidak punya tanah dan rumah. Rumah mereka digusur dan harus pindah ke tempat lain yang lebih jauh, bahkan tempat mangkal perahu-perahu mereka juga turut digusur. Padahal penghasilan mereka tidak terserap oleh hotel-hotel yang dibangun itu. Sementara modernisasi peralatan nelayan tidak menjadi perhitungan pemerintah. Kecuali mereka yang memiliki tanah yang luas, kaya mendadak dan menghilang dari masyarakat Bali (seperti di Bintang Utara, sesudah menjual tanah tinggal di Singapura).

Pura Bali di pantai tempatnya tidak digusur, tetapi jadi kepepet, ditembok 4 meter oleh hotel dan restoran. Sementara itu pejalan kaki, suvenir dan banyak restoran mini banyak yang ditangani oleh masyarakat pendatang. Hanya pengrajin dan seniman Bali yang memiliki penghasilan lumayan. Masyarakat terpelajar Bali cepat diserap proyek turis (hotel, *guide*, hiburan, travel biro), dan mereka dapat memasarkan hasil kerajinan dan seni kepada turis.

Pemerintah menggalakkan budi daya rumput laut (*sea-weed*), terutama bagi masyarakat pantai yang tidak mungkin bertahan hanya sebagai nelayan. Memang orang Bali bukan seperti orang Bugis Makassar, yang suka mengharungi samudra, mereka bukan pelaut. Dalam penanaman rumput laut, ternyata Lombok lebih berhasil dari Bali, memang kadang-kadang budi daya rumput laut juga tidak menggembirakan, karena keadaan laut tidak selalu stabil.

Dapat disimpulkan bahwa hanya sebahagian kecil orang Bali yang mendapatkan penghasilan dari pariwisata. Sebab, penghasilan ini ditentukan oleh pengetahuan dan kecakapan mereka, seperti penguasaan bahasa

Inggris (asing), sikap keramahmataman hidup bersama turis, kecuali mereka yang memiliki akses dalam transaksi dagang. Konflik sering terjadi antara pembangunan dan kenyamanan orang Bali hidup dan beribadah (seperti dalam pembangunan Hotel Nirwana). Orang Bali ingin agar hotel dibangun dengan jarak 2 km dari pura atau *temple*, tapi ternyata dipaksakan hanya sampai jarak 40 meter.

## 8. Konflik Pengusaha dan Masyarakat Bali

### a. Masalah Pekerjaan

Terutama masalah lowongan kerja yang terbuka selama Bali menjadi destinasi wisata internasional, banyak lowongan kerja yang terbuka itu tidak diberikan kepada orang Bali (penduduk lokal), tetapi diberikan kepada orang lain. Sebab utama karena yang empunya kerjakaan mempertimbangkan faktor-faktor kecakapan, pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan. Ternyata orang luar Bali rata-rata dari ketiga faktor tersebut berada di bawah mereka. Namun banyaknya orang luar yang berkerja menimbulkan banyak masalah dan keresahan di kalangan orang Bali. Waktu-waktu yang diperlukan orang Bali untuk melakukan kegiatan agama di Pura misalnya, dianggap salah satu sebab orang Bali tidak dapat konsentrasi dengan pekerjaannya.

Para turis yang berdiam di hotel-hotel besar jarang dapat bertemu dengan orang Bali (asli). Perubahan pandangan dunia (*world out look*), unpamanya terhadap kehadiran hotel dan para turis dengan keberadaan pura dan keluarganya, mengapa keduanya bisa hadir di Bali dan mengapa pula para turis ingin menyaksikan kehidupan mereka di Pura. Perubahan-perubahan ini, untuk memahaminya memang tidak hanya memerlukan waktu, tetapi juga memerlukan perubahan horizon berfikir dan hal ini ternyata lambat terjadi pada orang Bali.

### b. Masalah Tanah

Masalah tanah terkait dengan faktor “tempat dan waktu,” konflik dapat muncul karena masalah *temple* dan pura. Orang Bali merasa

tempat-tempat yang strategis dimana *temple* dan pura berada tidak boleh diganggu gugat atau dipindahkan, bahkan juga terlindung oleh bangunan yang diperlukan oleh pariwisata, seperti pendirian restoran, hotel dan tempat kegiatan lain. Memang berbagai peraturan telah dikeluarkan Pemerintah Daerah, tetapi pada kenyataannya selalu saja dilanggar dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.



*Bali Bedugul*

Sumber : <https://www.google.com/search?q=foto+wisata+Bali&tbm=isch&ved=2ahUKEwjU94vj3LDrAhVLMsSKHd2tAKYQ2->

## 9. Masa Depan Orang Bali

Perubahan sosial yang berjalan cepat dan proses globalisasi yang dibawa turis, menyebabkan orang Bali tidak mungkin terus menerus mempertahankan diri dengan menjual budaya dan kekayaan alamnya, tanpa usaha :

- a. Memodernisir pertanian, selain padi sawah, juga mengembangkan pertanian rumput laut, dengan jenis baru yang lebih unggul dan teknologi pertanian yang lebih unggul, serta pemasaran yang dapat diterima masyarakat.

- b. Orang Bali tidak akrab dengan laut, karena itu masa depan sebagai nelayan atau pelaut tidak mungkin banyak diharapkan (tidak seperti orang Bugis-Makassar).
- c. Pekerjaan mereka yang melibatkan diri dalam industri pariwisata sangat terbatas menjual budaya (sendra tari, kerajinan seni pertunjukkan, seni ukir dan lukis). Pekerjaan lain tergantung pada laju proses pendidikan orang Bali.

Masa depan masyarakat Bali dan budayanya akan suram, kalau pendidikan generasi mudanya tidak dapat menandingi para pendatang, terutama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka akan tetap menjadi penjaja budaya.



*Sebuah Masjid di Bali terlihat seperti Pura*



## **WISATA : MAMPUKAH KITA BERMIMPI SEPerti DI BALI**

**T**ajak rencana Harian Waspada, Sabtu tanggal 1 Juli 2017 mengenai kunjungan Obama dan keluarganya ke Bali dan tidak ke Danau Toba sangat menggugah kita semua. Kenapa beliau ke Bali tidak ke Danau Toba, bukankah dari segi panorama, Danau Toba puluhan kali lebih indah dan menggetarkan hati dibandingkan dengan Bali. Kalau Bali diumpamakan sebagai “sepenggal syurga” di dunia, maka Danau Toba, mungkin lebih dari “satu hektar syuga” yang diciptakan Tuhan di dunia fana ini. Tetapi mengapa Obama dan keluarganya tidak merilirik Danau Toba? Apalagi sejarah terciptanya kaldera danau Toba, konon dari letusan gunung Toba puluhan ribu tahun yang lalu, yang telah mengorbankan hampir setengah penduduk dunia ketika itu. Pertanyaan serupa dapat juga ditujukan kepada puluhan bahkan ratusan kepala negara, dan selebritis dunia lainnya, seperti Salman Abdul Aziz, Raja Saudi Arabia dengan puluhan pengikutnya yang berhari hari mengabdikan liburannya di pulau dewata itu. Bahkan kepala-kepala negara Asia Tenggara yang lebih dekad, seperti Perdana Menteri Malaysia, Singapura atau Raja Brunei Darussalam. Dan tidak terhitung para bintang selebritis dunia yang tidak hanya sekedar singgah, tetapi bermukim dan berakting disana. Apa yang salah dengan Danau Toba?

Tidak ada yang salah dengan Danau Toba, yang harus dipertanyakan adalah manusia yang dianugerahi Tuhan tempat di Danau Toba itu, terutama para pejabatnya. Sadarkan mereka apa kewajiban yang dipundakkan Tuhan dalam mengelola tanah yang indah seperti syurga itu, agar dia mendatangkan



kemashalatan seperti Bali? Mampukah mereka membaca apa yang dimimpikan oleh seorang wisatawan yang telah mengeluarkan dana yang mungkin telah ditabungnya bertahun-tahun, dan siap mengharungi lautan, atau terbang dengan pesawat udara, untuk sampai ke destinasi wisata untuk meraih mimpi-mimpi yang diharapkannya menjadi kenyataan. Wisatawan itu tidak hanya ingin melihat panorama sepenggal syurga seperti yang dibayangkan itu, tetapi juga dia ingin diterima sebagai manusia sebagai teman atau juga sahabat baru dari penghuni syurga panorama indah yang dimimpikannya itu. Jadi, tidak hanya karena faktor panorama yang indah itu saja mereka datang, tetapi karena budaya masyarakat penghuni panorama itu. Dapatkan mereka menerimanya sebagai tamu atau sahabat yang ramah. Apakah orang yang akan menerima mereka sebagai “*host population*” yang juga mendambakan kehadiran mereka, tidak hanya sekedar senyum, karena mereka harus dibayar dengan uang sebagai upah atau jasa saja. Mereka ingin lebih dari sekedar itu, mereka ingin agar mimpi-mimpi yang mereka bawa menjadi kenyataan.

## 1. Budaya Wisata Masyarakat Danau Toba

Kalau ada orang bertamu ke rumah seseorang, dia tidak mungkin bertahan lama-lama di rumah itu, kalau orang yang punya rumah tidak menerimanya dengan ramah, dan memperlakukannya sebagai tamu yang harus dihormatinya, bagaimanapun indah dan megah rumah itu. Dia akan segera angkat kaki dan keluar meninggalkan rumah itu. Apalagi jalan yang jauh dan berlobang-lobang mendatangi rumah itu telah menguras energinya. Tetapi yang lebih penting, adalah budaya manusia yang akan menjadi “*host*” (tuan rumah itu), bagi seorang pengunjung atau wisatawan, apakah dia akan betah menetap lama atau akan kembali lagi mengulangi kunjungannya. Bukan hanya karena rumah itu gedung bertingkat dan modern.

Waktu kami dengan beberapa peneliti pariwisata pasca sarjana Antropologi Sosial Unimed mengunjungi beberapa tempat mengelilingi Danau Toba, banyak kejadian “manusiawi” yang kami jumpai. Disalah satu hotel umpamanya kami pergoki salah seorang bos (maneger)

menghardik pelayannya dimuka tamu. Ternyata yang kaget bukan pelayan yang kena damprat itu, tetapi tamu bule, sampai dia mengucap “*oh,.. my god!*” Kami hanya dapat melihat kejadian itu dengan prihatin. Begitu juga kalau ada orang berteriak-teriak agak keras, tetamu kelihatan seperti terkejut. Semua ini comtoah-contoah yang mungkin dianggap “*sepele*” bagi orang Sumatra Utara, tapi tidak demikian bagi orang luar, apalagi bagi seorang wisatawan asing. Jadi tidak hanya kebersihan kamar mandi, ruang tidur atau *lounge* tempat duduk bersama dan suara musik yang “*soft*” yang harus diperhatikan untuk kenyamanan para pengunjung. Memang tidak semua tempat yang kami kunjungi suasana hubungan antara wisatawan dan “*host*” dapat dilihat kasat mata. Begitu juga suasana pengaturan pakir sampai kepada pelayanan di kamar tidur, rasanya belum nyaman dan bershabat. Apalagi suasana dalam pengaturan tamu di pemandian air panas, kunjungan ketempat-tempat bersejarah atau dikapal feri penyeberangan (dari Prapat dan Samosir, pulang pergi), belum dapat dikatakan nyaman bagi wisatawan.

## 2. “*Encounter*” Wisatawan dengan Masyarakat

Mungkin karena sulitnya mengatur dan mengembangkan hubungan timbal balik antar wisatawan dengan masyarakat setempat, banyak pengusaha wisata yang mencoba membatasi hubungan langsung antara wisatawan dengan masyarakat. Apalagi, kalau dilihat dari okupasi permukiman masyarakat sekeliling Danau Toba dan pulau Samosir, dapat dibedakan dari 4 (empat) kelompok etnik yang masing-masing mengklaim teritorial sekeliling danau itu. Apabila sekeliling Danau Toba dapat dibagi dua, sebelah Timur dan Barat, maka disebelah Baratnya, termasuk Samosir didominasi oleh kelompok Etnis Toba, dan Pak-Pak Barat, sedang sebelah Timur oleh Karo dan Simalungun. Yang paling masif telah menghuni dan mengekloitasi danau sebelah Barat adalah kelompok etnis Toba, sedang yang paling kurang menonjol adalah Pak-Pak Barat (daerah yang berdekatan dengan kota Sidikalang).

Sementara Karo telah mengeksploitasi teritorialnya sejak 1990 dengan proyek “*Karo Simalem Resort*” secara lebih terorganisir, rapi dan modern.

Aktivitas *resort* ini sebahagian besar didataran tinggi pegunungan yang curam, sebagai dinding Danau Toba, sehingga tidak mencecah ke dasar danau. Namun demikian proyek ini mendapat tampilan panorama danau dari ketinggian dan dapat melihat hampir setengah keseluruhan danau. Pengunjung dapat menikmati Danau yang megah itu ketika matahari muncul dari permukaan pegunungan danau (*sun rise*) dan ketika matahari tenggelam (*sun set*). Arena kegiatan seperti ini, banyak juga kita dapati di Bali. Sehari-hari, kalau kita tidak keluar *resort* sulit bagi wisatawan untuk “*encounter*” (bertemu) dengan masyarakat. Penulis pernah turut serta dengan tim Departemen KLH menyelenggarakan Seminar Kependudukan Pasifik dan Asia Tenggara di Bali (1985) selama 5 hari. Selama itu penulis tidak pernah berhubungan (*encounter*) dengan masyarakat Bali (kecuali dengan orang Bali yang bertugas di hotel tempat seminar tersebut). Kalau ada yang bertanya “Bagaimana orang Bali?” penulis bingung untuk menjawabnya. Apalagi setelah selesai seminar jadwal kami padat sekali untuk segera kembali ke Jakarta, bahkan tidak ada waktu untuk lari sebentar ke pasar tradisional untuk membeli oleh-oleh atau sovenir untuk dibawa pulang. Para wisatawan hanya bertemu sesama mereka di lingkungan hotel dan ruang seminar. Ini sama sekali tidak memenuhi tujuan dan kaidah pariwisata, tidak ada *encounter* sama sekali dengan masyarakat setempat.

Untuk mencegah sama sekali ketiadaan *encounter* dengan masyarakat setempat, *Taman Simalem Resort* menawarkan berbagai aktivitas untuk tamu mereka seperti: Kunjungan ke *Simalem Farm*, *Jungle Track Activity*, *Kids Adventure*, *Kids Gardening and Cooking Class* dan *Simalem Agro Tour (Karo Agro Farm)*. Dua kegiatan yang terakhir ini sesuai dengan alam tanah Karo sebagai kebun buah-buahan, sayur-mayur, aneka tanaman bunga, bagaimana memetik teh dan biji kopi. Dalam acara ini pemandu wisata menyampaikan juga apa manfaat meminum teh hijau, seperti mengurangi stress dan mengurangi resiko radang sendi dan reumatik. Tetapi cukupkah semua kegiatan tambahan itu untuk menenal masyarakat Karo sebagai “*host*” wisata ini?

Masalah perlunya *encounter* (pertemuan tidak disengaja) dengan masyarakat pada destinasi wisata adalah masalah yang juga menjadi topik utama dalam pembangunan pariwisata di utara Pulau Bintan yang dibangun

oleh perusahaan Pariwisata Singapura tahun 1980-an. Kebetulan penulis dengan beberapa teman lainnya, seperti Prof Sukaria Sinulingga (USU) dan Dr. Wimar Witular (ITB) diangkat sebagai konsultan lingkungan proyek wisata ini oleh perusahaan Singapura tersebut. Kami dapati sepanjang jalur pantai pulau Bintan Utara para pekerja sedang sibuk membangun hotel-hotel berbintang, lapangan golf, lapangan tenis dan prasarana lainnya. Ada beberapa hotel yang telah siap dan kami ditempatkan disana. Kami kaget juga karena hampir semua para pelayan bukan orang Melayu Bintan, tetapi didatangkan dari Bali. Dalam disain mereka ada bangunan untuk pameran kerajinan tangan dan pasar seni. Semua barangnya telah dipersiapkan dari Bali. Pada pertemuan pertama dan kedua kami ingin memastikan dari manajemen pariwisata Bintan Utara ini, apakah mereka sedang mempersiapkan tempat “pindah tidur” wisatawan dari Singapura, atau benar-benar ingin membangun pariwisata Bintan Utara. Baru pada pertemuan ketiga kepastian itu kami peroleh, “bukan untuk pindah tidur, tetapi sebagai destinasi wisata!” Akhirnya proyek yang akan kami tangani bertambah besar dan luas, tidak hanya terbatas pada masalah lingkungan. Proyek ini menghadapi masalah besar, bagaimana mengembalikan dan membangun “*community living*” masyarakat Bintan yang telah porak poranda. Yang jelas, semua tanah penduduk Bintan Utara, telah dibeli dan dibebaskan, penduduknya sebahagian besar telah dipindahkan ke daerah selatan. Banyak yang dahulunya nelayan ditempatkan dipebukitan, begitu juga sebaliknya, banyak petani yang direlokasi ketepi pantai.

Setelah uang penjualan tanah habis sebahagian dari penduduk Bintan menggelepar-gelepar seperti ikan yang dicampakkan kedaratan. Bahkan “orang-laut” yang hidup dipinggir pantai, di atas ratusan perahu, ingin pindahkan. Kami jelaskan bahwa prinsip program “*community living*” ini agar setiap keluarga dapat mengembangkan kehidupan mereka kembali, seperti sedia kala. Setiap keluarga disiapkan rumah, kolam ikan, sawah dan kebon, sekolah dan mesjid serta mampu mengolah lingkungan untuk menghasikan produk kerajinan dan seni-budaya. Keadaan masyarakat yang mampu berproduksi dan berbudaya seperti itu sangat diperlukan oleh turis pada saat mereka melakukan *encounter* dengan masyarakat. Adalah tidak lucu kalau wisatawan ke Bintan tanpa betemu dengan masyarakat setempat, hanya betemu sesama

mereka, sekedar untuk “pindah tidur.” Bahkan tanpa membawa oleh-oleh hasil kerajinan masyarakat setempat.

Karena itu pengrajin-pengrajin tradisional dari Bali dan Jepara didatangkan untuk mengajar masyarakat Bintan mengolah hasil lingkungan mereka untuk dijadikan sovenir, bahkan membuat *booklet* sejarah asal usul keturunan mereka dalam sebuah cerita pendek (penulisnya kami datangkan dari pulau Penyengat), seperti juga yang dilakukan oleh penduduk pulau Langkawi (Malaysia). Tidak seperti yang direncanakan semula, sovenir didatangkan dari Bali atau Jepara. Kalau ada turis yang membeli sovenir, seperti patung Bali dari kunjungannya ke Bintan, mereka akan mencederai prinsip “*tourist in time*,” karena kenang-kenangan itu harus berasal dari destinasi wisatanya, dari masyarakat yang ditemuinya.

### 3. Kesimpulan

Panorama yang indah dan spektakular sebagai objek pariwisata memang diperlukan, tetapi itu saja tidak cukup dan memadai bagi turis untuk berkunjung kesatu destinasi wisata. Mereka tetap ingin bertemu dengan masyarakat di destinasi wisata itu. Bertemu dengan masyarakat ini sangat penting bagi turis, apalagi untuk membawa hasil kerajinan sebagai kenang-kenangan atau sovenir yang dihasilkan masyarakat itu sendiri, apalagi kalau mereka dapat terlibat dalam kegiatan masyarakat di objek wisata itu, seperti kegiatan *hiking*, berkebun atau kegiatan seni budaya masyarakat setempat. Alam yang indah dan mengagumkan sangat perlu, tetapi yang lebih perlu lagi adalah kesiapan budaya masyarakat untuk menerima dan berfungsi sebagai “*host*” (tuan dan nyonya rumah) yang baik. Faktor kemanusiaan ini yang belum sempurna di Danau Toba.



## PARIWISATA: PISAU BERMATA DUA

Waktu penulis melakukan penelitian disertasi doktor di Tapanuli dan Sumatra Barat (1979), penulis singgah di Danau Maninjau, penulis memberikan tausiah dimesjid Jamik Bayur, yang seni arsitekturnya terindah di Sumatra Barat. Salah seorang hadirin bertanya apa yang dilakukan oleh orang-orang di Chicago yang berada di tepi danau Michigan itu. Penulis menceritakan bahwa sebahagian mereka yang berdiam di tepi danau itu membuka usaha “*home stay*” (pondokan) untuk para turis. Banyak juga turis yang senang (sungguhpun itu di Amerika), untuk memilih wisata desa, dari pada berdiam di hotel-hotel mewah. Mereka bebas menikmati danau, berkeliling dengan *speed-boat* dan mandi bersama keluarga. Rupanya tausiah ini sangat berkesan pada beberapa keluarga yang rumahnya berpapasan dengan tepi danau. Seperti penulis kisahkan sebelumnya, terbukti empat tahun kemudian waktu penulis singgah kembali kesana (1983), penulis menemukan ada tujuh-delapan keluarga yang sudah membuka “*home stay*” sejak beberapa tahun yang lalu. Salah seorang “*etek*” (*mak cik*) di *home stay* itu masih mengenal penulis, kepada dia penulis bertanya (sambil memasuki beranda, terkesan bersih dan duduk, beberapa orang kemudian datang dan menyalami penulis), apa ada masalah terkait dengan “*bule-bule*” yang menginap di *home stay* itu. Mereka mengatakan tidak ada, “mereka senang tinggal, satu atau dua hari bersama dengan keluarga atau teman-teman mereka. Mereka lahap makan dengan masakan yang kami sajikan.” Namun, *etek* tadi dengan malu-malu mengatakan, “... ada pak, kalau mereka mandi di danau, banyak saja anak-anak muda datang nongkrong melihat mereka.”

Ya, penulis dapat segera mengerti apa yang terjadi. Penulis sarankan agar mereka membeli handuk yang panjang, yang dapat menutupi tubuh dari kaki sampai ke dada, dan berikan waktu mereka akan mandi berenang, terutama kepada anak-anak gadis dan wanita lainnya. Penulis merasa hal ini adalah salah satu problem budaya.

Memang mandi didanau (di keramaian terbuka) hanya dengan memakai celana dalam (bikini) terutama perempuan, akan memamerkan aurat yang dilarang oleh agama dan budaya setempat. Agama dan budaya ini harus diselamatkan dari gempuran modernisasi asing, masyarakat harus ditunjuki oleh pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, tentang bagaimana menjaga keaslian budaya, tidak hanya terkait dengan aurat atau sopan santun, tetapi melingkupi seluruh aspek kehidupan dan seni-budayanya. Keaslian inilah yang harus dipertahankan, kemudian disajikan dan diapresiasi oleh dunia pariwisata.

## 1. Warisan Budaya dan Modal Wisata

Apakah bangsa ini bisa kehilangan keaslian budayanya. Apakah Bali dan lima Bali baru, termasuk Danau Toba, dapat nantinya meminimalkan kerugian (polusi sosial budaya) dan dengan demikian dapat melestarikan nilai-nilai budaya mereka, dengan memperoleh valuta asing yang sangat dibutuhkan itu.

Untuk menganalisisnya kita akan memakai analisis “biaya-manfaat” yang melibatkan semacam pertukaran antara nilai-nilai budaya dan ekonomi. Artinya, parawisata ditandai oleh ekonomi, sedangkan masyarakat ditandai oleh budaya: pariwisata membawa uang kepada masyarakat dengan imbalan eksploitasi budayanya. Dengan kata lain, begitu satu masyarakat menawarkan dirinya untuk dijual dipasar, begitu mereka berusaha untuk meningkatkan daya tariknya dimata pengunjung asing, maka kesadaran masyarakat itu akan kepemilikan “dirinya sendiri yang sedang dipengaruhi,” dipertaruhkan. Jadi, penduduk bukanlah objek pasif dari pandangan kepariwisataan (*tourisfication*), tetapi objek aktif yang membangun representasi budaya mereka untuk menarik wisatawan.

Secara praktis situasi ini dapat kita rasakan ketika kita menghadiri tari tor-tor di pulau Samosir umpamanya, kita diajak serta ikut dalam

parade tarian itu. Kita merasa tertarik dan senang dengan ajakan mereka yang sedang menari. Begitu juga sewaktu penulis menghadiri tarian joget Melayu di Serawak Malaysia, penulis tertarik dan ikut berjoket, dan rasanya penulis berada diawang-awang bersama para penari-penari cantik dan gagah, yang menjadi “host” penulis. Keterlibatan yang aktif timbal balik masyarakat dan turis, menunjukkan cara penduduk asli berhubungan dengan tradisi budaya yang diujarkannya, dengan nilai-nilai, singkatnya dengan identitasnya sendiri. Namun sebagai wisatawan, penulis sendiri tidak mengetahui dengan pasti, apakah partisipasi dalam tor-tor atau tarian joget tadi itu sudah sesuai atau tidak sesuai dengan tata seni tari kedua-nya. Dengan demikian kepariwisataan (*tourisfication*) itu, baik wisatawan dan masyarakat yang menjadi “host,” harus dipandang sebagai bahagian integral budaya masyarakat itu, tanpa memperhitungkan lebih dahulu untung ruginya bagi kemurnian seni budaya mereka (Picard, 1978).

Bagaimana pula dengan tarian sakral yang banyak dipunyai oleh masyarakat tertentu seperti masyarakat Bali. Mungkinkah terjadi semacam keikutsertaan atau partisipasi para wisatawan, bukankah itu akan menodai atau mencemari kesakralan tarian itu sendiri. Biasanya tarian sakral ini dilakukan dalam acara-acara sakral tertentu di pura atau candi-candi. Namun demikian ada juga yang disiapkan untuk menyambut tamu yang penting yang berkunjung ke Bali. Apakah pencemaran dapat dihindari semaksimal mungkin. Atau memang tarian-tarian seperti ini telah dianggap sebagai pemikat turis yang datang untuk mendapatkan apresiasi mereka. Begitu juga pertunjukan-pertunjukan yang menghabiskan waktu berjam-jam di ruangan tertutup, apakah seluruhnya murni seperti aslinya atau juga telah direvisi seperlunya untuk menyenangkan para turis yang mempersakakannya.

Beberapa ahli mencatat, seperti tarian dan lagu angsa yang terkenal itu, adalah salah satu budaya Bali yang secara ajaib terlindung dari kikisan modernisasi yang kontroversial. Namun demikian facet budaya yang lain, dianggap sudah penuh dengan debu modernisasi. Pada hakekatnya banyak para antropolog dan pengamat kebudayaan menyatakan, bahwa kebangkitan Bali yang dicanangkan pemerintah memasuki abad ke 20 kemaren, menurut mereka, seolah-olah menyiratkan kejatuhannya budaya Bali dalam waktu yang dekat.



Berdasarkan saran dari Bank Dunia, sebuah Tim Ahli dari Prancis, sejak tahun 1974 yang lalu telah bekerja, salah satu yang mereka sarankan kepada pemerintah, agar diusahakan, tidak semua turis secara leluasa mengunjungi dan menjelajahi keseantero Bali. Jadi ada daerah-daerah “kantong” yang hanya dapat dikunjungi oleh turis kelas satu, artinya ada pembatasan daerah tertentu untuk tidak dikunjungi oleh semua turis.

Namun demikian pengunjung wisata Bali terus melonjak dari satu juta tahun 1990 menjadi hampir dua juta orang pada permulaan tahun 2020, belum termasuk turis domestik. Sementara penduduk Bali sendiri mendekati empat juta, disebuah pulau yang luasnya hanya sekitar 6.600 km<sup>2</sup>.

Apakah kebijakan tersebut, merupakan tantangan terhadap perluasan Bali-Bali yang baru oleh pemerintah, agar dapat menampung lajunya turis ke Indonesia? Atau juga untuk melindungi Bali secara frontal dari guncangan pariwisata? Yang jelas selama tiga dekade terakhir ini, pariwisata telah menjadi faktor pertumbuhan ekonomi yang penting untuk Indonesia dan keuntungan finansial yang besar bagi penduduk Bali, walaupun kepentingan asing terus meningkat dan menjadi masalah yang memprihatinkan pemerintah daerah.



*Tanah Lot*

Sumber : <https://www.google.com/search?q=foto+wisata+Bali&tbm=isch&ved=2ahUKEwjU94vj3LDrAhVLMSSKHd2tAKYQ2->

## 2. Wisata Budaya

Konsep Wisata Budaya dihasilkan oleh sebuah seminar di Bali 1971 yang lalu, Intinya, mengkonstruksikan budaya Bali menjadi “sumber daya” paling berharga untuk pengembangan ekonomi Bali, tetapi disisi lain invasi (serangan) oleh pengunjung (wisatawan) asing yang berasal dari berbagai sudut pandang dilihat sebagai ancaman “polusi budaya.” Dari hasil keputusan ini, jelas masyarakat Bali menganggap pariwisata sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan hati-hati. Bagaimana mengembangkan pariwisata tanpa merendahkan budaya Bali. Dengan kata lain, masyarakat Bali ditugaskan melaksanakan pariwisata, menjadikan budaya Bali sebagai “daya tarik” atau alat untuk meraih keuntungan dari wisatawan, dan menggunakan manfaat ekonomi itu untuk menumbuh kembangkan budaya Bali. Jelas dari konklusi seminar ini, tersirat sebuah dilemma : Pariwisata bergantung pada budaya, tetapi pariwisata adalah ancaman bagi budaya, pariwisata adalah pisau bermata dua.

Apakah kita, dengan Danau Toba sebagai Bali kedua, telah siap untuk menghadapi pariwisata sebagai pisau bermata dua? Mana “*blue-print*” untuk kita pedomani. Atau kita masih sibuk mengurus kerambah? Dan sekarang sedang menghadapi invansi virus Corona! Wallahualam.



## **DANAU TOBA : “BALI BARU” KEDUA DAN PROBLEMATIKA YANG DIHADAPINYA**

**T**ajak Rencana Harian Waspada, sebuah harian Nasional tertua di Sumatra Utara (1947), melansir berita mengenai kunjungan Presiden Obama dari Amerika Serikat dan keluarganya ke Bali dan tidak ke Danau Toba. Banyak orang-orang Sumatra Utara bersungut-sungut sampai mengomel, bukankah panorama Danau Toba puluhan kali lebih indah dan menggetarkan hati dari Bali. Kalau Bali dijuluki “sepenggal syurga,” maka Danau Toba sepatutnya lebih dari “sehektar syurga.”

Apalagi sejarah terciptanya kaldera Danau Toba, konon dari letusan gunung Merapi Toba puluhan ribu tahun yang lalu. Erupsi itu telah mengorbankan setengah penduduk dunia waktu itu. Pertanyaan serupa dapat juga ditujukan kepada belasan kepala negara, dan selebritis dunia lainnya yang mengunjungi Bali dan tidak Danau Toba. Seperti Raja Salman Abdul Azis raja Saudi Arabia, atau beberapa prang Raja dan Ratu serta Perdana Menteri di Eropah, bahkan kepala-kepala negara tetangga yang terdekad seperti Perdana Menteri Malaysia, Singapura atau Raja Bunai Darussalam. Begitu juga tokoh-tokoh selebritis dunia, yang jumlahnya tidak terhitung. Mereka tidak hanya sekedar singgah, tetapi banyak yang *shooting* atau berakting di Bali, malah seperti Mc Jakkers sampai menikah di Bali dan mereka jelas tidak memilih Danau Toba.

## 1. Apa yang Salah pada Danau Toba?

Sebenarnya tidak ada yang salah pada Danau Toba, malah yang perlu dipertanyakan ialah manusia yang dianugerahi Tuhan di Danau Toba itu, terutama para pejabat yang ada di daerah dan propinsi Sumatra Utara. Sadarkah mereka apa kewajiban yang dipundakkan Tuhan terhadap mereka. Bukankah tanah dan panorama yang indah seperti Danau Toba itu, yang di anugerahkan Tuhan pada mereka, agar dapat mendatangkan kemashalatan untuk masyarakatnya, seperti Bali? Mampukan mereka membaca apa yang dimimpi-mimpikan calon wisatawan yang akan berangkat ke Danau Toba, setelah bertahun-tahun mereka menabung dan siap mengharungi lautan atau terbang dengan pesawat untuk meraih mimpi-mimpi yang diharapkannya menjadi kenyataan sesampai di Danau Toba. Wisatawan itu tidak hanya ingin melihat panorama, tetapi juga ingin diterima sebagai teman dan sahabat baru.

Sejatinya mereka berharap tidak hanya sekedar dapat menatap keindahan panorama Danau Toba itu saja, mereka ingin mengenal budaya masyarakat yang menghuni panorama itu. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka datang membawa dana yang telah disiapkan untuk dibelanjakan di daerah destinasi wisata itu, apakah untuk penginapan makanan, peragaan budaya atau membeli oleh-oleh atau sovenir yang disiapkan masyarakat Danau Toba.

## 2. Budaya Masyarakat Destinasi Wisata

Kalau orang bertamu ke rumah seseorang dia tidak mungkin berlama-lama, apalagi kalau “*host*” (tuan rumah) di rumah itu tidak ramah dan bersenang hati menerimanya, bagaimanapun megah dan indahny rumah itu. Dia akan segera angkat kaki meninggalkan rumah itu. Sungguhpun dia telah lelah, karena perjalanan jauh dan menghabiskan energi untuk sampai ke rumah itu. Jadi lama seorang tamu atau “*length of staying*” seorang wisatawan di suatu destinasi wisata, tergantung pada “*host*” dari destinasi wisata itu.

Waktu kami dengan rombongan Antropologi Unimed mengunjungi Danau Toba, dan singgah di beberapa lokasi, banyak kebiasaan-kebiasaan

yang tampil dari masyarakat setempat, yang mungkin itu biasa, tetapi dapat ditanggapi “tidak biasa” oleh tamu (wisatawan). Seperti seorang boss restoran tiba-tiba menghardik seorang pelayannya, karena kesalahan, sampai menumpahkan air digelas yang sedang dihidangkannya. Orang yang dihardik tadi biasa-biasa saja, tetapi yang kaget adalah “bule” yang duduk menjadi tamu di restoran itu. Dia terkejut sampai mengucap dan gemetar, “...*Oh, my God!*” Kami yang hadir di restoran itu hanya turut prihatin dan mengurut dada. Semua ini hanya kejadian spele bagi orang Sumatra Utara, tetapi tidak demikian pada si wisatawan asing tadi.

Atau kejadian spele lainnya, anak-anak muda seperti membuat keributan dan berteriak-teriak di luar restoran, bagi tamu sudah merupakan masalah, sehingga dia keluar melihat apa yang terjadi. Ternyata hanya tukang parkir mobil yang sedang mengatur mobil yang di parkir dengan teman-temannya.

Mengapa banyak orang mengunjungi sebuah destinasi wisata seperti Bali? Menurut berbagai sumber memang advertensi banyak berjasa, tetapi yang lebih banyak adalah jasa bekas wisatawan yang telah berkunjung. Merekalah yang menjadi tulang punggung penyebaran berita atau “advertensi berjalan” sebuah destinasi wisata. Mereka bercerita, di kampung atau di kotanya, atau ketika bercengkrama dengan teman dan sanak saudaranya, betapa dia telah mendatangi “sekeping surga” yang namanya Danau Toba. Itulah yang menjadi advertensi yang paling efektif.

Jadi kalau kejadian seperti yang kami alami di restoran Danau Toba itu di sampaikan si Bule tadi, apa yang akan terjadi, mereka menganggap masyarakat Danau Toba belum siap menjadi “*host*” wisata untuk dikunjungi, betapun indah panorama Danau Toba itu diceritakan. Jadi kita tidak hanya sekedar menjual “*view*” Danau Toba, tetapi keseluruhan, masyarakat dan budayanya. Atau mungkin juga mereka hanya berkeliling dengan mobil di sepanjang Danau dan mengunjungi Samosir dari Parapat pulang balik dan kemudian pergi ke tempat lain. Jadi ketahanan mereka untuk bertahan disuatu destinasi wisata sangat tergantung dari budaya masyarakat di destinasi wisata itu.

### 3. Masalah Lama Tinggal (length of staying) Wisatawan

Masalah lama tinggal wisatawan disuatu destinasi wisata, termasuk salah satu kualitas wisatawan. Kalau kita mendapatkan wisata yang lama tinggalnya sampai lima hari atau satu minggu, maka kita telah mendapatkan wisata yang berkelas. Seperti diutarakan sebelumnya lama tinggal ini sangat terkait dengan pesona panorama alam di destinasi wisata (seperti Danau Toba), tetapi itu saja tidak cukup. Kita tidak mungkin hanya menjual “view” atau panorama alam, tanpa budaya masyarakat yang akan dinikmati wisatawan. Seperti destinasi candi Angkor Wat di Kamboja, wisatawan disana rata-rata menginapnya sampai 5 hari, sedangkan di Brobudur hanya 1-2 hari. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Candi Angkor Wat lebih hebat dari Candi Brobudur.

Ternyata wisatawan yang berdiam di *home-stays* Angkor Wat tidak hanya menikmati candi, tetapi juga menikmati budaya masyarakatnya. Mereka setiap hari disuguhi oleh atraksi budaya Kamboja. Para wisatawan dapat menyaksikan pertunjukan sendra tari, teater dan berkunjung ke berbagai situs hasil kerajinan tangan untuk souvenir. Pada kesempatan inilah terjadi “*encounter*” wisatawan dengan masyarakat. Wisatawan dapat berbicara, menanyakan sesuatu atau mendengarkan sesuatu dari masyarakat setempat. Pertemuan (*encounter*) ini sungguhpun singkat tetapi penting bagi wisatawan dan “*host*” karena ada hubungan antara wisatawan dan masyarakat setempat. Sedangkan di Brobudur mereka hanya menyediakan *home stay* untuk “pindah tidur,” setelah mengelilingi dan mendaki candi Brobudur, memang terasa lelah dan kemudian terlelap dan esok harinya mereka menghilang dari *home stay*.

### 4. Mampukah Danau Toba Menyenggarakan Pariwisata Bermartabat?

Disuatu resepsi ulang tahun Harian Waspada (2018), dengan sangat tekun Mayjen Edy Rahmayady, sebagai Panglima Kodam I/BB berbicara, betapa beliau terkesima dengan kebesaran dan keindahan Danau Toba. Ketika itu, pembicaraan sambung bersambung dengan tokoh lainnya,

untuk menggambarkan betapa pembangunan Danau Toba yang diimpikan kelak, dapat di lakukan secara spektakular. Pulau Samosir yang terletak ditengah Danau Toba umpamanya, akan disunglap menjadi arena peribadatan internasional, tujuh bangunan peribadatan agama dunia dengan arsitektur religius yang menyejukkan akan dibangun, sehingga semua wisatawan akan singgah untuk semedi dan berdoa. Begitu juga beberapa mega proyek seperti hotel berbintang dan kapal pesiar serta *entertainment* lainnya.

Memang semua itu dapat dirangkakan, bukankah Danau Toba merupakan monumen kaldera terbesar didunia, yang berasal dari letusan gunung Toba, yang telah melenyapkan lebih sepertiga penduduk dunia, sekitar 30.000 tahun yang lalu. Bungkahan-bungkahan dan abu letusan gunung Toba itu tersebar dimana-mana, ada di Afrika, Asia Tengah dan Lautan Pasifik. Saya masih ingat sebahagian bungkahan dan abu ini ditemukan oleh tim dari University of Illinois Chicago (kebetulan almamater saya), didekat perbatasan Nigeria dan Ghana, serta sebahagian lagi di pegunungan Himalaya. Memang kaldera Danau Toba adalah salah satu keajaiban dunia, seperti juga Niagara atau Istana Alhambra di Spanyol.

Sebab itu pula, Presiden Jokowi dodo menetapkan pembangunan pariwisata Danau Toba, sebagai satu dari sepuluh destinasi utama nasional, seperti Brobudur dan Bali, serta diberikan prioritas anggaran. Justru itu pula, pembangunan prasarana telah dilakukan pemerintah, pelabuhan udara Silangit telah disunglap menjadi pelabuhan internasional, jalan tol bebas hambatan dari Kuala Namu-Parapat dibangun, pelabuhan nusantara Belawan di perbaiki, begitu juga direncanakan pelabuhan Sibolga diperluas, semua itu untuk mendukung destinasi Pariwisata Danau Toba. Pertanyaannya sekarang mampukah kita mengelola pariwisata Danau Toba sebagai Pariwisata yang bermartabat?

## 5. Kecelakaan di Danau Toba

Sekarang tanpa kita harapkan, kenyataan pahit telah terpacak dihadapn kita, di saat-saat kita merayakan idulfithri, malapetaka danau Toba muncul, astagfirullah, ternyata Tuhan telah memperingatkan atas kecerobohan, birokrasi kita yang ambaradul, serta sekaligus telah mengganjar atas

kesalahan itu. Dalam hitungan detik kita telah mengorbankan ratusan jiwa putra putri warga-negara kita, kerana kesalahan birokrasi dan kelalaian manusia yang ternyata selama ini, telah berlarut larut dilaksanakan di Danau Toba.

Kita sekarang terheran-heran mengapa kebesaran dan kemasyhuran Danau Toba, usaha dan harapan pemerintah pusat seperti yang diijakkan diatas tidak membuat perubahan sikap perilaku para birokrat dan petugas perairan Danau Toba. Bukankah mereka sedang diharapkan dan bahkan di uji apakah mereka siap dan mampu menerima tugas bangsa dan negara yang berejarah ini, menjadikan Danau Toba destinasi utama pariwisata Nusantara yang bermartabat, menyenangkan dan menggairahkan kehidupan wisatawan sejagat. Bukankah semua masyarakat Sumatra Utara berharap kepada mereka. *“do what your best, Lae!”* Sekarang, semua orang terhenyak, sambil bertanya, dimana perasaan, alasan atau pemikiran mereka, mengapa birokrasi kita disana secerobah dan seambaradul itu.

Perasaan kita bertambah miris, ketika mencermati pertengkaran antara Ibu Ratna Sarumpaet dan Bapak Menko Binsar Panjaitan yang sangat tidak proporsional dan bahkan mengkusarkan. Ibu Ratna bertekak, agar semua jenazah dari ratusan yang tersisa dan nyata-nyata tergeletak didasar Danau Toba itu, pencahariannya jangan dihentikan, diangkut seluruhnya agar dapat dimakamkan oleh keluarga yang selama ini tetap setia menunggu. Setelah itu baru kalau ada, masalah pembangunan tugu dibicarakan. Sebaliknya, Pak Panjaitan ingin segera mengakhiri pencaharian secara resmi, tugu dipancang dan dibangun, agar tim Operasi SAR Gabungan dari Jakarta dan Singapura dapat dipulangkan. Memang, Ibu Sarumpaet benar, tidak hanya dari segi kemanusiaan, tetapi dari sudut pandang adat Batak Toba sendiri, tugu hanya bisa dibicarakan, apabila mayat dan tulang belulang telah terkumpul, bukan sebaliknya.

## 6. Pekerjaan Besar sedang Menanti Kita

Bagi Eramas (Edy Rahmayadi dan Musa Ejeckshah) yang akan menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara mendatang ini, kejadian Danau Toba ini, untuk mengembangkan pariwisata bermartabat,



mudah-mudahan tidak mematahkan semangat mereka. Dapat dimaklumi kalau mereka juga kesal, satu-satunya proyek destinasi pariwisata Nasional yang didambakan dan akan menjadi kebanggaan, yang akan mulai mereka tangani, sekarang dalam situasi dan citra yang menyedihkan.

Memang tidak gampang memimpin atau *manage* Sumut, tidak hanya masyarakatnya yang sangat plural, tetapi birokrasinya baik pada tingkat Pemda Sumut dan Kabupaten-Kota, banyak segi-segi yang masih amburadul, walaupun semangat mereka, tinggi dan selalu tampil pantang mundur. Sukar membuat polarisasi birokrasi Sumut secara linear, karena sangat kompleks seperti manusianya!

Pengalaman saya dan teman-teman sebagai anggota Kelompok Ahli Gubernur Sumut untuk tiga periode Gubernur (Rizal Nurdin, Rodolf Pardede dan Syamsul Arifin) lebih sebelas tahun, banyak dapat berbicara. Kami, kelompok Ahli (Pok Ahli), sering mengunjungi Bupati dan Wali Kota atas penugasan Gubernur, banyak hal-hal yang aneh yang tidak dapat diungkapkan disini, tetapi itu telah terjadi, dan kami merasa kebijakan itu perlu segera dikoreksi dan diluruskan. Umpamanya, dalam sebuah pertemuan dengan seorang Bupati yang baru dilantik, kami menanyakan apakah beliau sudah menetapkan Kepala-Kepala Dinas, dalam keterangannya dapat disimak beliau terlupa menyebutkan Kepala Dinas Pendidikan. Waktu ditanyakan, dengan bersemangat beliau mengatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan telah dijabat oleh seorang tokoh bekas Kepala Satpam. Waktu saya tanyakan mengapa harus demikian, beliau menjawab, “ ... yah, bapak tahu, kan, ... dinas ini membawahi banyak guru-guru, yang selalu ribut, bahkan bisa membuat demo, segala ...!

Belum lagi seperti kasus di Nias, Bupati Kepala Daerahnya dipecat DPRD Nias (UU Otonomi No.22/2002). Kami berkunjung, setelah lima hari bermusyawarah, ternyata dapat melerai pertikaian mereka. Setelah itu, Bupati menyelesaikan masalah honor anggota DPR itu yang tertunda-tunda, sampai lima bulan. Begitu juga perselisihan mengenai tapal batas Kotamadya yang baru, atau beberapa pembangunan yang krusial. Ternyata, kelompok Ahli yang terdiri dari beberapa guru besar dan cendekiawan kampus seperti Dr. Polin Pos-pos, Prof. Dr. Solly Lubis, Prof Sukaria Sinulingga, Prof. Hasan Miraza, Prof. Simanjuntak, Ir.Soekirman, dan

saya sendiri, dengan bebas dan santai tetapi serius dapat mengembangkan diskusi dan mencari penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kadang-kadang waktu sedang musyawarah itu, kami perlu bertelepon langsung dengan bapak Gubernur untuk minta petunjuk atau konfirmasi. Bahkan kami dapat mempertemukan beberapa Bupati dan Wali Kota, untuk duduk bersama membicarakan berbagai masalah pembangunan yang saling berkaitan antar tetangga. Seperti antara Bupati Dairi/Fak-Fak Barat dengan Bupati Karo (masalah budi daya tanaman keras, sayur mayur dan buah-buahan serta pemasaran), Bupati Deli Serdang Wali Kota Medan (masalah polusi Mebidang), atau antara Wali Kota Medan dengan Bupati Tanah Karo (masalah sumber air dan lingkungan). Memang dengan diskusi terbuka dan ilmiah tanpa ditekan oleh beban birokratis banyak masalah dapat segera diurai dan diselesaikan.

Masalahnya sekarang, Danau Toba secara resmi di kelola oleh lima Bupati, dengan batas-batas wilayah yang memang cukup jelas, tetapi secara operasional kelima Kepala Daerah itu harus selalu melibatkan birokrasi dan masyarakatnya kelima daerah itu secara timbal balik dan harus berkelanjutan. Semua ini konsekuensi karena kelima daerah ini hanya punya satu Danau Toba. Sebab itu, mereka memerlukan kecekatan dan kejelian mengantisipasi masalah, jangan ada yang lalai dan terlupakan.

Seperti teriakan seorang petugas kapal kayu motor di dermaga Tiga Ras yang lalu, “kami tidak diatur oleh siapa-siapa,” artinya mereka telah menihilkan kehadiran birokrasi, tidak ada Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan yang lain. Karena itu jangan ditanya soal manifes perjalanan sebelum berangkat. Apakah kapal motor itu dapat memuat barang atau penumpang dalam kapasitas tonase berapa, tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. Artinya tidak ada aturan atau undang-undang yang harus mereka indahkan atau membatasi mereka, baik jumlah orang atau muatan yang dipunggah. Yang dijadikan ukuran bagi muatan kapal mereka, apakah isinya manusia atau barang. Menurut ukuran mereka, kalau buritan dan badan kapal itu, tenggelam lebih dari setengah kedalam air danau, artinya sudah dapat jalan, “... go, Lae!”

Dengan kata lain, secara praktis tidak perlu kehadiran pemerintah, untuk mensyahkan manifes, apakah itu Dinas Perairan atau Dinas apapun.

Namun seperti kejadian kemaren, ditengah perjalanan kapal kayu Maju Bangun itu, cuaca berubah, gelombang tiba-tiba menggulung kapal itu, terjungkir dan tenggelam, penompang yang tidak memiliki pelampung atau baju penyelamat berhamburan ke laut. Hakekatnya, bukankah ini semua akibat mengabaikan kehadiran pemerintah yang seyogyanya melakukan kontrol danantisipasi keadaan, tetapi pemerintah sendiripun terlelepa entah dimana.

Pengalaman kita sehari hari kalau di Danau Toba, ketika kita berpergian apakah dari Parapat ke Tomok atau dari Pangururan ke mana saja, memang kita sangat jarang bertemu dengan petugas dari Dinas Perairan/Perhubungan atau Pariwisata Danau Toba, artinya kehadiran pemerintah tidak kelihatan atau mereka jarang bertemu dengan masyarakat turis. Saya juga agak kaget bahwa Kepala Dinas Perhubungan Perairan Tiga Ras ditahan dan dijadikan salah seorang tersangka bersama Kapten Kapal Maju Bangun, Tuan Tua Sagala. Saya hanya bergumam, wah memang ada Kepala Dinasnya!

Sebagai salah satu dari sepuluh distinasi pariwisata Nusantara, dengan apa dapat kita perbandingkan penataan perairan Danau Toba, apakah dengan penataan pantai Sanur Bali atau penataan kendaraan yang mengelilingi Candi Brobudur, yang sekarang telah sampai ke atas bangunan candi? Sukar kita berbicara bagaimana mereka telah berjalan dan tertata rapi seperti sekarang. Rasanya dengan membayar tiket lima juta rupiah dari Medan, kita telah dapat berwisata selama lima hari di pulau dewata itu dengan jadwal tamasya yang rapi, kita tidak hanya menikmati kecermatan manajemen turisnya, tetapi kepiawian itu diperlihatkan juga sepenuhnya oleh petugas-petugas wisata setempat. Saya tidak menghitung berapa kabupaten dan Kota telah kami lalui, yang jelas kami puas dan terlena di pesawat ketika sampai di Kuala Namu. Dapatkah wisatawan domestik atau asing mengharapakan sedemikian kalau berkunjung ke Danau Toba, menikmati pariwisata yang bermartabat dari masyarakat Danau Toba?

## **7. Apa yang harus dilakukan Eramas?**

Mungkin nanti, ketika beliau-beliau ini telah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur, perlu melakukan pendinginan suasana dan pendekatan

satu sama lainnya, terutama untuk mendapatkan pemikiran yang cerah dan jernih ke depan. Sebaiknya kelima Bupati sekeliling Danau Toba, bersama-sama dengan bapak gubernur rasanya perlu mengunjungi beberapa destinasi pariwisata Nusantara yang telah mapan. Setiap kali kunjungan ke suatu destinasi, mungkin perlu segera diskusi bersama dilakukan, dari hati ke hati, apa yang dapat ditiru atau dicontoh atau dimodifikasi untuk diterapkan di Danau Toba dan daerah-daerah penyangganya termasuk penyambutan tamu di Bandara Silangit dan Kuala Namu. Kunjungan ke keberapa destinasi pariwisata Nusantara ini secara kumulatif dan komprehensif mungkin akan memberikan nuansa dan pemikiran baru, bagaimana seharusnya mengelola pariwisata Danau Toba yang bermartabat. Insya Allah!

## 8. Danau Toba Dalam Lirik Lagu

Bengawan Solo ... riwayatmu ini, sedari dulu jadi perhatian insani. Lirik miris nyayian Bengawan Solo ini bisa dipinjam, untuk memulai pembicaraan kita mengenai Danau Toba. Walaupun kehadiran kaldera Danau Toba jauh berbeda dari bengawan Solo yang dipuja orang Jawa Timur itu. Bukankah kehadiran Danau Toba telah menggoncangkan dunia, lebih seperempat manusia di dunia telah turut tenggelam waktu letusan dahsyat gunung api purba Toba meletus, sekitar 74 ribu tahun yang silam.

Bungkahan batu, benda-benda keras, lumpur dan awan panas yang mengendap di perut gunung itu, dimuntahkan dan bertebaran ke seluruh dunia di dunia. Beberapa peneliti termasuk dari Departemen Arkeologi University of Illinois, Chicago, almamater saya, mengunpulkan bungkahan batu keras ini di beberapa tempat di Afrika. Bungkahan yang lain didapati di Asia Muda (India) dan Kambodia. Demikian cuplikan kehadiran Danau Toba yang telah menyentak dunia. Sekarang kita hanya dapat menatap pesona keindahannya yang memukau dan mempesona. Adalah wajar apabila PBB menaruh perhatian dan menabalkan Danau Toba sebagai salah satu “kaldera *heritage*” dunia yang terbesar. Dan akan diturutsertakan dalam berbagai event wisata dan kegiatan budaya Internasional.

## 9. Sepuluh Bali Baru

Dalam rangkaian kegiatan pariwisata pemerintah telah menetapkan bahwa Danau Toba akan dijadikan salah satu “Bali Baru” yang utama dari sepuluh Bali yang diciptakan untuk mengusung negeri ini sebagai negara pariwisata. Walaupun Bali sendiri tetap diakui menjadi tujuan wisata favorit bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Sejak Gubernur Edy Rahmayadi menjadi orang nomor satu di Sumatra Utara, beliau telah memberikan *support* dan perhatian yang besar terhadap setiap kegiatan yang diusung dan mendorong Sumatra Utara sebagai salah satu Bali Baru itu. Bagi Bali sendiri kehadiran Bali-Bali Baru itu nampaknya tidak sama sekali tidak menghawatirkan mereka.

Oleh karena menurut Gubernur Bali Wayan Koster “Saya tidak pernah khawatir, karena apa yang kita punya di Bali tidak ada disana (10 Bali Baru). Sedangkan apa yang ada disana (keindahan alam) ada disini.” Apa yang ada di Bali, belum tentu ada disana, seperti di Danau Toba. Menurut Wayan Koster, kami memiliki seni budaya, adat istiadat, sikap yang santun dan keramahtamahan yang diperlukan oleh wisatawan. Budaya itu telah menjadi kunggulan Bali sejak puluhan tahun yang lalu.

Keunggulan ini telah menjadi magnet yang menarik wisatawan manca negara maupun domestik untuk terus berkunjung ke pulau Dewata ini, tegas Wayan. Oleh karena itu Gubernur Bali yang berasal dari desa Sembiran Kabupaten Buleleng ini, sangat yakin bahwa warisan budaya dan adat istiadat Bali, akan terus dijaga dan dikembangkan, karena itulah modal utama Bali. Kalau keindahan alam di Nusantara dan khususnya di 10 Bali Baru itu, tidak kalah dari apa yang ada di Bali.

Seperti diketahui Bali sekarang akan menggelar Pusat Kebudayaan Bali yang dilengkapi dengan fasilitas aninasi, yang sekaligus akan menjadi simbol peradaban dunia Bali (Analisa, 12 Juni 2019). Apa yang menjadi keyakinan Bali bahwa 10 Bali baru yang sekarang akan muncul sebagai penantangannya, dianggapnya sesuatu yang tidak mengkhawatirkan Bali. Mereka yakin, bahwa Bali tidak akan tergusur dari posisi utamanya sebagai magnet wisatawan mancanegara. Oleh karena mereka telah memiliki “budaya wisata” terutama sebagai *host* (tuan rumah) wisatawan Internasional yang handal.

Wisatawan disamping akan merasa “*at home*” (dirumahnya sendiri) kalau berada di Bali, tetapi juga dengan leluasa menemukan mimpi-mimpi yang dibawanya dari kampung atau negerinya. Mimpi-mimpi itu akan menjadi kenyataan di Bali. Oleh karena itu masyarakat Bali selalu mengusahakan suasana yang “*favorable*” agar para wisatawan dapat merealisasikan mimpi-mimpi yang dibawanya dari kampung halamannya dan temuan itu akan menimbulkan “*exited*” (kegembiraan yang luar biasa). Seakan dia telah berada disurga (didunia lain) yang selama ini menjadi impiannya. Bukankah banyak diantara wisatawan yang menabung sampai tahunan untuk dapat datang ke Bali. Budaya sebagai “*host*” (tuan rumah) ini, memang telah dimiliki masyarakat Bali sejak dahulu sampai sekarang..

Bayangkan disuatu restoran umpamanya, pemilik restoran sendiri tidak pernah mau menghardik pelayannya yang berbuat salah, karena khawatir itu akan melukai perasaan tamunya. Bagaimana dengan Danau Toba, apakah mereka telah memiliki budaya wisata seperti yang dipunyai Bali, yang menyebabkan wisatawan betah tinggal untuk menikmati panorama dan bumi Danau Toba? Bukankah kita sekarang sedang menghadapi masalah menjamurnya Kerambah Jaring Apung (KJA) disekeliling Danau Toba, bahkan masyarakatnya tidak peduli lagi akan kebersihan lingkungan dan keberhasilan Danau Toba sebagai distinasi wisata yang kita dambakan.

## 10. Pelet Kerambah Jaring Apung Cemari Danau Toba

Seperti juga yang terjadi sejak lima tahun yang lalu, pelet kerambah seperti yang ada sekarang di Danau Toba telah mencemari air Danau Maninjau. Menurut penelitian Universitas Bung Hatta Padang (2017), didasar danau itu limbah pelet telah menutupi permukaan dasar danau itu setinggi 12 cm, menutupi celah-celah belerang, sehingga air danau menjadi keruh dan belerang “mengamuk” menyebabkan puluhan ribu ikan kerambah mati mengapung. Kejadian seperti itu terus berulang karena pemilik kerambah tidak mau menukar jenis pelet yang memiliki kadar ferum (zat besi) yang rendah.

Pelet yang rendah kadar ferumnya kalau ditabur mengapung, sedang pelet yang tinggi kadar ferumnya kalau ditaburkan tenggelam.

Dahulu, Pemda Sumbar berjanji akan membangun pabrik pelet dalam bentuk usaha koperasi bersama, tetapi sampai sekarang gagal direalisasikan. Dewasa ini nampaknya turis makin jarang mendatangi Danau Maninjau, mungkin Danau yang indah itu telah menjadi pusat usaha ikan kerambah.

Apakah Danau Toba akan mengikuti jejak Danau Maninjau? Sebenarnya jawabannya terserah kepada masyarakat Sumatra Utara, terutama masyarakat Danau Toba. “Pemerintah sudah terus melakukan sosialisasi zona Kerambah Jaring Apung (KJA) dengan jarak 300 m dari pinggir pantai, tetapi masyarakat susah untuk menerapkan zona itu. Ternyata KJA semakin menjamur sehingga menimbulkan banyak limbah di kawasan itu.” ucap Gidion Purba Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun (Analisa, 26 Juni) Penelitian yang dilakukan oleh Tempo (29 Mei) telah mengungkapkan fakta yang lebih seram lagi, bahwa “PT Aqua Farm (sebuah perusahaan besar yang telah dua dasawarsa beroperasi) membuang ikan mati ke dasar danau sedalam 35 m dengan peralatan selam lengkap.

Dengan peralatan kamera tahan air Go Pro, didapati di dasar danau ratusan karung, setelah diangkat kepermukaan danau dan dibuka, bau busuk menguap, air disekitar berubah menjadi keruh. Didasar danau itu menurut penelitian ini, berserakan karung-karung plastik berisi bangkai ikan yang telah berserakan, sebahagian karung-karung itu telah berlumut. Namun PT Aqua Farm membantah “Tidak ada bukti bahwa PT Aqua Farm bertanggung jawab atas karung-karung berisi ikan mati itu.” Demikian pernyataan tertulis manajemen, 11 Februari yang lalu. Tetapi menurut Tempo keberadaan bangkai ikan itu, tidak hanya menusuk hidung. Air danau menjadi keruh dan tidak layak diminum meskipun sudah dimasak.

Bahkan anak-anak terserang gatal di seluruh tubuh mereka, setelah mandi di air danau. Untuk mandi cuci, dan masak, warga desa mengalirkan air dari gunung dengan pipa. Menurut Larry Holmes, PT Aqua farm umpamanya, menggelontorkan 249 ton pakan setiap harinya untuk keramba, pelet itu membengkak begitu masuk air. Yang tak termakan oleh ikan jatuh hingga mengendap didasar danau. Pelet ini mengendap bercampur dengan feses ikan. Sisa pelet, feses dan bangkai inilah yang disenarai mencemari danau.

Sementara itu peneliti dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), menyatakan bahwa budi daya ikan dengan keramba telah memicu perubahan status trofik Danau Toba. Di area keramba, status trofik airnya menurun dari oligotrofik, yang jernih, menjadi eutrofik atau hipertrofik, yang mengandung unsur hara dan alga tinggi dari pakan serta feses ikan, “Beban pencemar paling besar memang dari keramba” (Arianto Budi Santoso Feb., 2019). Memang LIPI telah memetakan semuan keramba di Danau Toba dengan citra satelit. Hasilnya jumlah keramba mencapai 11.416 petak, 95% keramba itu adalah keramba masyarakat. Dan menurut petugas LIPI Arianto, untuk menyelamatkan air Danau Toba 90% keramba di Danau Toba harus dihilangkan. Hasil penelitian LIPI tersebut selaras dengan temuan Dinas Lingkungan Hidup Sumatra Utara.

Bahkan ketika penduduk Sirungkunon di perairan Danau Toba kembali menemukan berkarung-karung bangkai ikan disekitar keramba PT. Aqua Farm, Gubernur Sumatra Utara telah mengirimkan teguran, agar perusahaan itu memperbaiki metode pembudidayaan ikannya. Gubernur menuduh bahwa perusahaan ikan itu telah melanggar ketentuan budi daya ikan. Bila mereka tidak mengindahkan teguran itu gubernur akan mencabut izin usaha perusahaan, “kami tunggu dalam enam bulan ini!”

Memang hak AMDAL ada ditangan gubernur, walaupun hak memberi izin dan mencabutnya ada dipusat. Baru-baru ini sepulang dari Danau Toba gubernur bekas Panglima Kostrat itu, dengan geram menyatakan bahwa kini kualitas air danau terbesar di Indonesia itu dalam keadaan yang sangat buruk dan tidak bisa lagi dimanfaatkan masyarakat karena sudah sangat tercemar. “butuh waktu puluhan tahun, untuk mengembalikan kualitas air Danau Toba. Sementara itu Presiden Komisaris Regal Springs Indonesia (nama baru dari Aqua Farm) Sammy Hamzah mengatakan bahwa pihaknya akan mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan Provinsi Sumatera Utara, terutama Peraturan Gubsu no.188/2017.

## 11. Budaya Wisata Danau Toba

Budaya adalah sistem pengetahuan masyarakat untuk memajukan dan mempertahankan keutuhan serta untuk menanggulangi setiap permasalahan



yang dihadapi masyarakat itu. Barangkali ini adalah pengertian budaya yang paling sederhana untuk dapat dikaitkan dengan permasalahan yang kita hadapi mengenai Danau Toba. Bukankah Gubernur Bali menyatakan bahwa beliau tidak pernah khawatir dengan kelahiran Sepuluh Bali Baru. Karena, “apa yang kami punyai di Bali belum tentu ada disana, tetapi apa yang mereka punyai disana (keindahan alam) kami punyai di Bali.”

Apa yang dipunyai Bali yang tidak kita punyai di Danau Toba, menurut alur pikiran gubernur Bali ini ialah “budaya wisata, terutama budaya sebagai tuan rumah (*host*) wisatawan.” Dengan kata lain, kalau Danau Toba memiliki budaya *host* wisatawan yang handal, mereka tidak akan membiarkan menjamurnya ribuan Keramba Jaring Apung memenuhi perairan Danau Toba. Bagaimana mereka sampai hati membiarkan turis (tamu mereka) mandi di air Danau Toba yang tercemar berat sedemikian rupa, sehingga mereka mengidap penyakit kulit, seperti gatal-gatal dan sebagainya. Apa mereka harus membuat famlet di hotel-hotel, agar semua turis menjauhi air Danau Toba, tentu saja ini sesuatu yang tidak lucu. Bagaimana pula dengan bau busuk yang menyerang hidung mereka, apa mereka dilarang bernafas, tentu ini sesuatu yang tidak mungkin.

Benar seperti yang diutarakan bapak gubernur Sumut bahwa kualitas air danau sangat buruk, karena telah tercemar, bahkan butuh waktu puluhan tahun untuk mengembalikan kualitas air danau itu. Artinya kalau masyarakat Danau Toba ingin menjadikan Danau Toba, sebagai destinasi Bali Baru, mereka harus memiliki “budaya *host* wisatawan yang handal,” melindungi para wisatawan baik domestik atau manca negara.

Tidak hanya membiarkan pemerintah yang menghadapi pengusaha dan masyarakat yang punya keramba jaring apung itu. Oleh karena masalah ini bukan masaah pemerintah saja, tetapi masalah masa depan atau hidup mati masyarakat Danau Toba yang hendak menjadikan negeri mereka sebagai Bali Baru. Kecuali kalau masyarakat Danau Toba sendiri, sudah sepakat untuk menjadikan Danau Toba sebagai danau KJA (Keramba Jaring Apung) terbesar didunia. Oleh karena dari segi material, mungkin ini sama saja. *Who's know?*



## SABANG KM. NOL NUSANTARA



*Tugu Km 0 Sabang*

Sumber : [https://www.tripadvisor.co.id/LocationPhotoDirectLink-g2540440-d6558345-i308684591-Monument\\_0\\_km\\_Indonesia-Sabang\\_Pulau\\_Weh\\_Aceh\\_Sumatra.html#308684591](https://www.tripadvisor.co.id/LocationPhotoDirectLink-g2540440-d6558345-i308684591-Monument_0_km_Indonesia-Sabang_Pulau_Weh_Aceh_Sumatra.html#308684591) <img alt=""/>

**K**etika penulis menekuni makalah saudara Dr. Agus Ezebio Dumatubun dari Merauke, mengenai kehidupan kelompok etnis Malin Anim yang hidup bermukim di kota itu, ingatan penulis melayang ke Sabang. Memang setiap kata Merauke muncul, secara otomatis orang akan teringat dengan Sabang. Makalah saudara Dr. Dumatubun ini menarik, mengungkapkan bagaimana kelompok Malin

Anim beradaptasi bersama lingkungannya, dengan mengembangkan kearifan lokal sebagai hasil abstraksi pengalaman mengelola lingkungan mereka yang khas secara turun menurun. Akan tetapi, ingatan penulis yang terus menerus ke Sabang tadi menyebabkan penulis menyesali diri, mengapa penulis tidak ke Merauke. Padahal, waktu penulis ke Sabang tahun 1957 ketika itu penulis masih duduk dibangku SGA (Sekolah Guru A) di Kutaraja, begitu menjejakan kaki di kota itu, penulis telah memasang niat akan ke Merauke.

Mungkin, niat itu harus diperbaharui kembali, karena itu sewaktu panitia mengumumkan akan berdarmawisata ke Sabang sehabis acara “Dialog Budaya Nasional” yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya, Banda Aceh itu, tekad untuk memperbaharui niat itu kembali bergelora. Kami menaiki kapal boat dari Uleelheue yang berkapasitas 300 penumpang. Di atas kapal penulis masih dapat membayangkan pantai Sabang. Jalan kecil yang mengelilingi pulau yang berbukit-bukit, lebih kurang sepanjang 150 km terjal berkelok-kelok, seperti jalan ke Batu Peringgi di pulau Penang. Pelayaran kami hanya membutuhkan waktu 45 menit, kapal boat itu membelah laut melaju kencang menuju daratan pulau Weh dimana pelabuhan Sabang terletak. Udara ketika itu sangat cerah. Uleelheue yang berada dibelakang kami tidak kelihatan lagi. Penulis ingat pulau Weh ini berdampingan dengan beberapa pulau lain, seperti pulau Klah, Rubiah, Seulako dan Rondo. Weh itu dalam bahasa Aceh berarti “meninggalkan,” tidak jelas mengapa dan apa yang ditinggalkan dipulau seluas 153 km persegi itu dengan penduduk sekitar 40.000 orang. Begitu banyak yang harus di hitung dipulau Weh ini. Selain perbukitan yang menjorok kelaut dengan pemandangan yang sangat indah, dipenuhi pohon kelapa dan tanaman cengkeh, serta hutan perawan yang belum terusik.

Dahulu, kalau orang ke Sabang mungkin saja dia ingin berguru ke beberapa Tuan Syekh yang terkenal, atau akan berlayar ke Mekah dengan kapal khusus, atau juga membawa barang dagangan. Bahkan kalau ada keluarga yang sakit ingatan yang biasa juga disebut penyakit jiwa (gila) orang memberangkatkannya ke Sabang. Memang Sabang memiliki rumah sakit terkenal dengan dokter-dokter spesialis (psikiatri), dokter-dokter ini kebanyakan dahulu orang Belanda. Menurut seorang teman rumah sakit khusus itu sampai sekarang masih ada.

## 1. Km 0 Nusantara

Kami mendarat di pelabuhan Sabang tepat jam 11 pagi, mobil-mobil panitia telah siap menanti. Tanpa membuang waktu rombongan kami melaju meninggalkan pelabuhan yang cukup ramai. Sekitar setengah jam kemudian kami telah sampai di ujung Utara pulau Sabang. Sebuah monumen dengan poster besar “Km. nol Indonesia,” (*Kilometer Zero, The Westernmost Point of Indonesia*), telah menanti kami. Pengunjung sejak pagi sudah ramai mengitari monumen itu. Dahulu, monumen ini hanya hanya sebuah tugu yang sederhana.

Sekarang tugu itu telah direkayasa tanpa mengusik bentuknya yang asli. Beberapa kerangka tiang balok di pasang disekeliling tugu, sehingga tampak menopang kehadiran tugu yang asli. Akan tetapi bentuk yang final yang direncanakan belum dapat direka-reka, karena belum selesai, walaupun dinyatakan telah memakan waktu yang lama juga. Namun para pengunjung tidak peduli. Kesempatan dititik nol kilometer ini telah dipergunakan untuk berfoto-foto, mengabadikan kenang-kenangan yang langka ini. Orang terpaksa bergantian untuk duduk atau berdiri di tempat tempat yang dirasanya strategis didepan poster tugu km nol ini, ada juga yang naik memanjat, ke tiang penyangga tugu, malah ada juga yang melambai-lambai agar difoto atau diabadikan.

Penulis tidak tahu apakah diantara pengunjung yang ramai itu ada berniat seperti penulis, setelah menginjakkan kaki ketitik nol itu, mereka akan mengunjungi Merauke, atau ada juga orang dari Merauke seperti Dr. Dumatubun yang membawa makalah tadi, beliau datang dari Merauke, dari titik paling ujung sebelah Timur Nusantara (*The Easternmost Point of Indonesia*). Mungkin dititik km ratusan juta! Seperti yang telah penulis mimpikan lebih 60 tahun yang lalu. Memang penulis sendiri telah mengelilingi dunia menjelajah dua lautan Atlantik dan Pasifik, pergi mengunjungi daratan yang paling Utara seperti Norwegia dan Filandia yang disebut juga “atap benua Eropah,” dan Afrika Selatan tempat Presiden Nelson Mandela menghabisi *apartheit*, tetapi semua itu tidak dapat memaafkan diri penulis untuk tidak sampai ke Merauke. Apalagi kalau penulis ingat apa yang diungkapkan Prof. Mattulada antropolog kenamaan dari Sulawesi Selatan, bahwa ketimpangan pembangunan Nusantara salah satu dampak

yang paling penting karena para pejabat dan cendekiawan kita wawasan Nusantaranya sempit dan hidup membelakangi laut. Hal ini diungkapkannya dalam promosi doktornya di UI (Universitas Indonesia) 1975, yang dipromotori Prof. Koentjaraningrat.

Sinyalemen ini terbukti dalam beberapa peristiwa, umpamanya proyek “rumahnisasi orang Balim” di Papua. Kami dengan Pak Selo Sumardjan menyaksikan bagaimana rumah-rumah yang dibangun oleh Departemen Sosial di Lembah Balim itu banyak hangus terbakar, bahkan beberapa rumah atap sengnya telah terbang hilang entah kemana. Ratusan rumah itu dibangun didekat permukiman suku Balim. Setelah bangunan rumah selesai maka petugas-petugas Departemen Sosial menyuruh orang-orang Balim masuk dan menempatnya.

Oleh karena perintah yang juga datang dari Kepala Suku, maka penduduk Balim “tiba-tiba” memiliki rumah seperti didesa-desa lain di Nusantara. Akan tetapi apa yang terjadi kemudian, beberapa belas rumah setelah dihuni bulan pertama hangus terbakar, akhirnya pada bulan keenam hanya tinggal beberapa rumah yang masih utuh. Atap seng yang telah copot, beberapa diantaranya didapati diatas pohon kayu besar. Kami dengan Pak Selo Sumardjan sangat prihatin melihat keadaan itu.

Ternyata, orang Balim memiliki kebiasaan, sebelum tidur membuat unggun api dan disekelilingnya mereka sekeluarga tidur. Kebiasaan ini diteruskan mereka didalam rumah yang telah disiapkan itu. Apa yang terjadi, rumah mereka dilalap api. Saya bertanya pada petugas Departemen Sosial yang ikut ke lembah Balim itu, “... apakah tidak disiapkan kelambu, agar mereka tidak dimakan nyamuk?” “Oh, tidak, karena kelambu tidak ada dalam daftar proyek!” Ini adalah salah satu contoh kejadian fatal dalam pembangunan Orde Baru, karena para pemimpin kita yang mencetak “*blue-print*” pembangunan, banyak yang memiliki “wawasan Nusantara yang sempit!”

Wawasan Nusantara mereka (meminjam istilah dalam sajak Chairil Anwar), jaraknya hanya sejauh dari Krawang sampai Bekasi! Apa yang baik di daerah itu baiklah untuk seluruh Indonesia. Jarak Kerawang-Bekasi itu sangat berbeda dengan jarak Sabang-Merauke!. Masyarakat Indonesia bukan homogen seperti Jepang atau Thailand. Kita adalah bangsa yang pluralistis, terdiri lebih dari 750 kelompok etnis dengan beragam budaya.

Keberagaman ini menyebabkan beragam pula pola hidup dan strata sosial-ekonomi masyarakatnya. Sebab itu mengelola masyarakat yang multikultural ini memerlukan wawasan budaya yang multikultural pula. Dua syarat yang diperlukan yaitu: (1) kesederajatan dan (2) keadilan. Apakah adil memaksa penduduk di lembah Balim itu untuk menghuni rumah seperti orang-orang di daerah Krawang-Bekasi? Walaupun gratis dan dengan niat yang luhur?

## 2. Sabang Dimasa yang Akan Datang

Letak geografis Sabang, sungguhpun sangat strategis, tetapi untuk Indonesia tidak selalu menguntungkan. Pada masa ORBA, Wakil Presiden BJ.Habibie, pernah mengumumkan bahwa Sabang akan dijadikan pelabuhan bebas untuk Indonesia Bahagian Barat. Penulis menyatakan dalam sebuah wawancara pers, bahwa nasibnya akan sama seperti IMTGT. Dalam sebuah seminar Internasional, penulis membuat sebuah makalah yang berjudul :”*The Broken Triangles*” yang berisi kekecewaan penulis mengenai segitiga perdagangan Internasional ini, karena pemerintah pusat Indonesia tidak pernah menepati komitmen yang diutarakannya dalam setiap pertemuan IMTGT. Seperti pembangunan prasarana laut dan udara untuk tranportasi di kawasan IMTGT, penurunan tarif cukai import dan export diantara tiga negara segitiga, pertukaran mahasiswa dan cendekiawan dsb.

Setiap pertemuan yang saya hadiri, utusan Malaysia dan Thailand tetap bertanya “*Are your government still serious?*” Kami utusan dari Indonesia (Sumatra Utara Bahagian Utara) jadi malu dan “tebal muka” dalam menghadiri setiap rapat bersama. Oleh karena itu dalam wawancara pers itu penulis sampaikan kalau paradigma pemerintah pusat tidak berubah terhadap daerah-daerah terluar, jangan lagi janji-janji diumbar. Dalam kenyataannya memang menjadi benar. Pelabuhan bebas Sabang berakhir tanpa ujung. Alasannya banyak dari masalah penyeludupan mobil dan barang mewah sampai kepada *security*. Penulis rasa ini adalah usaha kriminalisasi yang menyebabkan reputasi Sabang sebagai pelabuhan bebas tidak dapat diteruskan.

Dalam kedua kasus diatas penulis menemukan bahwa paradigma yang dahulu, dijalankan kerajaan Nusantara untuk memeperkuat pusat

kerajaannya yaitu “*indic-cosmology*” dipergunakan pada masa ORBA (lihat Geertz, 1965). Sederhananya paradigma ini berbunyi “Kalau ingin memperkuat pusat (keraton), maka daerah pinggiran (peripheral) harus diperlemah!” Paradigma ini telah dijalankan, baik dalam kerajaan Madjapahid, Mataram dan Bali.

Dalam kaitan paradigma ini, pemerintah Orde Baru dahulu banyak menjalankan paradigma *indic-cosmology*. Sekarang saya melihat pemerintahan Jokowi atau sejak periode reformasi telah cenderung meninggalkan paradigma ini, seperti dalam kehidupan maritim dan pembangunan Nusantara. Sabang sebagai kota yang sangat strategis, seharusnya dapat berkembang terutama sebagai kota pariwisata dan industri perkapalan. Bahkan pada masa yang akan datang dapat menyaingi Singapura. Apalagi, Thailand dan India akan mengembangkan dunia maritimnya. Seperti kapal-kapal bertonase besar tidak akan dapat berlayar melewati Selat Malaka yang bertambah dangkal dan sempit. Mereka harus singgah ke Sabang mempersiapkan pelayaran melalui Selat Lombok dan Sulawesi untuk menuju ke Tiongkok, Korea dan Jepang. Insya Allah.





## TURIS SUMUT MEMBELAH BUKIT BARISAN

**K**etika seorang turis berketetapan hati untuk melangkah meninggalkan rumahnya kesuatu tujuan wisata, apa yang hendak dicarinya? Dia ingin mendapatkan sesuatu kejutan baru (*excited*) dalam kehidupannya, agar dia dapat melepaskan rutinitas kehidupan sehari-hari yang membelenggunya. Sebab itu, ketika dia menetapkan untuk mengunjungi suatu daerah tertentu, sebenarnya dia belum mengetahui benar apa yang mengejutkannya di daerah itu. Yang jelas dia ingin menemui sesuatu yang berbeda dengan daerah yang ditinggalkannya. Oleh karena dana yang diperlukan juga bukan sedikit, biasanya keluarga-keluarga di Eropah atau Amerika menabung untuk dapat berwisata setiap setahun atau dua tahun sekali. Tidak seperti kebanyakan kita di Indonesia, tergantung kepada “uang dadakan” (maaf umpamanya menang lotre atau korupsi) atau jatuh sakit maka harus berobat keluar negeri (*health tourism*).

Waktu penulis bertugas sebagai konsultan lingkungan pada proyek wisata Bintang Utara yang dikelola oleh perusahaan turis Singapura (1987-1990), mereka ingin mengeluarkan semua orang-orang Melayu Bintang dari Utara pulau itu. Sebahagian besar tanah-tanah mereka telah dibeli, baik karena terpaksa atau imbalan tertentu, mereka yang belum pindah hidup seperti menumpang di tanah sendiri. Dalam beberapa pertemuan, tim kami yang waktu itu dipimpin oleh Ir. Wimar Witular, meyakinkan para pengusaha Singapura ini, bahwa wisata yang akan memindahkan 2-3 juta turis dari Singapura ke Bintang setiap tahunnya, apabila tidak bertemu



(*encounter*) dengan masyarakat setempat, itu artinya hanya sekedar “pindah tidur” dan hanya akan bertahan 2-3 tahun saja.

Wisatawan akan menghindari membuang waktu berharga yang telah dijadualkan semula. Setelah beberapa pertemuan, akhirnya program kehadiran kami, dirubah menjadi mempersiapkan “*living community*” masyarakat Melayu keseluruhan pulau Bintan itu. Yang dimaksud dengan “*living community*” disini adalah masyarakat Melayu yang hidup selayaknya, punya rumah, tebat (kolam ikan), sawah dan ladang (kalau nelayan punya perahu dan kelengkapannya), dalam suatu perkampungan (komunitas) yang kompak (punya mesjid dan sekolah).

Pertemuan para wisatawan dengan masyarakat Melayu (*living community*) setempat dengan segala aneka budaya asli yang ada pada mereka, itulah salah satu faset kehidupan manusia yang menyebabkan mereka merasa “*excited*”. Apalagi kalau mereka dapat membawa oleh-oleh seperti kerajinan tangan atau benda-benda asli lainnya dari masyarakat yang mereka temui. Jadi bukan karena dapat tidur lelap di hotel bintang lima, punya kesempatan berdisko, melantai dan menikmati konsert segala, karena semua itu ada dinegeri mereka. Sangat aneh pula, kalau mereka hanya dapat bertemu sesama turis saja!

## 1. Lama Turis Disatu Tujuan Wisata

Lama turis (*length of staying*) disuatu negara sangat tergantung dari tujuan yang telah dirancangnya. Tetapi biasanya seorang turis ingin menikmati objek wisata secara menyeluruh (*holistic*), yang dapat dijalaninya secara melingkar, sehingga waktunya dapat dipergunakannya secara lebih efisien tidak hanya habis ditengah jalan (transportasi) saja. Oleh karena itu kunjungan wisata yang melingkar seperti dari airport ke kota tertentu, dari kota ke danau, dari sana ke pegunungan, terus ke pantai atau ke perkebunan dan kemudian kembali ke air-port (*from the airport to town, and from the town to lake, from the lake to beach, and from the beach to mountain and then back to airport*), dan akhirnya baru kembali ke tanah airnya.

Dengan program wisata seperti ini, dia akan menghabiskan waktu minimal 6-7 hari. Kalau satu hari seorang turis mengeluarkan dana rata-

rata \$ 250.00 perhari (diluar ongkos transport), maka dengan jadwal seperti ini dia akan menghabiskan uang sekitar \$1.500.00 (seribu lima ratus US dollar), selama dia berada disatu tempat. Kalau seorang wisata selama ini ke Sumatra Utara, hanya mengunjungi Danau Toba dan kemudian, buru-buru pulang untuk mengunjungi Bali sebagai tujuan wisata kedua umpamanya, maka dia hanya mendapatkan dua destinasi wisata dengan pengeluaran yang mungkin sama.

## 2. Airport Silangit Mengembangkan Wisata Sumut

Mungkinkah seorang wisata mengunjungi destinasi melingkar di Sumut? Dengan dibukanya Airport Silangit secara resmi oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan bulan yang lalu, maka besar sekali kemungkinan destinasi wisata melingkar dikembangkan di Sumut. Pertama Sumut memiliki objek-objek destinasi wisata dari pantai Timur ke Barat yang sangat potensial untuk dikembangkan. Medan (sebagai Paris van Sumatra) memiliki daya tarik tersendiri, dia punya kota-tua (Pecinan) yang baik, pasar tradisional dan kebun binatang. Kemudian, tentu saja Danau Toba sebagai tujuan wisata yang telah dikenal manca negara.

Kita memiliki destinasi lain disekitar danau itu, seperti kota pegunungan yang sejuk di Brastagi, proyek panas bumi, dan kebun teh Sidamanik yang menarik terutama bagi wisatawan Eropah dan Amerika, sebagai peminum teh terbesar di dunia, tetapi mereka belum pernah melihat perkebunan teh dan bagaimana teh itu diproses. Alangkah nyamannya bagi seorang turis, kalau pada suatu pagi sesudah dia minum teh hangat, kemudian pergi melihat bagaimana teh ditanam dan bagaimana pula orang memetikinya, kemudian mereka dapat melihat sendiri bagaimana teh itu diproses di pabrik.

Mungkin di Brastagi mereka berminat mendaki gunung Sibayak. Objek ini sangat potensial untuk dikembangkan bagi turis asing. "*Hiking mountain*" (pedakian gunung) ini sangat tepat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki gunung di daerah khatulistiwa (bayangkan seperti permainan ski di pegunungan salju pada musim dingin). Setelah itu, airport Silangit dapat segera menyeberangkan mereka umpamanya ke Sibolga atau ke Nias (karena objek-objek turis di Tapanuli Selatan belum dikemasi). Kedua tempat ini merupakan tujuan

wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, selama ini turis susah menggapainya karena transportasi ke Danau Toba telah menguras tenaga dan waktu mereka. Mungkin mereka akan bersilancar di pantai teluk dalam yang sangat terkenal ombaknya (menurut para turis luar negeri, lebih baik dari Bali atau tempat lainnya di dunia). Banyak objek wisata lainnya yang dapat disarankan untuk turis di Nias (seperti mengunjungi permukiman rumah adat Nias “mendaki matahari” atau peninggalan zaman megalithik), tergantung bagaimana kita dapat memoles programnya.

### 3. Kuala Namu International Airport Menopang Turisme

Keberadaan KNIA akan sangat mendukung arus wisata Internasional ke Sumatra Utara. Selama ini arus turis dari Australia dan Jepang umpamanya dari Jakarta terus mengalir ke Timur (Bali dan Yogyakarta). Dengan dibukanya KNIA mereka tidak perlu ke Jakarta lagi dapat langsung pulang pergi ke Medan. Arus turis dari Jepang saja setahunnya berjumlah hampir 5 (lima) juta orang, sedang Australia 3 (tiga) juta orang, merupakan potensi yang menantang untuk Sumatra Utara. Memang Bali dan Yogyakarta umpamanya memiliki keunikan tersendiri untuk orang Australia, tetapi hal ini perlu diteliti apa saja keunikan itu agar Sumut dapat berpacu setara dengan Bali atau Yogyakarta. Keunikan itu merupakan anugerah Tuhan, yang dapat membawa para turis menemukan mimpi-mimpi “*excited*” mereka. Akan tetapi ada tiga hal universal yang harus kita miliki sebagai “*host*” (tuan rumah) yaitu keramahan, kerapian dan kebersihan, semua manusia menyukai dan mengharapkannya kalau pergi kesuatu destinasi wisata.

Dalam tiga hal diatas, Bali dan Yogyakarta berbeda dengan Sumatra Utara yang multi etnis dan multikultural. Mereka akan bertemu (*encounter*) dengan manusia yang tidak seragam. Oleh karena itu Sumatra Utara tidak hanya menampilkan keindahan alam yang beragam tetapi juga keanekaan budaya multikultural yang menarik. Ketika mereka mengunjungi 7 (tujuh) destinasi wisata di Sumatra Utara, maka mereka seolah-olah telah bertemu dengan tujuh bangsa yang berbeda-beda (bukankah ini unik dan memikat?). Pertanyaannya yang penting dijawab ialah dapatkan kita mengemas wisata melintasi Bukit Barisan ini dengan baik dan tidak memalukan?



*Air-Terjun-Telaga-Dwi-Warna-Sibolangit*

Sumber : <https://www.google.com/search?q=foto+wisata+sumatera+utara&safe=strict&sxsrf=ALeKk030cFi13ZdpciteJyywDJw0Rba->



*Wisata-Aek-Manik Siantar Sumut*

Sumber : [https://www.google.com/search?q=foto+pemandian+aek+manik&safe=strict&sxsrf=ALeKk01ZnEFGvsWu2TekingLnP1deOc3kw:1598166636785&atm=isch&source=i&itx=1&fi=z62CCDw8k2y1MP/252CwMzHjGdpVP/252C\\_&vet=1&usq=AK\\_-](https://www.google.com/search?q=foto+pemandian+aek+manik&safe=strict&sxsrf=ALeKk01ZnEFGvsWu2TekingLnP1deOc3kw:1598166636785&atm=isch&source=i&itx=1&fi=z62CCDw8k2y1MP/252CwMzHjGdpVP/252C_&vet=1&usq=AK_-)



## WISATA KESEHATAN (*HEALTH TURISM*)

Wisata kesehatan mempunyai sejarah panjang, menurut Howze (2007) semasa Yunani kuno, pesakit melakukan perjalanan ke “*healt resort*” (tempat peristirahatan) yang dikenal sebagai “*Asklepia*” di daerah Mediteranian untuk pensucian dan penyembuhan rohani (spiritual). Sementara di masa Romawi pesakit melakukan perjalanan ke “*Aquae Sulis*,” sebuah kolam yang dibangun oleh bangsa Romawi yang merupakan air mancur panas di Bath. Daerah itu merupakan tempat ibadah dan pemandian. Disepanjang sungai Nil pada zaman neolitik dibangun berbagai spa (tempat pemandian). Para bangsawan Eropah sering melakukan perjalanan ke kolam air panas untuk tujuan perobatan, dan ini merupakan pelancongan (wisata) kesehatan. Begitu juga dibelahan bumi Asia, seperti tradisi Ayurveda di India, pesakit melakukan samadi, berendam berjemur disungai Gangga.

Pengobatan dan pemeliharaan kesehatan dewasa ini, telah menekankan aspek ekonomi yang dapat diperjualbelikan, dengan kata lain dia terkait dengan faktor “*supply and demand*”. Sebab itu wisata kesehatan, atau berobat keluar negeri didorong banyak faktor, seperti perbedaan dari segi kualitas perobatan, pembiayaan, teknologi, budaya dan bahasa. Di Amerika Serikat sendiri, menurut Tompkins (2010) biaya kesehatan cukup tinggi, masa menunggu yang lama agar mendapatkan kemudahan, menyebabkan mereka mencari perawatan perobatan antar bangsa. Begitu juga pesakit-pesakit dari Asia yang dahulunya berobat ke Amerika Serikat, tidak mampu lagi kesana dan mengalihkannya ketempat lain.

Dalam keadaan itulah sebuah rumah sakit Bumrungrad di Thailand, berusaha untuk menarik minat pesakit-pesakit antar negara dengan menampilkan kecanggihan teknologi pengobatan dan dengan biaya yang minim. Begitu juga orang-orang dari Timur Tengah, sesudah peristiwa serangan di New York 11 September, mereka mengalihkan perawatan kesehatannya dari Amerika dan Eropah ke Asia. Mereka banyak yang memilih untuk dirawat di hospital Bumrungrad Thailand, sehingga pesakit di negeri ini melonjak dari 5,000 ke 93.000 antara tahun 2001 dan 2006. Menurut Kher (2006) lebih dari 55.000 orang Amerika telah melawat ke Hospital Bumrungrad itu untuk berobat dan rawatan gigi serta kosmetik, sambil kemudian berwisata.

Pertumbuhan wisata kesehatan juga meningkat di Asia Tenggara. Beberapa negara ASEAN telah menjadikan destinasi utama pelancongan perobatan, tidak hanya di Thailand, tetapi juga kemudian menyusul Malaysia, dan Singapura. Negara-negara itu telah menjadikan industri perobatan sebagai industri strategik Nasional dengan tujuan memajukan wisata kesehatan mereka. Negera-negara ini, menawarkan kualitas pengkhidmatan yang berkualitas tinggi, para doktor yang berpengalaman dan berbagai kemudahan lain, Semua ini digabungkan dengan aktivitas pariwisata seperti berbagai *resort* rekreasi, budaya dan hiburan untuk menjadikan wisata kesehatan sebagai industri strategik wisata (Aulia, 2013).

Bagi Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand adalah negara sumber wisata yang penting, Pada tahun 2009, Malaysia menerima sebanyak 71,05% wisatawan kesehatan dari Indonesia. Diikuti oleh Amerika Serikat dan Singapura. Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan pasar utama untuk wisata kesehatan bagi Malaysia dan Singapura.

Tabel 1.  
Presentase Pesakit luar negeri untuk Malaysia dan Singapura

Negara Asal Pesakit	Destinasi	
	Malaysia (%)	Singapura (%)
Indonesia	71.05	27.00
Malaysia		23.70
Amerika Serikat	1,50	4,10
Singapura	1,25	
Negara-negara lain	26,20	25,20
Jumlah	100,00	100.00

Sumber : *Tourism Malaysia dan Governement Singapura 2007* (Aulia, 2007).

Demikianlah di Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura telah menjelma menjadi negara industri wisata kesehatan yang berkembang pesat. Kedua negara ini telah mengembangkan perobatan yang canggih dan *resort* wisata yang menyebabkan pesakit yang berkunjung dapat memfaatkan keduanya. Amerika Serikat dan Eropah yang selama ini merupakan pusat perobatan antar bangsa (terutama untuk kanser dan neurologi) bagi orang-orang kaya di dunia, sekarang beralih kedaerah-daerah Asia (Thailand, Malaysia dan Singapura).

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan demografi, terutama meningkatnya usia harapan hidup, menyebabkan kelompok orang usia lansia (*egaing people*) bertambah. Banyak jenis penyakit yang butuh perobatan intensif seperti mengganti tengkorak lutut. Kalau di Amerika Serikat akan mengeluarkan dana \$ 40.000.- sementara di Singapura cukup mengeluarkan dana \$13.000.- Selisih dana tersebut dapat dipergunakan yang bersangkutan untuk wisata ke Sentosa (daerah wisata Singapura) atau menyeberang ke Bintan Utara (Indonesia).

Wisata kesehatan ini juga, ditopang oleh kelancaran transportasi udara antar negara, seperti antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Mereka mendapatkan kemudahan antar negara dengan bebas visa. Kemudahan-kemudahan travel yang terus berkembang, dan kelancaran komunikasi memudahkan orang berpergian. Umpamanya setiap hari ada 7-8 penerbangan dari Medan ke Penang, sehingga orangpun dapat menghemat waktu dan dana, ketimbang ke Jakarta, baik untuk pesawat, penginapan dan *resort* pelancongan.

Negara seperti Thailand, Malaysia dan Singapura telah memperoleh keuntungan dari wisata kesehatan ini, karena mereka meningkatkan sekaligus kecanggihan perobatan, dan memperluas aspek wisata (pelancongan). Tabel dibawah dapat memperlihatkan pendapatan wisata kesehatan yang terus bergulir dinegera-negara tersebut (Aulia, 2013).

Tabel 2. Pertumbuhan Eksport dan Jumlah Pelancong di Thailand, Malaysia dan Singapura

	Pendapatan Eksport	Jumlah Pesakit
Malaysia (2003)	\$ 40 milion	lebih dari 100.000
Singapura (2002)	\$ 420 milion	210.000
Thailand (2005)	\$ 484 milion	630.000

Sumber : Arunannoidchan and Fink (2007).

## 1. Landasan Teoritis

Menurut pandangan Antropologi masalah kesehatan atau penyakit muncul apabila terjadi:

- a. Ketidakseimbangan (*unbalance*) dalam tubuh manusia, antara unsur panas (*hot*) dan dingin (*cool*). Ketidakseimbangan ini merupakan sebab utama penyakit. Konsep ini dianut oleh India (*Ayurdiva*), China (*Sinse*: Kesimbangan antara unsur *yin* dan *yang*), di Indonesia seperti pengobatan dari Jamu antara unsur panas dan dingin.



- b. Dalam Islam, Ilmu Kesehatan (*Health Scienses*) dikembangkan oleh Ibnu Sina dari tradisi budaya Helenisme yang dinamakan Yunani Tibbi (tibbi=tabib). Sesudah masa zaman keemasan Islam (abad 16-18), peningkatan Yunani Tibbi diteruskan dalam tradisi kedokteran modern Barat (*modern medical sciences*). Tradisi ini menekankan bahwa perubahan ekologis menimbulkan dampak terhadap peredaran darah dan metabolisme, sehingga daya tahan tubuh melemah.

Ekologi Baru (turisme atau pariwisata) mengembalikan manusia kedalam kondisi baru dan memberi kekuatan dalam kehidupan dengan keseimbangan baru. Pesakit yang dibawa berwisata akan tertolong, karena mendapatkan pengukuhan kondisi dan keseimbangan baru yang dapat memperkokoh kembali kekuatannya.

Disamping alam (lingkungan alami dan lingkungan buatan), penyakit yang dibawa berwisata dapat disegarkan dengan melakukan “*encounter*,” berinteraksi dengan masyarakat setempat (lingkungan sosial) baru. Apalagi dalam persentuhan itu pesakit dapat menikmati suguhan pergelaran budaya, seperti tarian, nyanyian atau teater masyarakat setempat. Alam yang indah dan persentuhan dengan budaya baru masyarakat setempat akan mengembalikan keseimbangan yang akan memperkokoh kepercayaan diri sang pesakit.

Oleh karena itu wisata desa, dengan simponi alam yang indah dan peragaan seni budaya masyarakat desa wisata, akan sangat membantu penguatan dan penyembuhan pesakit yang dilibatkan dalam wisata desa.

## 2. Turisme dan Kesehatan

1. Pengaruh wisata (*tourism*) terhadap kesehatan dan kehidupan manusia:
  - a. Wisata sangat berpengaruh terhadap penjagaan kualitas kehidupan yang prima (*a prime quality of life*).
  - b. MTL (*Medical Tourist Life-cycle*): *a modal developed to ready reflect the need of patients at differents stage of illness: “a medical tourist typology.”*
  - c. *“Directly arrange tourism may be equally significance, carrying with it many of to health and well being.”*

2. Ada dua model perencanaan pengobatan pengobatan dengan program turis :
  - a. *Ad Hoc Therapy*
  - b. *Indirected and Directed Therapy*

### **Ad Hoc Therapy (Inggris dan USA)**

- a. Beberapa organisasi menawarkan pengobatan yang berhubungan dengan kegiatan turis. Rencana ini ditujukan kepada anak-anak yang remaja terutama anak-anak yang berumur 7-15 tahun pada musim panas yang menderita kanker dan penyakit lain yang serupa.
- b. *International Confederation of Childhood Cancer Organization*, melakukan kegiatan serupa untuk berbagai jenis penyakit orang tua dan balita.

### **Indirected and directed therapy (The Odyssey Program) :**

*“The participation to discover the richness of being - to move on from the time of introspection and despair to the next stage of lives.”*

*“A more positive self-image and greater sense of self-worth in a very many participants.”*

### **Directed Therapy**

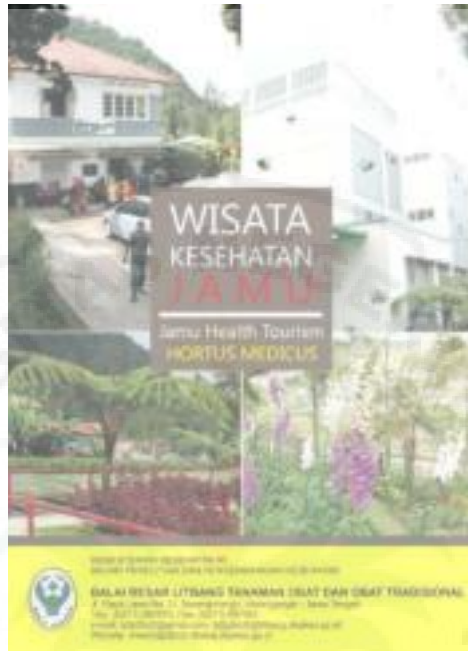
- a. Dalam perencanaan terapi (pengobatan) langsung. Turis akan diikutsertakan dalam setiap kegiatan turis yang berlangsung. Tidak perlu melihat apakah aktivitas itu berhubungan langsung atau tidak dengan penyakit wisatawan (seperti ikut serta main layang-layang di Langkawi).
- b. Aktivitas itu dapat dilihat sebagai *“a means of escape from the paramount reality of living.”*
- c. Beberapa perusahaan penerbangan di Amerika Serikat mengelola program *“Kit-Cares” (medical travel program)*, yang menggunakan donasi para penumpang. Program ini terutama dibuat untuk anak dan remaja (s/d 19 tahun). Menunjukkan bahwa *tourism* (wisata) dapat mengobati orang yang sedang sakit.

### **The Nature of Sickness**

1. Menurut Unesco *“Health is complete state of mental, physical and social wellbeing and merely. The absence of disease of infirmity.”*
2. Penyakit bervariasi dari negara ke negara lain, dari kelompok etnik atau ras satu ke yang lain. Dalam dunia maju (*developed country*), penyakit **“generative”** atau **“life style disease”** mengungguli penyakit **“infection”** dan kurang gizi (protein). Perbedaan kondisi ini akan membedakan jenis penyakit umum yang diderita masyarakat setempat, seperti : obesitas, penyakit jantung, keresahan (*anxiety*) dan depresi.
3. Secara garis besar penyakit dapat dikategorikan kepada salah satu atau kombinasi: **physical and psychological diseases**. Oleh karena itu berbagai negara mengembangkan terapi yang berbeda-beda untuk mengatasi penyakit masyarakatnya.

### **Alam (nature) sebagai penyembuh (healing)**

1. Alam dan manusia yang mengitari kita dapat berfungsi sebagai faktor kohesi (perekat) baru yang memberikan dampak tertentu kepada manusia, terutama dari segi psikologis.
2. Begitu juga bangunan-bangunan bersejarah, kebun binatang (*zoo*) permainan anak dan kendaraan tertentu, akan memberikan efek tertentu kepada manusia:
  - a. Mengunjungi candi Brobudur atau Taj Mahal atau reruntuhan gedung-gedung tua di Yunani.
  - b. Kebon binatang, ikut dalam kendaraan atau permainan ski dan lain-lain.
  - c. Bertemu dengan kelompok-kelompok manusia seperti orang Indian, Papua, atau Afrika atau menikmati kuliner mereka.
3. Keindahan alam yang memukau, berada di tengah laut atau di hutan, akan memberikan suasana, perasaan dan pandangan dunia yang baru pada manusia yang menyembuhkan dirinya sendiri.



*Wisata Kesehatan*

Sumber: [https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01ztVDib\\_374yTW62n0urO1lg159815541756&source=univ&tm=id&q=wisata+kehatan&X&ved=2ahUKewj9r9bvULDrAhWq7HMBHVniCxEQ420oCnoECAoQMA&chid=1598155471032730&biw=1263&bih=628#imgcr=RG4b\\_EyHdQtmHM&imgdii=dS0rT435aOS6fM](https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01ztVDib_374yTW62n0urO1lg159815541756&source=univ&tm=id&q=wisata+kehatan&X&ved=2ahUKewj9r9bvULDrAhWq7HMBHVniCxEQ420oCnoECAoQMA&chid=1598155471032730&biw=1263&bih=628#imgcr=RG4b_EyHdQtmHM&imgdii=dS0rT435aOS6fM)

### 3. Wisata Perobatan ke Penang Maju Pesat

Menurut Dr.Aulia (dalam desertasinya di UKM 2013), konsep wisata kesehatan (perobatan) di Malaysia mencakup program rawatan penyembuhan dan pencegahan penyakit, serta kebugaran pikiran guna meningkatkan rasa optimisme sebagai dampak positif dari wisata tersebut. Dengan kata lain, program rawatan penyembuhan menggabungkan rawatan perobatan medis dengan lingkungan yang asri sebagai pengobatan alternatif bagi penyembuhan penyakit dan kegalauan pikiran sang pasien. Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa program pencegahan penyakit juga menawarkan pemeriksaan kesihatan disatu rumah sakit secara menyeluruh (integral) dari berbagai dokter ahli yang terkait dengan penyakit mereka. Obat pencegahan,

ketenangan, antisipasi, penjagaan dan program kesegaran seakan dipadukan. Namun pasien yang datang berobat dari Indonesia kebanyakan konsentrasi untuk rawatan perobatan termasuk rawat-inap, kemudian berusaha meluangkan waktu untuk melakukan wisata sebagai program tambahan. Wisata perobatan terutama dari Medan ke Penang, akhir-akhir ini membeludak, dan patut menjadi perhatian bersama, masyarakat dan pemerintah. Memang industri wisata perobatan tumbuh dengan pesat dinegara jiran itu, apalagi sejak berlakukanya peningkatan kerjasama ekonomi serumpun dan saling ketergantungan antar negara bertetangga, antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia tampaknya meningkatkan pengkhitmatan (*services*) pemeliharaan dan penjagaan kesehatan. Hubungan antara negara yang bersahabat itu, telah dimungkinkan dengan perjalanan bebas (tanpa visa). Kemudahan ini telah mendorong pengkhitmatan kesehatan menjadi wisata perobatan. Apalagi jarak antara Medan dan Penang umpamanya, dapat ditempuh dengan pesawat kurang dari satu jam, dengan harga yang terjangkau.

Wisata perobatan dewasa ini sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Wisata ini, telah membuktikan bahwa industri pelancongan ini tidak hanya membawa pemasukan uang (devisa) yang cukup signifikan. Artinya pengembangan industri itu sendiri disuatu negara dengan kegiatan wisata telah diuntungkan. Bahkan keuntungannya berlipat ganda, pertama meningkatkan "*expertise*" para ahli kesehatan setempat, pembangunan peralatan laboratorium dan bangunan penyangga, serta mengembangkan sarana wisata yang sangat bermamfaat untuk masyarakat setempat dan pasien yang berobat. Artinya, negara-negara yang berpendapatan menengah dan rendah yang menjadi sasaran wisata ini menggunakan sumber daya baru (perobatan dan wisata) dalam melayani pasien dari berbagai negara. Malaysia ternyata terus berusaha memperbaiki standart pengkhitmatan (*services*) perobatan, terutama peningkatan kualitas keahlian kedokteran, perawat dan tenaga administrasi serta pendekatan budaya (kemanusiaan). Mereka berusaha terus mengembangkan suasana yang menyenangkan pasien dan mendorong pekerja-pekerja mereka untuk lebih professional.

Bagi Malaysia pertumbuhan wisata kesehatan atau probatan ini telah turut memulihkan krisis ekonomi (1980-an) dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi mereka dengan memperluas industri wiata kesehatan.

Mereka berharap dengan mengembangkan berbagai kecanggihan sarana perobatan, seperti pengiriman dokter-dokter ke Eropah, Amerika Serikat, China dan Jepang, dan topangan peralatan kesehatan yang mutakhir serta mutu pengkhitmatan (services) akan memperkuat daya-tarik wisata kesehatan dari manca negara ke Malaysia. Menurut Penang Monthly (2014) bahwa pemulihan ekonomi Malaysia yang terjadi sejak 2008-2009 telah ditopang dari industri wisata perobatan. Mereka mencatat dari RM 511 juta (US\$168 juta) pada th. 2000, dalam 10 tahun kemudian (2000-2011) pendapatan mereka telah melonjak 14 kali lipat. Pesatnya pertumbuhan industri wisata perobatan ini telah membangunkan inspirasi untuk menekuninya lebih intensip. Pusat-pusat industri perobatan Malaysia, selain Penang adalah Kuala Lumpur, Perak, Malaka dan Ipoh. Malaka adalah kota yang bersejarah, banyak peninggalan budaya Portugis yang masih tersisa, yang sekarang sedang dipugar mereka. Kampung-kampung peninggalan Portugis ini merupakan salah satu distinasi wisata. Disana juga terlihat banyak penjaja yang menjual pernik-pernik ala budaya Portugis seperti senjata-senjata, dari pistol sampai meriam-meriam abad ke 15-16. Hal yang menyenangkan juga di Malaka, kita dapat mencicipi kuliner Melayu yang khas, makan dengan kulit pisang bersama. Sekarang Malaka sedang menata ulang kotanya, sungai-usangai yang menggurita seperti sarang laba-laba telah diperbaiki dan dijadikan alat transportasi seperti kota Amsterdam (negeri Belanda) yang dapat meramaikan transportasi kota. Banyak situs-situs lainnya seperti gedung-gedung tua zaman Portugis yang dipermak dan memperindah kota itu, ditambah lagi sado dan becak yang dihiasi bunga-bunga warna-warni. Pendeknya bagi seorang historian-antropologi yang menjadi wisatawan kota Malaka akan sangat memukau, apalagi dapat bertemu dan bercakap-cakap dengan gadis-gadis bule keturunan Portugis, apakah mereka masih merindukan keluarga Portugis atau Melayu. Saya sendiri yang bertugas selama tiga tahun sebagai dosen penguji doktoral di Universiti Malaya dan UKM sering menginggahi kota pantai itu. Sekarang telah mulai resmi dibuka jalur tol-laut antara Dumai dan Malaka. Artinya orang-orang Riau akan tumpah ruah pula ke Malaka. Namun, Penang merupakan distinasi utama bagi wisata perobatan masyarakat Sumatra Utara.

### a. Sejenak Melihat Kebelakang

Mungkin hal ini dapat dirasakan sebagai sesuatu yang ironis. Karena pada tahun-tahun 1980-an masih banyak mahasiswa-mahasiswa kedokteran di Medan yang berasal dari Malaysia. Selain di Fakultas Kedokteran USU, Fakultas Kedokteran UISU tercatat banyak mahasiswa yang berasal dari Malaysia menuntut ilmu. Sungguhpun pemerintah kemudian mewajibkan mahasiswa-mahasiswa PTS untuk mengikuti ujian negara, termasuk mahasiswa Fakultas Kedokteran, namun mereka tidak terganggu dengan peraturan itu. Bagi mereka ijazah kedokteran UISU yang diboyang ke Malaysia sudah cukup, karena ijazah itu telah lama diiktiraf (diakui) dinegeri mereka. Memang sejak tahun 2000 dan seterusnya Fakultas Kedokteran yang diminati mahasiswa Malaysia telah menyebar, sampai-sampai ke Universitas Cut Nyak Dhin Yayasan Abuyatama umpamanya, yang kini berada di Lampung. Sampai sekarang mereka masih bekerjasama dengan Universitas Pajajaran (Bandung), merekrut calon-calon mahasiswanya dari Malaysia. Artinya banyak juga dokter-dokter di Malaysia yang dilahirkan oleh Fakultas-Fakultas Kedokteran Indonesia, dan sekarang para alumni itu berjaya di Malaysia. Karena itu, pertanyaan yang sering mengganggu kita, mengapa masyarakat Medan dan sekitarnya terus juga berobat ke Malaysia (Penang, atau ke Kuala Lumpur)? Bukankah dokter-dokter disana itu sebahagian dididik dan dibesarkan di Indonesia. Dan banyak Guru Besar mereka di Medan, masih membuka praktek. Namun, mengapa kita berbondong-bondong terus kesana. Pertanyaan ini juga sampai sekarang masih terus mengganggu pikiran kita. Terutama karena berbagai kasus malpraktek dokter-dokter di Medan yang diisukan dari mulut ke mulut. Karena itu waktu saya masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU (1990-an), saya bersama Dekan Fakultas Kedokteran UISU berangkat ke Kuala Lumpur, bertemu dengan pimpinan dan anggota Persatuan Alumni Fakultas Kedokteran UISU di Malaysia. Pertemuan itu, kami gelar di sebuah hotel tempat kami menginap di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, yang hadir sekitar 23 orang yang tersebar dari beberapa negara bahagian Malaysia. Masalah yang penting kami diskusikan ialah, mengapa mereka sukses dan berjaya di Malaysia, sedangkan teman-teman mereka di Medan, banyak mengalami kasus-kasus dan pasiennya banyak pula yang terbang ke Penang, atau Kuala Lumpur untuk berobat.

Pertemuan yang sangat jarang terjadi itu dengan suasana yang sangat intim dan penuh rasa kekeluargaan. Menyebabkan, masalah seperti tadi itu dijawab mereka dengan sungguh-sungguh dan penuh keprihatinan. Antara lain ada yang menjawabnya dengan jujur dan penuh rasa keharuan. “Pak, memang kami telah dididik di Fakultas Kedokteran UISU, lima sampai tujuh tahun lamanya. Kami pulang kembali ke Malaysia dan ditempatkan di Rumah Sakit atau pusat-perobatan. Tetapi satu atau dua tahun kemudian kami ditugaskan untuk mendapatkan keahlian ke berbagai negara lain, ada yang di Eropah, di Amerika atau ketempat lain, selama satu atau dua tahun, sehingga dalam tempo lima tahun kami telah membawa pengalaman keahlian dari berbagai negara. Karena itu, dibelakang nama kami selain mencantumkan UISU, kami dapat mencamtunkan nama dari satu, dua atau tiga negara lain, dimana kami telah menimba ilmu kedokteran. Kemudian kami disini bekarja, mungkin agak berbeda dengan teman-teman kami di Medan atau di Indonesia. Kami mengabdikan hanya pada satu Rumah Sakit atau institusi kesehatan, dari jam 7.30 pagi sampai jam 16.00 sore hari. Sungguhpun setiap dokter memiliki keahlian sendiri-sendiri, tetapi kami leluasa berkonsultasi dengan sesama dokter dan melihat semua record kesehatan dari dokter-dokter lainnya. Kami dapat berkonsultasi antar atau dalam kelompok dokter terbatas untuk menangani seorang pasien tertentu.” Dengan keterangan dan diskusi yang terjadi itu, kami dapat mengerti dan memahami, betapa konsentrasi dan setiaan dokter kepada satu institusi dan kerjasama secara integral dalam penanganan kesehatan sang pasien makin terjamin dan kemungkinan malpraktik makin dapat dijauhkan. Inilah salah satu kunci sukses mereka di Malaysia.

#### **b. Pengalaman dengan Rumah Sakit Malaysia**

Saya telah banyak mendengar tentang bagaimana keramahan dan perlakuan manusiawi dengan para dokter-dokter di Malaysia. Tetapi yang sangat mengesankan saya adalah peristiwa ketika saya sendiri dibalut masalah yang tidak dapat saya pecehkan bersama dokter yang merawat saya di Medan dan Jakarta. Waktu itu saya bertugas sebagai PR.I Unimed, pekerjaan saya memang meletihkan karena beberapa pekerjaan lain dimasyarakat saya tangani juga seperti di HIPIS (Himpunan Indonesia



untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial, AAI (Asosiasi Antropologi Indonesia) dan ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia) serta MSI (Masyarakat Sejarawan Indonesia), memang kegilaan saya sebagai aktivis tidak dapat saya tinggalkan sejak dari mahasiswa dahulu. Banyak teman-teman dan para sahabat saya yang menasehati saya supaya meninggalkan kegiatan yang terlalu banyak itu, tetapi nasehat itu tidak begitu saya indahkan. Karena itu saya dihinggapi penyakit yang sukar saya obati dan diidentifikasi secara baik. Disekitar leher dan pundak saya sering semutan yang mengganggu konsentrasi. Akhirnya atas nasehat istri saya saya berobat ke Jakarta ke rumah sakit yang terkenal di Kuningan Jakarta. Saya ditangani oleh dokter THT yang senior, dan kemudian setelah pemeriksaan yang teliti mereka menetapkan saya harus dioperasi. Waktu operasi ditetapkan sekitar 7 hari lagi, dan saya harus makan obat. Saya memberi tahu segera anak dan menantu saya yang sedang kuliah di UKM Kuala Lumpur. Dua kemudian mereka menelepon saya agar segera datang ke Kuala Lumpur. Rupanya mereka memasukkan ke internet keluhan saya kepada sembilan orang THT dan memohon bantuan nasehat. Esoknta ada empat orang yang mensehati agar segera menemui Prof.Dr,Lukman Saim di Rumah Sakit UKM Kuala Lumpur. Saya datang menemui beliau pagi hari. Dokter Lukam Saim masih setengah baya, melakukan pemeriksaan dari jam sembilan sampai jam satu tengah hari, jam empat petang saya kemudian menemui beliau kembali. Dia menjabat salam saya, dan berkata singkat, "Pak Usman, *just forget it, it's just eaging problem!*" Saya ingin banyak berbicara tetapi dia dengan senyum menyabarkan kekusaran saya. Dr Lukman tetap bersikukuh, bahwa nanti gangguan itu akan berakhir pelan-pelan, berusaha untuk lebih relarck dan banyak istirahat. Saya tanya obat yang harus saya minum, oh tidak ada obat nasehat itulah obatnya, sambil menyalam hangat tangan saya, "*Good Luck Pak Cek!*" Saya betul-betul terhenyak dan bersyukur.

Sya masih bolak balik ke Penang (1980-an), karena di USM (Universiti Sain Malaysia), karena anak bungsu saya masih berkuliah di Pascasarjana jurusan arsitektur. Sambil menyelan minum air kata orang, saya menyepakan memeriksa kesehatan di RS Lam Wah I, waktu saya masuk terpampang plakat siapa-siapa yang menyumbang waktu mendirikan RS itu. Tertera nomor tiga Aceh Trader Association, saya kaget, kagum dan terharu. Orang

Aceh daerahnya sendiri tidak memiliki RS seanggun ini, tetapi di Penang, mereka turut mendirikan dan “memiliki” RS yang dikunjungi paling banyak oleh orang Indonesia, termasuk orang Aceh sendiri. Semula saya hanya ingin “*check up*” kesehatan di RS itu, tetapi dokter yang memeriksa kesehatan saya, menyatakan bahwa “encik punya simpanan batu di empedu” saya jadi kaget juga. Saya katakan biarlah nanti saya akan lagi mengobatinya. Dokter itu menjawab, “sebaiknya sekarang saja dikeluarkan, nanti kalau Pak Cit dalam kesibukan batu itu bisa membunch Pak Cit jadi truk lah!” Saya jadi tersudut dan tak punya alternatif lain, selai mengatakan ya, terima kasih! Dua jam kemudian saya sudah diruang peristihatan. Seorang Perawat datang memberikan beberapa buah batu kecil berwarna hitam di sebuah sloki untuk saya. Saya menginap di Mesjid USM dan istri saya bercerita kepada anak saya, bahwa dioperasi di RS Lam Wah I, dia jadi kaget. Saya hanya senyum malam ini ayah harus istirahat!.





## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, 2013; 2007. "The Increasing Trend of Medical Tourism From North Sumatera to Malaysia: Analysis on Socio Economic Factors", *International Journal of Economics and Finance Studies*, Vol.5, No.1, 2013, pp. 74-84.
- Cernea, Michael M. 1991. *Putting the People First Sociological*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Ermayanti. 2004. Antropologi Pariwisata, *Jurnal Antropologi*, VI 7-2004.
- Geertz, 1959. "Form and Variation in Balinese Village Structure." *American Anthropologist* 61:991-1012.
- Geertz, 1967. "Tihingan: A Balinese Village." Pp. 210-43 in *Villages in Indonesia*, edited by R. N. Koentjaraningrat. Ithaca: Cornell University Press.
- Korten, David. Geertz, 1972. "Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight." *Daedalus* 101(1).
- Graburn, Nelson. H. H. 1983. The Anthropology of Tourism, *Annals of Tourism Research*, Vol. 10, pp.9-33, 1983.
- Smith, Valene L. 1989. *Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism*. United States of America: University of Pennsylvania Press.
- Kher. 2006. "Woodstock Villa - Hindi movie review". *Times of India*. Archived from the original on 2 June 2008. Retrieved 2 June 2008.
- Korten, David. 1986. *Community Management: Asian Experience and Perspectives*, Kumarian Press.
- Korten, David. 1990. *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*, Kumarian Press.
- Korten, David. 2004. *Alternatives to Economic Globalization: A Better World is Possible, 2nd Edition*.

- Lewis, Oscar. 2012. *Kisah Lima Keluarga Telaah-telaah Kasus Orang Mexico dalam Kebudayaan Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Malau, Fahrin. 2017. *Analisa*, Jentera, Mengangkat Destinasi Danau Toba, 3 Desember 2017
- Malinowski, Bronislaw. 1966. *Argonauts of the Western Pacific, An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea*. London. Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Margaret Mead. 1970. *Culture and Commitment*.
- Picard, Michel. 2006. *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta: Gramedia
- Noronha. 1976. *The Sociology of tourism*.
- Pelly, Usman. 2013. *Pinisi Nusantara: Studi Pewarisan Keahlian Membuat Perahu : Ara dengan Perahu Bugisnya*. Medan: Casa Mesra Publisher.
- Pelly, Usman. 2017. *Waspada*, Opini, "Mampukah Kita seperti Bali", 4 Juli 2017.
- Pelly, Usman. 2018. *Waspada*, Opini, "Era Emas dan Danau Toba", 2018.
- Pelly, Usman. 2019. *Waspada*, Opini, "Danau Toba Riwayatmu Ini", 19 Juli 2019
- Spillane, James. 1994. *Pariwisata Indonesia Siasat Rekayasa Ekonomi dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Santoso, Arianto Budi dan C Henny. 2019. *Phytoplankton composition and the occurrence of cyanobacterial bloom in Lake Maninjau, Indonesia*, 380 (1), IOP Publishing.
- Donal, Mcleod and Tom Selwyn. 2002. The Scope of the Anthropology of Tourism: A Response to Tom Selwyn, *Anthropology Today*, vol. 18, NO. 2 (Apr., 2002), pp.27 <http://www.jstor.org/stable/3694964>. Accessed: 26/01/2015 18:12
- Tyra de Kleen. 1936. *Temple Dances in Bali*, Etnografiska museet.
- Wells, M. and Brandon, K. 1992. *People and Parks: Linking Protected Areas Management with Rural Communities*. World Bank/World Wildlife Fund/US Agency for International Development, Washington DC
- West, P.C. Brechin, S.R. 1991. *Resident Peoples and National Parks: Social Dilemmas and Strategies in International Conservation*. University of Arizona Press



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY